

**KAJIAN KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN
PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA**

TESIS

Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

HESTI DWI SAPTANINGTYAS

L 4D 006 081



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**KAJIAN KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Oleh :
HESTI DWI SAPTANINGTYAS
L 4D 006 081

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 2 September 2008

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 2 September 2008

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

WAKHIDAH KURNIAWATI, ST.MT

Ir. NURINI, MT

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang

Dr. Ir. JOESRON ALIE SYAHBANA, MSc

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/Institusi lain maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab

Semarang, 2 September 2008

HESTI DWI SAPTANINGTYAS

NIM L 4D 006 081

- ❧ Ilmu hanyalah ilmu sejati, jikalau ilmu itu ialah untuk membawa kebahagiaan kepada manusia.
(Bung Karno)
- ❧ Harta kalau dibelanjakan habis, ilmu kalau dibelanjakan bertambah. Bumi seisinya tunduk kepada orang berilmu.
(Al-Ghazali)
- ❧ Tanamkan buah pikiran dan Anda akan menuai tindakan, Tanamkan tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan, Tanamkan kebiasaan dan Anda akan menuai karakter, Tanamkan karakter dan Anda akan menuai keuntungan.
(Charles Reade)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- ♥ *Ibundaku tercinta yang menjadi motivator utamaku, Almarhum Ayahanda dan Kakandaku yang mewariskan semangat pantang menyerah,*
- ♥ *Adindaku yang selalu mendukung setiap langkahku*
- ♥ *Malaiikat kecilku (Bimo dan Kiky) inspirator terkuat bagiku, semoga karya kecil ibumu ini akan memberi semangat yang besar bagimu untuk berkarya yang lebih besar di kelak kemudian hari*
- ♥ *Seseorang yang kusayang yang slalu setia menjaga hatiku dalam susah dan senang, dalam tangis dan tawa*
- ♥ *Orang-orang tercinta yang senantiasa mengelilingiku*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Tesis dengan judul ***KAJIAN KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA*** dapat terselesaikan. Tesis ini disusun untuk melengkapi kewajiban dalam menempuh tugas belajar pada Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Pemilihan topik Tesis ini didasarkan atas keprihatinan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dewasa ini yang pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kota Surakarta yang kurang mengetahui arti pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, padahal PAUD adalah investasi yang sangat besar bagi keluarga dan bangsa. Melihat kondisi tersebut, Penulis mencoba mengkaji sejauhmana ketersediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat, dengan lokasi penelitian di Kecamatan Jebres Surakarta.

Kelancaran penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan terima kasih yang tulus kepada :

1. **Dr. Ir. Joesron Alie Syahbana, MSc** selaku Ketua Program Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Pascasarjana UNDIP Semarang.
2. **Ir. Nurini, MT.** dan **Wahidah Kurniawati, ST. MT.** selaku Mentor dan Co-Mentor yang dengan ketulusan dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penyusunan Tesis ini.
3. **Okto R. Manullang, ST.MT** dan **Ir. Mardwi Rahdriawan, MT** selaku Dosen Penguji 1 dan Penguji 2 yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan Tesis ini.
4. **Segenap Dosen Pengajar serta para Staf Administrasi Program MTPWK UNDIP** yang selalu mendukung dalam tersusunnya tesis ini.
5. **Kawan-kawan senasib seperjuangan**, atas segala dukungannya..
6. **Orang-orang tercinta terutama dua Anandaku** yang telah menjadi sumber inspirasi terbesar sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat tiada tara.

Penulis berharap semoga budi baik yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Dan semoga Tesis ini dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis dan administratif penulis sebagai mahasiswa program Beasiswa Depdiknas di UNDIP Semarang.

Sebagai manusia biasa, dalam penyusunan Tesis ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masukan guna perbaikan sangat penulis harapkan.

Surakarta, 2 September 2008.

Penulis,

Hesti Dwi Saptaningtyas

ABSTRAK

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak usia 0-6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal di Kota. Program PAUD Non Formal di Kota Surakarta khususnya di wilayah Kecamatan Jebres sebagai wilayah penelitian belum tersosialisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya anak usia dini (0-6 tahun) yang belum terlayani oleh program PAUD Non Formal, sehingga menimbulkan kesenjangan antara permintaan masyarakat dengan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal. Adapun permasalahan pokok yang menjadi penyebabnya adalah **kurang optimalnya sosialisasi, motivasi dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait dalam pengembangan program PAUD Non Formal** yang akhirnya muncul satu pertanyaan penelitian yaitu **bagaimana kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.**

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dengan sasaran Mengidentifikasi jumlah lembaga PAUD jalur non formal dan jumlah Anak Usia Dini di wilayah sasaran beserta jenis-jenis layanan pendidikan yang didapat, menganalisis kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung Program PAUD Non Formal, menganalisis jumlah permintaan dan potensi penyediaan lembaga PAUD Non Formal, menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal, dan merumuskan hasil kajian kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal.

Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan dengan metode **Analisis Deskriptif Kualitatif**, yaitu melalui : Teknik analisis Distribusi Frekuensi untuk mengetahui ketidakmerataan sebaran lembaga PAUD Non Formal di tiap-tiap Kelurahan, Teknik analisis Deskriptif Normatif untuk mengkaji lembaga PAUD Non Formal antara kondisi eksisting di Kecamatan Jebres dengan Standar Pelayanan Minimal dalam pendidikan sehingga didapat hasil bahwa kondisi eksisting lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres masih jauh dari ukuran standar minimal dan Teknik analisis Optimasi Fasilitas untuk mengetahui seberapa besar permintaan dan ketersediaan lembaga serta pemanfaatannya bagi para pengguna lembaga

Setelah melalui berbagai analisis dan observasi, maka didapat hasil penelitian bahwa **terjadi ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta** yang dikarenakan kurangnya sosialisasi dan kerjasama antara Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, dibuktikan dengan tidak meratanya sebaran lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres.. Sebanyak 97 % anak usia dini belum terlayani PAUD Non Formal .Belum optimalnya peran organisasi dibidang PAUD Non Formal dalam mendukung program PAUD. Dukungan Pemerintah Kota Surakarta dibidang PAUD Non Formal berupa dana, ketenagaan serta sarana dan prasarana belum dapat mengakomodir besarnya kebutuhan masyarakat akan PAUD. Ditambah lagi dengan kondisi fisik sarana dan prasarana di Lembaga PAUD Non Formal yang ada kurang memenuhi standar minimal pelayanan pendidikan anak usia dini.

Kata Kunci :PAUD Non Formal, kesesuaian, permintaan dan penyediaan

ABSTRACT

*Early Childhood Care Education (ECCE) is a strive construction to be aimed to the children have 0–6 years old which is conducted by means of the education excitement gift to assist spiritual and physical blooming and growing in order that the children own the readiness to enter the furthermore education. The execution of the Non Formal ECCE Program was in Surakarta. The Non Formal ECCE Program in Town of Surakarta especially in Subdistrict of Jebres area as the area of study not better socialization yet. It was proven still a lot of early age child have (0-6 years old) have not yet taken care of by Non Formal ECCE Program, so that generate asymmetrical among society request with the availability of Non Formal ECCE institute. The principal problem be came its cause was **less be optimal of socialization, motivation and responsibility together between Government, society and relevant institute in development to the Non Formal ECCE program** that finally emerge one question of research that was **how according to among the request and supplying the institute of Non Formal course ECCE at Subdistrict of Jebres, Town of Surakarta.***

This research objectives to inspect suitability among the request and supplying the Non Formal course ECCE institute at Subdistrict of Jebres Town of Surakarta with target to Identification sum up the non formal course ECCE and sum up the Early Age Children in target area along with the types of service education got, Analyze the governmental policy Town of Surakarta in support the Non Formal ECCE Program, Analyze the amount of request and potential supply the Non Formal ECCE institute, Analyze the according to among request and supplying the Non Formal ECCE institute, and Formulate the result of study the according to among the request and supplying the Non Formal ECCE institute.

To inspect that mentioned was conducted by Analysis the Descriptive Qualitative, that were by : Technique analyze the Frequency Distribution to understand the evenly spread of Non Formal ECCE institute in each chief of village, Technique analyze the Normative Descriptive to inspect the Non Formal ECCE institute between condition existing at Subdistrict of Jebres with Minimum Service Standard in education so that got the result that the condition existing the Non Formal ECCE institute at Subdistrict of Jebres a long way off from minimum standard dimension and Technique analyze the Optimal of Facility was to understand how wide request and the institute supply and also its exploiting to all institute consumer.

After passing various observation and analysis, hence obtained the result of research that there was happened the no according to between request and supplying the Non Formal ECCE institute at Subdistrict of Jebres, Town of Surakarta that causing of the minimal Socialization and cooperation among Government, Society and Private Sector, it's proved by not spread evenly the Non Formal ECCE institute at Subdistrict of Jebres. There were 97% of Early Age Children have not serviced yet by Non Formal ECCE. The have not optimal yet the role of organization in sector of Non Formal ECCE in the form of fund, power and also infrastructure and tools have not earned yet to coordinate the level of society requirement about ECCE. Added again by the physical condition of tools

and infrastructure in the existing Non Formal ECCE Institute was less of comply minimum standard Early Childhood Care Education service.

Keywords : *Non Formal ECCE, according to, request and supply*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Sasaran Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	12
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian	12
1.5.2 Ruang Lingkup Materi Penelitian	16
1.6 Kerangka Pemikiran	17
1.7 Pendekatan dan Metode Penelitian	21
1.7.1 Pendekatan Penelitian	21
1.7.2 Metode Penelitian	22
1.7.2.1 Kebutuhan Data	22
1.7.2.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	25
1.7.2.3 Teknik Penyajian Data	26
1.7.3 Teknik Analisis	26
1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	30
1.8 Sistematika Penulisan Tesis	36
BAB II TINJAUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM	
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	38
2.1 Konsep Pendidikan Nasional	38
2.2 Karakteristik Program Pendidikan Formal dan Non Formal	41
2.3 Kebijakan Tata Ruang dalam kaitan Pendidikan Anak	
Usia Dini	41
2.4 Hakekat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).....	46
2.5 Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	50

2.6	Bentuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	52
2.7	Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	55
2.8	Standar Kebutuhan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	57
	2.8.1 Standar menurut Depdiknas	58
	2.8.2 Standarisasi Prasarana PAUD menurut Pandangan Umum	59
2.9	Rangkuman Kajian Pustaka	62
2.10	Variabel Penelitian	64
BAB III	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL DALAM GAMBARAN WILAYAH KOTA SURAKARTA ...	65
3.1	Kondisi Fisik	65
3.2	Kondisi Non Fisik	68
	3.2.1 Kependudukan dan Tenaga Kerja.....	68
	3.2.2 Kependidikan	73
3.3	Arah Kebijakan dalam Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Surakarta	79
3.4	Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta	81
3.5	Rencana Strategis Kota Surakarta	83
3.6	Kebutuhan Prasarana dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta	84
BAB IV	ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA	87
4.1	Analisis Fisik dan Non Fisik sebagai sebuah Pengantar	87
4.2	Analisis Pola Sebaran Lembaga PAUD Non Formal	95
	4.2.1 Daya Dukung Masyarakat di bidang PAUD Non Formal	108
	4.2.2 Daya Dukung Pengelola PAUD Non Formal	119
	4.2.3 Daya Dukung Pemerintah Kota Surakarta di bidang PAUD Non Formal	127
4.3	Analisis Kebijakan Pemerintah di bidang PAUD Non Formal	132
	4.3.1 Analisis Kebijakan Pemerintah dalam bentuk Dokumen	133
	4.3.2 Analisis Peran Penentu Kebijakan di bidang PAUD Non Formal	138
4.4	Analisis Permintaan dan Ketersediaan Lembaga PAUD Non Formal	150
4.5	Hasil Temuan Studi	156

BAB V	P E N U T U P	160
	5.1 Kesimpulan	160
	5.2 Rekomendasi	162
DAFTAR PUSTAKA	167
LAMPIRAN	170

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Nasional merupakan upaya mewujudkan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diharapkan dapat membentuk manusia yang berkualitas yang memiliki kemampuan untuk menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pelaksanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan terlebih lagi dalam rangka menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini.

Usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan secara berkelanjutan mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Selain itu juga diselenggarakan pula pendidikan prasekolah atau dikenal juga dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

PAUD merupakan pendidikan yang sangat mendasar dan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Sesuai pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD telah ditempatkan sejajar dengan pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara yuridis formal, PAUD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan Sistem Pendidikan Nasional. Walaupun pendidikan prasekolah bukan merupakan kewajiban dan prasyarat untuk memasuki sekolah dasar. (Rahman, 2002:22).

Menurut hasil penelitian di bidang neurologi (Osborn, White dan Bloom) dalam Rahardjo (2006: 2), pada usia 4 tahun pertama separuh kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk. Artinya kalau pada usia tersebut otak anak tidak mendapatkan rangsangan yang maksimal, maka potensi otak anak tidak akan berkembang secara optimal. Sampai usia 8 tahun, 80 % kapasitas kecerdasan manusia sudah terbentuk, artinya kapasitas kecerdasan anak hanya bertambah 30 % setelah usia 4 tahun hingga mencapai usia 8 tahun. Selanjutnya kapasitas kecerdasan anak tersebut akan mencapai 100 % setelah berusia sekitar 18 tahun.

Secara umum, perkembangan dunia pendidikan di Negara Indonesia semakin berkembang pesat, termasuk PAUD. Sesuai dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi, kepercayaan masyarakat kita tidak hanya mempercayakan pendidikan dan perkembangan anak hanya melalui lembaga pendidikan saja, melainkan telah melibatkan berbagai profesi lain seperti psikolog, dokter anak, psikiater dan sebagainya. Sehingga pendidikan dan perkembangan jiwa anak semakin mendapatkan perhatian dan pelayanan. Namun kondisi tersebut baru berlaku bagi masyarakat dari kalangan yang mampu saja, sedangkan masyarakat dari golongan ekonomi lemah kurang tersentuh dengan program PAUD.

Banyak kendala menyertai perkembangan PAUD di Indonesia, terutama dalam hal pendanaan di sektor pendidikan PAUD. Tingkat Partisipasi Kasar dengan 20 % pada Pendidikan, Indonesia menduduki ranking yang rendah diantara Negara-negara yang berpenghasilan rendah. Pengeluaran biaya pendidikan di Indonesia sangat rendah yaitu 1,3 % GDP (*Gross Domestic*

Product/ Produk Domestik Kasar) pada tahun 2003. Artinya, dari semua pengeluaran, jumlah yang diperuntukkan untuk anak usia dini sangat kecil. Jumlah pengeluaran untuk pendidikan dan perawatan anak usia dini di Departemen Pendidikan Nasional tahun 2003 berjumlah Rp. 124,72 Milyar, yaitu hanya 0,55 % dari anggaran pendidikan. (Laporan Review Kebijakan :Januari 2005 :25).

Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa hampir 100 % lembaga PAUD yang ada di Indonesia dikelola oleh swasta dan orang tua murid yang menanggung beban biaya pendidikannya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya investasi pemerintah, sehingga anak-anak yang memanfaatkan pelayanan PAUD adalah cenderung berasal dari kelompok orang yang berpenghasilan tinggi. Menurut Proyek Review Kebijakan Anak Usia Dini UNESCO/ OECD (2005:27-29) disebutkan bahwa hasil temuan utama *High/ Scope Perryschool Study* setelah 40 tahun mengikuti, mengungkapkan bahwa keuntungan bersih yang tidak tersaingi adalah dari program anak usia dini. Anak-anak yang masuk program PAUD lebih siap untuk sekolah pada umur 5 tahun; lebih menjanjikan terhadap kerja sekolah pada umur 14 tahun; kemungkinan menunjukkan hasil sekolah yang lebih bagus pada umur 14 tahun; kemungkinan untuk tamat dari SMA lebih banyak; kemungkinan punya penghasilan lebih dari USS 20.000 pada umur 40 tahun dan kemungkinan tidak banyak yang dipenjara karena kriminal sampai umur 40 tahun.

Kondisi tersebut menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya penerapan PAUD bagi anak-anak usia dini di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri

bahwa masih banyak kendala yang menjadi penghambat penerapan program PAUD di negara ini. Salah satu diantara kendala tersebut yaitu rendahnya tingkat pendidikan para orang tua khususnya ibu sehingga mengakibatkan pula rendahnya kualitas asuhan terhadap anak usia dini. Selain itu, tinggi rendahnya tingkat ekonomi masyarakat akan mempengaruhi kualitas pelayanan dari lembaga/institusi PAUD. Hambatan berikutnya yaitu masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD baik dari jalur Formal (Taman Kanak-Kanak/ Radhautul Atfal) maupun dari jalur Non Formal (Kelompok Bermain/ Taman Penitipan Anak) dengan tingkat sebaran di suatu wilayah masih belum merata dibanding dengan sasaran PAUD itu sendiri. Hambatan terakhir yaitu masih rendahnya kualitas guru/pendidik PAUD yang belum memenuhi standar minimal yaitu untuk menjadi pendidik PAUD harus berijazah minimal setara dengan program D-2 PGTK (Pendidikan Guru Taman Kanak-Kanak). Semakin meningkat kualitas guru, maka akan meningkat pula kualitas proses pengajaran dan kualitas peserta didik.

Program PAUD yang dikenal di Kota Surakarta adalah PAUD dari jalur Formal yaitu yang berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), sedangkan PAUD dari jalur Non Formal belumlah banyak diketahui oleh masyarakat Kota Surakarta. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surakarta sangat menaruh perhatian terhadap kemajuan pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan bagi anak usia dini. Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, yaitu dalam 5 tahun terakhir selalu mensosialisasikan program-program PAUD kepada masyarakat terutama program PAUD jalur Non Formal yang berbentuk Kelompok Bermain, TPA dan POSPAUD.

Mengingat bahwa kecerdasan anak amatlah penting demi investasi masa depan dan kesadaran masyarakat akan hal tersebut masih perlu untuk selalu ditingkatkan, maka dirasa sangat mendesak untuk semakin menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan agar masyarakat khususnya di kalangan menengah ke bawah juga dapat berkesempatan untuk menikmatinya

Secara keseluruhan, program-program PAUD yang ada di Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

- a. **PAUD garapan Pendidikan Jalur Formal** : Taman Kanak-Kanak (TK); Raudlatul Athfal (RA); Bustanul Athfal (BA).
- b. **PAUD garapan Pendidikan Jalur Non Formal** : Taman Penitipan Anak (TPA) ; Kelompok Bermain (KB) ; Satuan PAUD Sejenis (SPS) yaitu dalam bentuk Kelompok Bermain yang terintegrasi dengan Posyandu Balita. Dapat disebut pula sebagai POSPAUD
- c. **PAUD garapan Pendidikan Jalur Informal** :

Yaitu pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan di dalam keluarga dan lingkungan

Melihat kenyataan pula bahwa lembaga PAUD yang sudah banyak dikenal dan diterima masyarakat (familiar) adalah PAUD yang digarap secara Formal yaitu yang berbentuk TK/RA/BA, sedangkan yang digarap secara Non Formal maupun Informal belum begitu menjadi perhatian masyarakat luas, untuk itulah penelitian ini dilakukan khusus pada pembahasan tentang PAUD jalur Non Formal agar lebih mendalami lagi mengenai keberadaan PAUD Non Formal dengan segala permasalahan yang menyertainya.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah melihat uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan program PAUD baik di jalur Formal, Non Formal maupun Informal sangatlah membutuhkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Adanya berbagai kendala dan hambatan dalam penyelenggaraannya adalah merupakan suatu tantangan sekaligus tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan dan hambatan yang ada dalam penyelenggaraan program PAUD, maka perlu dirumuskan menjadi suatu permasalahan inti yang akan menjadi bahan atau dasar diadakannya penelitian ini. Namun untuk membatasi permasalahan yang ada dan dengan pertimbangan efisiensi, maka penulis hanya akan mengupas mengenai lembaga PAUD khusus di jalur Non Formal saja dengan lokasi penelitian di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Dari uraian di atas didapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres mengakibatkan kurang meratanya pelayanan PAUD pada wilayah yang ada menjadi tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah anak usia dini. Hal ini dapat dicermati dari data yang penulis peroleh yaitu di Wilayah Kecamatan Jebres terdapat 11 Kelurahan dengan jumlah anak usia 0 – 6 tahun sebesar 21.949 anak, dimana yang telah terlayani dalam program PAUD Non Formal baru sebesar 190 anak (terlayani lewat KB), 33 anak (terlayani lewat TPA) dan 30 anak (terlayani lewat POSPAUD)
2. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pentingnya PAUD dan rendahnya mutu guru serta minimnya sarana prasarana (berupa Alat

Permainan Edukatif / APE) menjadi penyebab kurangnya motivasi untuk mengikutsertakan anaknya dalam program PAUD jalur Non Formal.

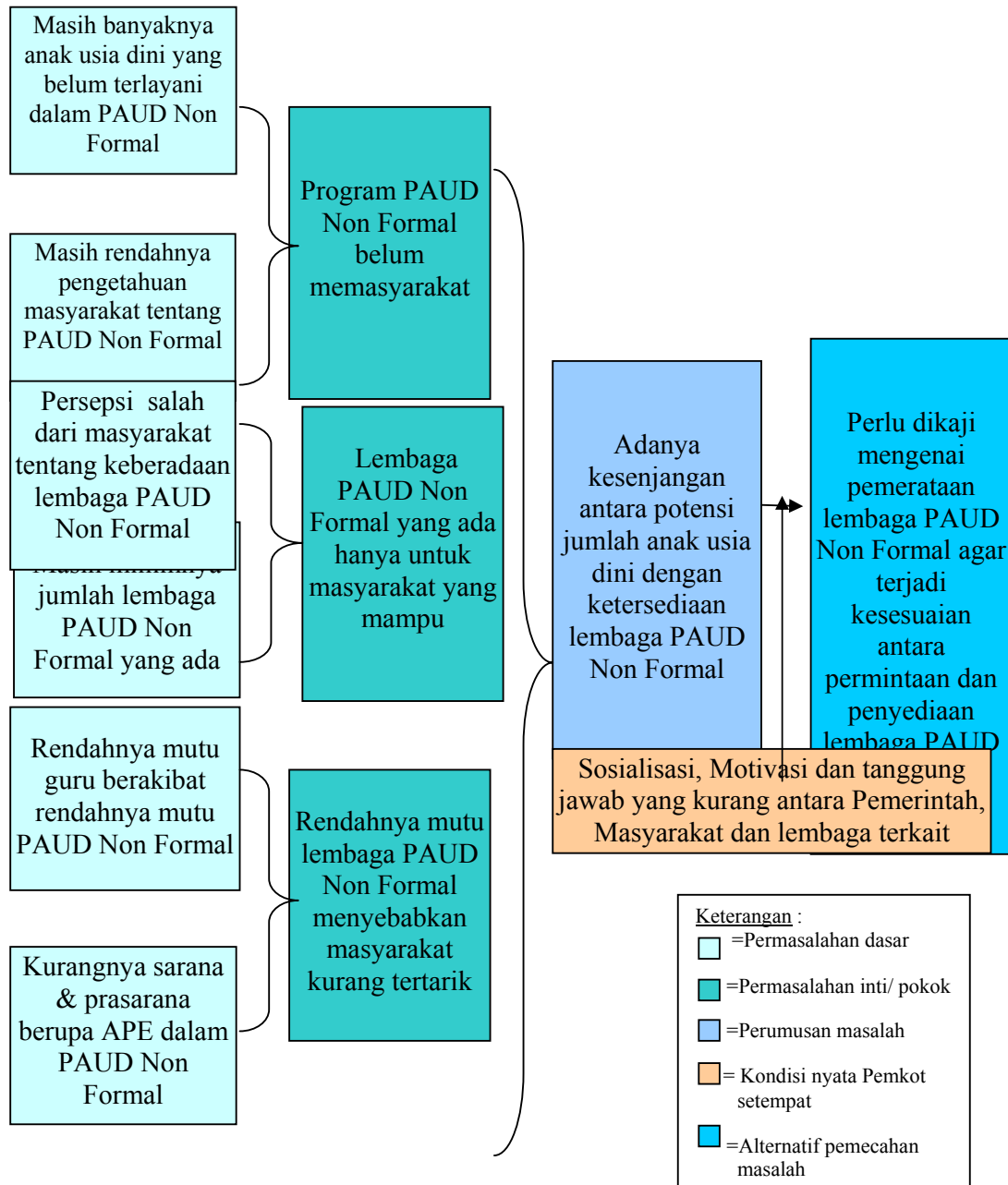
3. Masih banyaknya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa PAUD Non Formal adalah diperuntukkan masyarakat yang mampu saja

Berbagai permasalahan di atas pada dasarnya disebabkan karena kurang optimalnya sosialisasi, motivasi dan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan lembaga terkait dalam pengembangan program PAUD Non Formal. Kondisi ini membawa kita untuk mengkaji lebih mendalam sebenarnya apa yang menyebabkan semua permasalahan tersebut timbul, untuk itu diperlukan sebuah kajian mengenai kesesuaian antara permintaan dan penyediaan Lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres.

Penelitian ini membatasi kajian kesesuaian dalam arti bahwa keberadaan lembaga PAUD Non Formal diharapkan dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Kesesuaian kuantitas dimaksudkan bahwa bila dibandingkan dengan jumlah anak usia dini (0-6 tahun) yang terdapat di Kecamatan Jebres sangat tidak sebanding dengan jumlah lembaga PAUD Non Formal yang ada, sehingga masih banyak jumlah anak yang belum terlayani dalam PAUD Non Formal, apalagi sebaran lembaga tersebut tidak merata di tiap-tiap wilayah Kelurahan. Dalam penelitian ini akan dianalisis pola sebaran lembaga PAUD yang tidak merata tersebut bila dibandingkan dengan potensi anak usia dini yang harus terlayani, sehingga dapat diketahui jumlah lembaga PAUD Non Formal yang dibutuhkan masyarakat dengan teknik analisis tertentu beserta peraturan standar pelayanan pendidikan sebagai tolok ukurnya.

Kesesuaian dalam hal kualitas memang sangat detail apabila dibahas lebih rinci sampai masuk ke dalam kurikulum pembelajaran, karena berbicara mengenai kualitas sangat menyentuh berbagai unsur, sehingga untuk membatasinya penelitian ini hanya mengkaji kualitas dari sudut pandang masyarakat umum, masyarakat pengguna (orang tua murid) dan pengelola PAUD Non Formal serta kualitas ditinjau dari Standar Pelayanan Minimal yang mengatur tentang 10 indikator standar pelayanan pendidikan khusus di bidang PAUD Non Formal.

Apabila digambarkan sebagai suatu kerangka permasalahan, maka dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :



Sumber : Penelitian,2008

GAMBAR 1.1
KERANGKA PERMASALAHAN

Dari rumusan masalah dan kerangka permasalahan di atas, maka akan muncul pertanyaan penelitian (*Research Questions*) yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dimana dalam mengupasnya membutuhkan analisis lebih lanjut. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah : “ *Bagaimana kesesuaian*

antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta ? “.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Sebuah penelitian harus mempunyai arah dalam pelaksanaannya untuk meraih target apa yang akan dan ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan dimaksud, harus melalui tahap-tahap yang harus dilakukan yang berupa sasaran penelitian.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

1.3.2 Sasaran Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran yang harus dicapai yaitu :

- Mengidentifikasi jumlah lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta
- Mengidentifikasi jumlah Anak Usia Dini di Kecamatan Jebres Kota Surakarta beserta jenis-jenis layanan pendidikan yang didapat
- Menganalisis jumlah permintaan dan potensi penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

- Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung Program PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta
- Menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta
- Merumuskan hasil kajian kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para penentu kebijakan maupun segenap unsur masyarakat baik dari kalangan Lembaga Sosial Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi maupun Swasta yang mempunyai kepedulian terhadap PAUD khususnya jalur Pendidikan Non Formal agar dapat bekerjasama memperjuangkan hak anak di bidang pendidikan khususnya bagi anak usia dini sehingga anak-anak akan menjadi aset dan investasi yang berharga di masa yang akan datang.

Sedangkan bagi Pembangunan Wilayah dan Kota, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang berarti bahwa dalam hal perencanaan dan penataan wilayah dan kota sebaiknya juga memikirkan ruang lingkup sarana dan prasarana untuk lembaga PAUD khususnya PAUD Non Formal agar lebih terstruktur dan terprogram dalam hal pembangunan infrastruktur serta persebaran letak lembaganya, sehingga dapat menampung anak-anak usia dini secara merata

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menurut lingkup wilayah penelitian dan lingkup materi bahasan sebagai berikut:

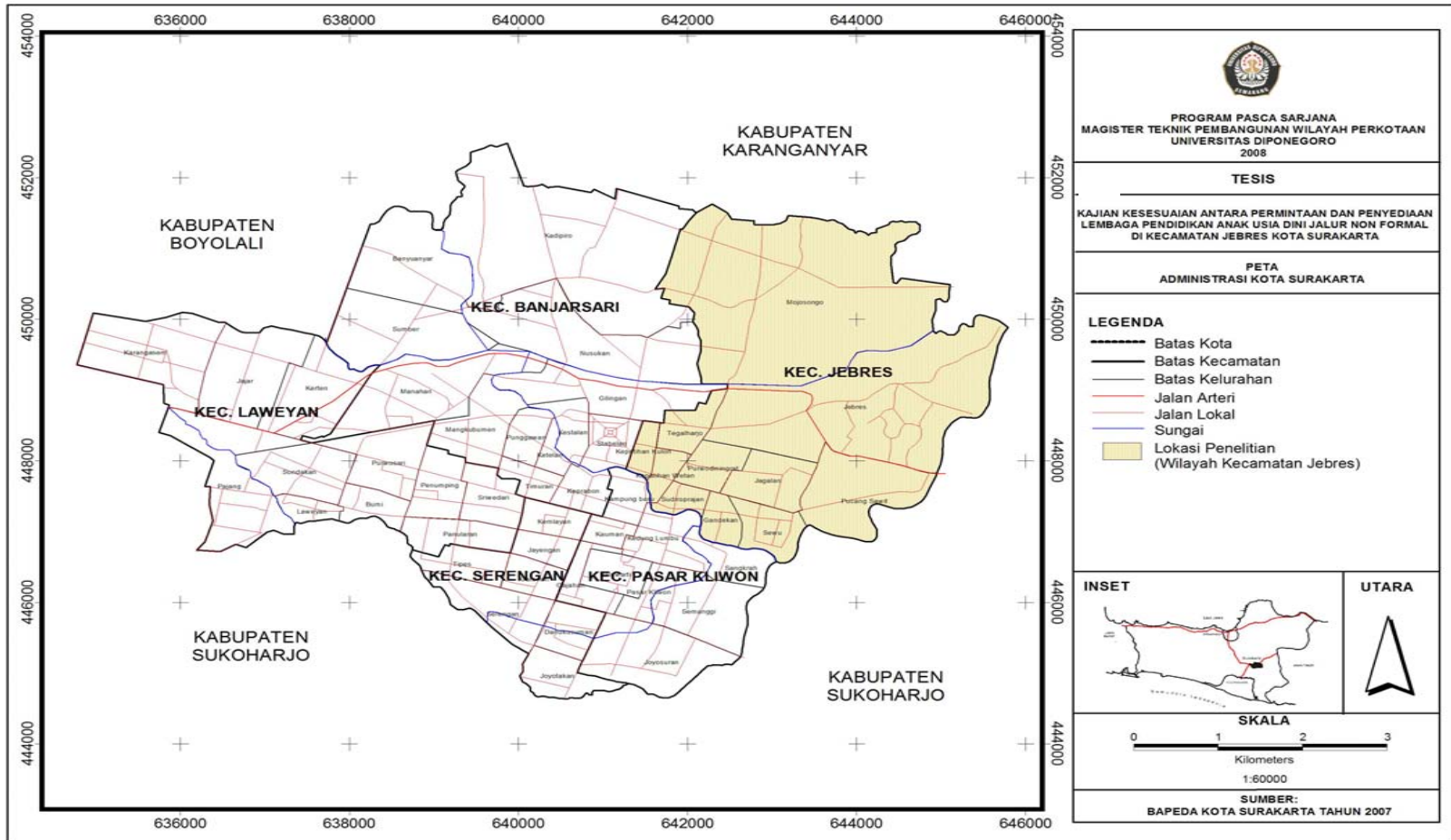
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini berfungsi sebagai pemberi batasan pelaksanaan penelitian sehingga dalam pelaksanaannya dapat berlangsung secara spesifik, terarah dan realistis untuk kepentingan dimasa yang akan datang.

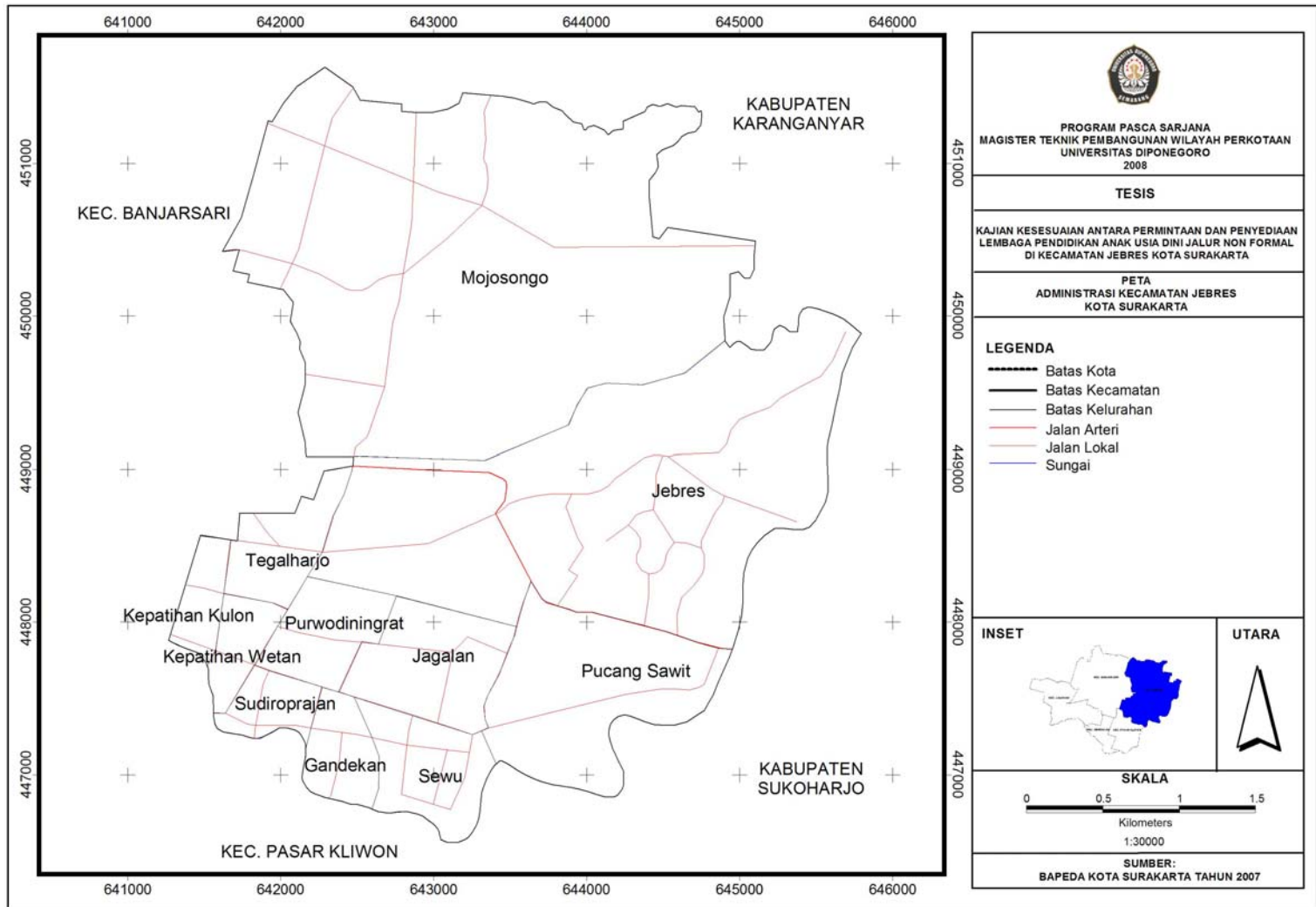
Dalam penelitian ini ruang lingkup wilayah makronya adalah Kota Surakarta, dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program PAUD jalur Non Formal dalam konteks universal, sedangkan ruang lingkup wilayah mikronya adalah wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta, dengan pertimbangan luas wilayah, potensi wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan jumlah lembaga PAUD Non Formal yang ada. Kecamatan Jebres merupakan wilayah kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan Banjarsari yaitu seluas 12,58 Km² (BAPEDA, *Surakarta Dalam Angka 2005*). Menurut Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Th 1993 tentang RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993– 2013, Kota Surakarta memiliki 4 Wilayah Pembangunan (WP) dan terbagi dalam 10 Sub Wilayah Pembangunan. (SWP) dimana setiap Wilayah Pembangunan mempunyai prioritas pembangunan sendiri-sendiri, seperti halnya di wilayah Kecamatan Jebres termasuk dalam WP Bagian Timur dengan prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Selain itu, Wilayah Kecamatan Jebres bagian Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten lain yaitu Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Hal ini berdampak positif dengan adanya arus

perdagangan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Disamping itu di wilayah Kecamatan Jebres terdapat 2 buah Perguruan Tinggi Negeri yaitu UNS dan ISI (dahulu STSI) serta beberapa Perguruan Tinggi Swasta, banyaknya Lembaga Kursus (LPK) dari berbagai jurusan dan program pendidikan adalah merupakan salah satu sebab mengapa wilayah ini diprioritaskan menjadi wilayah pembangunan di bidang Pendidikan.

Untuk mengenal letak wilayah Kota Surakarta maupun wilayah kecamatan Jebres, di bawah ini ditampilkan gambar Peta Administrasi Kota Surakarta pada gambar 1.2 dan Peta Administrasi Kecamatan Jebres pada gambar 1.3 berikut ini :



GAMBAR 1.2
PETA ADMINISTRASI KOTA SURAKARTA



GAMBAR 1.3
PETA ADMINISTRASI KECAMATAN JEBRES

1.5.2 Ruang Lingkup Materi Penelitian

Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada penelitian ini mencakup materi mengenai :

- ❖ Mengidentifikasi jumlah lembaga PAUD jalur Non Formal dan jumlah Anak Usia Dini di Kecamatan Jebres Kota Surakarta beserta jenis-jenis layanan pendidikan yang didapat
 - Jumlah lembaga PAUD Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres yang terdiri dari **Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis** (PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu/ POSPAUD)
 - Jumlah Anak Usia Dini (0-6 tahun) di wilayah Kecamatan Jebres yang terlayani dalam 3 jenis PAUD Non Formal (KB,TPA dan SPS)
- ❖ Menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung Program PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta
 - Mengkaji Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) bila dihubungkan dengan Peraturan Gubernur Jateng tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengenai PAUD Non Formal dan Kebijakan yang diberlakukan di Pemerintah Kota Surakarta
- ❖ Menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta
 - Mengkaji jumlah permintaan dan potensi penyediaan lembaga PAUD Non Formal dengan membandingkan antara semua jumlah anak usia dini (0-6

tahun) di wilayah Kecamatan Jebres dengan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal yang ada

- ❖ Merumuskan hasil kajian kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah, sasaran dan tujuan penelitian ini, maka dapat ditarik suatu kerangka berpikir tentang topik bahasan dalam penelitian ini.

Dalam konteks bahasan sasaran wilayah yaitu di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat diungkapkan bahwa Kecamatan Jebres terdiri dari 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk 139.292 jiwa dengan luas wilayah 12,58 m² dimana diantara jumlah tersebut terdapat penduduk berusia 0 – 6 tahun sebanyak 21.949 jiwa. Usia ini merupakan anak usia dini yang sebagian besar belum terlayani oleh program PAUD terutama dalam jalur Pendidikan Non Formal.

Di Kecamatan Jebres baru terdapat 17 lembaga PAUD Non Formal, yaitu terdiri dari : 13 buah Kelompok Bermain, 3 buah TPA dan 1 POS PAUD. Sebagai gambaran sekilas tentang pengertian PAUD dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut.

“Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. (Wikipedia Indonesia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan>).

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Menurut Pasal 28 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bentuk satuan pendidikan anak usia dini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

- Jalur Pendidikan Formal

Terdiri atas Taman Kanak-Kanak dan Raudlatul Athfal (RA) yang dapat diikuti anak usia 5 tahun ke atas. Termasuk disini adalah Bustanul Athfal (BA)

- Jalur Pendidikan Non Formal

Terdiri atas Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Kelompok Bermain dapat diikuti anak usia 2 tahun ke atas, sedangkan TPA dan SPS diikuti anak sejak lahir atau usia tiga bulan

- Jalur Pendidikan Informal

Terdiri atas pendidikan yang diselenggarakan di keluarga dan di lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan, meskipun mereka tidak masuk ke lembaga pendidikan anak usia dini, baik formal maupun non formal.

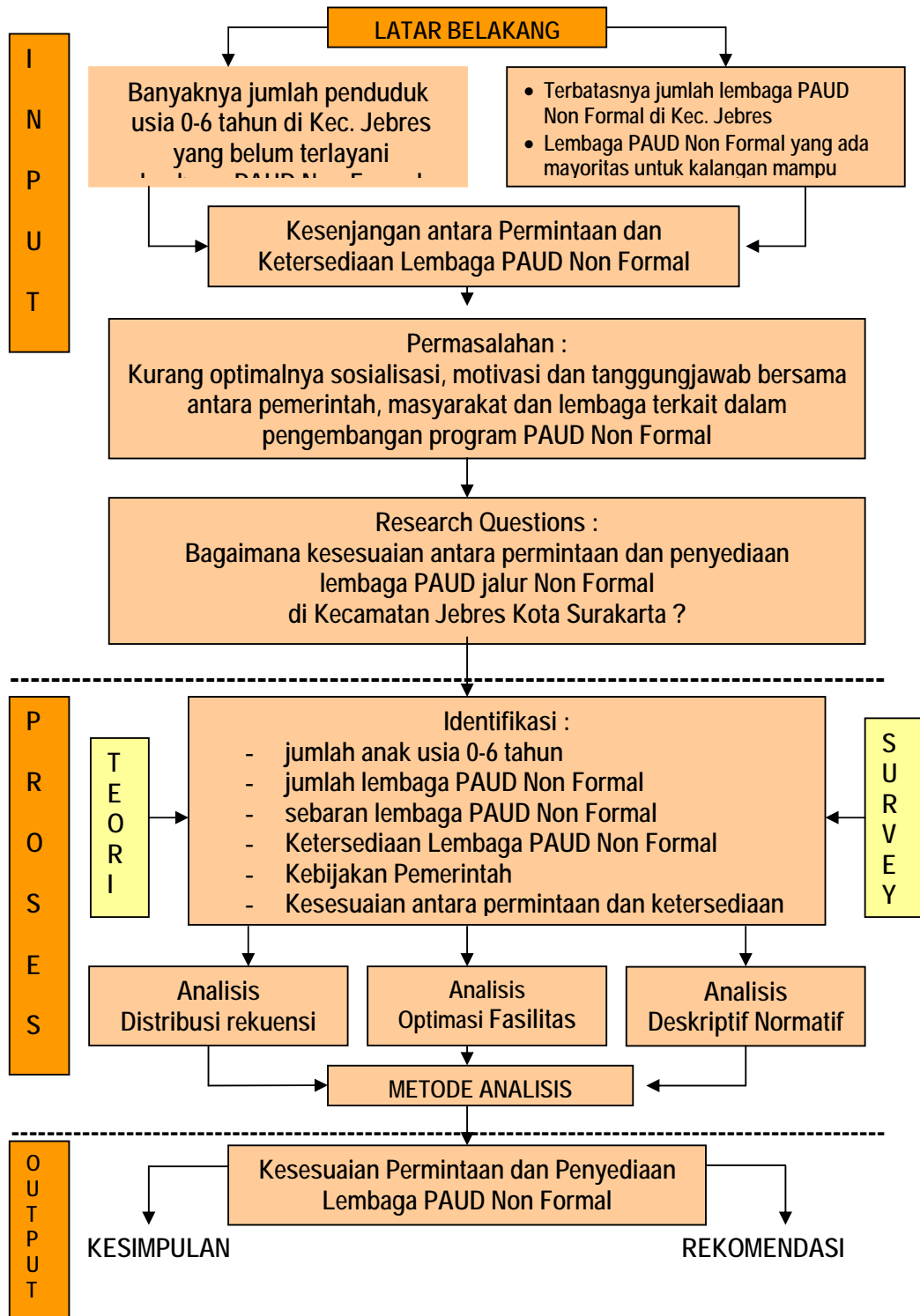
Perbandingan jumlah anak usia dini dengan ketersediaan lembaga PAUD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olahraga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa Indikator keberhasilan suatu program PAUD Non Formal di suatu daerah yaitu apabila :

- 65 % anak dalam kelompok usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) atau yang sederajat;
- 50 % jumlah anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD jalur Formal mengikuti program PAUD jalur Non Formal;
- 50 % guru (tutor) dan penyelenggara PAUD jalur Non Formal telah mengikuti pelatihan bidang PAUD.

Dalam Renstra Depdiknas disebutkan juga bahwa pada tahun 2009 yang akan datang ditargetkan bahwa di setiap Desa/ Kelurahan harus ada minimal 1 lembaga PAUD dengan rasio per 1 kelas dengan 20 anak didik minimal diasuh oleh 2 orang tenaga pendidik yang telah memenuhi syarat dan kriteria tertentu.

Kerangka Pemikiran ini akan lebih jelas apabila dituangkan dalam wujud gambar atau bagan seperti berikut ini :



Sumber : Penelitian,2008

GAMBAR 1.4
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7 Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian selalu dibutuhkan suatu pendekatan dan metode penelitian yang tepat agar dapat menghasilkan sebuah analisis yang membuahkan satu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Untuk mengkaji lebih dalam tentang kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menggali informasi mengenai kondisi wilayah penelitian baik secara fisik maupun non fisik, yang diperlukan untuk mendapatkan deskripsi yang menyeluruh mengenai kondisi, potensi dan permasalahan termasuk melakukan pendekatan aspiratif, mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat akan PAUD Non Formal, hingga metode yang dipakai dalam menjaring aspirasi masyarakat tersebut. Dalam hal ini penulis memakai metode kuesioner dan wawancara terarah yang berkaitan dengan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. Melalui kajian pustaka dalam bentuk literatur untuk mendapatkan data sekunder sehingga secara teori dapat diketahui secara lebih mendalam tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Termasuk kajian mengenai kebijakan-kebijakan Pemkot Surakarta di bidang PAUD Non Formal.
- c. Kajian deskriptif yang dilakukan melalui alat analisis yang tepat untuk masing-masing aspek

1.7.2 Metode Penelitian

Dalam melakukan analisis kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilakukan dengan menggunakan metode Diskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan. "Tujuan dari penelitian diskriptif adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki" (Nazir, 2003 : 63). Dalam penelitian diskriptif tidak hanya menerangkan fenomena-fenomena dan hubungannya, tetapi juga membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. "Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan" (Erna Widodo, 2000:15).

1.7.2.1 Kebutuhan Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan untuk menganalisis meliputi:

- a. *Data primer* yaitu jenis data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan dan berasal dari narasumber yang diperlukan mulai unsur Kelompok Bermain yaitu para Pengelola Kelompok Bermain, Tenaga Pendidik, Orang

Tua Murid, masyarakat yang mempunyai anak usia dini dan unsur Pemkot Surakarta yaitu dari Dinas Dikpora Kota Surakarta, dan BAPEDA.

- b. *Data sekunder*; jenis data yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan ke beberapa instansi yang berkaitan dengan kepentingan penelitian ini. Data sekunder bisa berupa makalah, jurnal, hasil penelitian yang pernah dilakukan pihak lain. Data sekunder ini dapat juga berupa publikasi maupun laporan-laporan dari instansi pemerintah atau lembaga pemerintah seperti: Dinas Dikpora, BAPEDA, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta.

Untuk lebih jelasnya, mengenai kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL I.1
KEBUTUHAN DATA

Sasaran Penelitian	Data yang diperlukan	Kegunaan Data	Jenis Data	Sumber Data	Cara Memperoleh
Mengidentifikasi jumlah lembaga PAUD jalur Non Formal	Jumlah lembaga PAUD Non formal dan kondisi eksisting yang ada (sarana & prasarana)	Untuk mengetahui jumlah lembaga PAUD Non formal yang masih dibutuhkan	Data Sekunder	Dinas Dikpora Kota Surakarta	Menelaah dokumen dan wawancara
Mengidentifikasi jumlah anak usia dini di wilayah sasaran beserta jenis-jenis layanan pendidikan yang didapat	Jumlah anak usia dini dan layanan PAUD yang didapat	Untuk mengetahui jumlah anak yang belum terlayani dalam PAUD	Data Sekunder	Dinas Dikpora Kota Surakarta	Menelaah dokumen dan wawancara
Menganalisis jumlah permintaan dan potensi penyedia lembaga PAUD Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah penduduk, jenis mata pencaharian dan pendapatan per kapita ➤ Jumlah Kelurahan se Kec. Jebres Surakarta 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui seberapa besar potensi masyarakat dalam mendukung program PAUD • Untuk mengetahui sebaran lokasi lembaga PAUD Non Formal di Kelurahan 	Data Sekunder	BAPEDA, Kantor Kec. Jebres	Menelaah dokumen dan wawancara
Menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penyedia lembaga PAUD	Permasalahan yang menjadi penghambat	Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat program PAUD Non Formal	Data Primer dan Sekunder	BAPEDA, Kantor Kec. Jebres dan masyarakat	Menelaah dokumen dan wawancara
Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Arah kebijakan Pemkot Surakarta di bidang PAUD ➤ Upaya Sosialisasi PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui sejauhmana perhatian Pemkot Surakarta terhadap PAUD 	Data Primer dan Sekunder	BAPEDA, Dinas Dikpora, Kantor Kec. Jebres dan responden	Menelaah dokumen, wawancara dan kuesioner

Sumber : Penelitian 2008

1.7.2.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan dalam dua cara yakni pengumpulan data primer dan sekunder yang akan digunakan dalam analisis penelitian. Data-data tersebut didapatkan baik dari instansi-instansi yang terkait maupun observasi langsung dan kegiatan lapangan yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada tahap ini, adalah :

1. *Survei primer*, merupakan suatu proses pengambilan data secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi untuk mengetahui fakta atau kondisi aktual di wilayah studi. Survei primer tersebut dilakukan dengan :

- Observasi, berupa pengamatan yang langsung dilakukan di wilayah studi. Pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui fenomena visual yang ada meliputi kondisi fisik seperti kondisi lahan dan prasarana lainnya, sedangkan kondisi non fisik seperti sosial budaya masyarakat, pola aktivitas dan interaksi yang terjadi. Perekaman data ini dilakukan dengan pemotretan situasi, penggambaran situasi dan deskripsi situasi.
- Wawancara (interview), yakni berfungsi untuk melengkapi data di atas dengan melakukan tanya jawab kepada sumber-sumber yang dapat memberikan informasi lebih dalam mengenai karakteristik kawasan studi serta potensi dan permasalahan yang dihadapi. Responden diambil baik dari sektor masyarakat yakni pihak pengelola program PAUD Non Formal dan pihak Pemerintah.

2. *Survei sekunder*, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang sekiranya diperlukan dari instansi-instansi yang terkait dengan proses

perencanaan, perancangan dan manajemen. Selain itu juga melalui perencanaan program atau kajian ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.

1.7.2.3 Teknik Penyajian Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan maka tahapan selanjutnya adalah mengelompokkan data yang bertujuan untuk mensistematiskan bermacam-macam data yang telah diperoleh sehingga mempermudah dalam tahapan selanjutnya. Data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan angket dan kuesioner, wawancara dan interview serta observasi sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada dalam bentuk laporan instansi, hasil penelitian, publikasi, kajian bahan pustaka dll.

Berdasarkan data yang terkumpul, untuk keperluan penelitian ini selanjutnya disusun, disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga memudahkan untuk dibaca. Setelah diolah, data disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun bentuk narasi yang mampu memberikan informasi yang mudah dipahami.

1.7.3 Teknik Analisis

Dalam teknik analisis terdapat metode dan teknik analisis yaitu merupakan alat penelitian yang akan dilakukan dengan cara melihat aspek-aspek yang berhubungan dengan supply dan demand dalam PAUD Non Formal.

1. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara untuk mengetahui aspek-aspek kualitatif (*non numeric*) dari permasalahan yang dialami. Metode ini digunakan untuk menganalisis sistem yang menyangkut manusia, sosial budaya masyarakat, aktivitas serta berbagai hubungan yang ada dalam sistem-sistem tersebut (Sudharto,1996). Metode ini digunakan karena bersifat lebih praktis dan dapat digunakan dalam berbagai situasi.

Menurut Danim (1997:187), salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Untuk itulah penelitian ini menggunakan Teknik **Analisis Deskriptif Kuantitatif Kualitatif**. Analisis Deskriptif Kualitatif yaitu analisis dengan memberikan gambaran, pengertian, dan penjelasan terhadap kondisi kawasan perencanaan. Terdapat 2 model dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu Model yang bersifat filliografis/ kepustakaan dan model yang bersifat lapangan (Widodo&Mukhtar,2000:123). Sedangkan Analisis Deskriptif Kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan statistik sederhana dalam bentuk distribusi frekuensi agar mendapatkan prosentase dari masing-masing katagori. Untuk mendapatkan prosentase dalam analisis data deskriptif ini, meski kelihatannya sederhana tetapi mempunyai kemampuan yang besar untuk mengungkapkan data-data kuantita penelitian yang diteliti. (Mukhtar, 2000:131) Keduanya dapat diterapkan dan saling mendukung, karena penelitian

tidak bisa hanya mengandalkan teori-teori saja melainkan harus meninjau obyek di lapangan. Sehingga selain menggunakan paparan, uraian dan gambaran, dapat pula menggunakan tolok ukur sebagai pengukuran, prosentase dan predikat untuk memberikan makna terhadap sebuah prestasi atau level tertentu dari subyek penelitian. Hal ini berarti apabila datanya telah terkumpul, kemudian data diklasifikasikan menjadi 2 kelompok data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Terhadap data yang bersifat kualitatif, yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya data yang bersifat kuantitatif, yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses dengan dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh persentase.

2. Teknik Analisis

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. (Nazir, 2003: 346). Analisis data akan menghasilkan suatu kesimpulan yang tepat apabila menggunakan teknik analisis yang tepat pula. Dalam penelitian ini, untuk mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta digunakan beberapa teknik analisis sebagai berikut :

a. Teknik Analisis Distribusi Frekuensi

Teknik analisis ini digunakan untuk mengkaji pola sebaran lembaga PAUD Non Formal. Adapun faktor-faktor atau indikator yang mempengaruhi pola

sebaran dimaksud yang didapat dari hasil wawancara dan observasi langsung merupakan data yang mudah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan masalah yang dikemukakan, dan untuk mempermudah dalam pengkajian dapat diringkas dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Frekuensi adalah jumlah pemunculan, jika data mentah diatur dalam kelas dengan frekuensinya, tabel tersebut dinamakan tabel distribusi frekuensi. (Nazir, 2003: 379-380)

Distribusi frekuensi adalah suatu penyajian dalam bentuk tabel yang berisi data yang telah digolong-golongkan ke dalam kelas-kelas menurut keurutan tingkatannya beserta jumlah individu yang termasuk dalam masing-masing kelas (Hadi, 2001:225). Dari analisis ini akan diketahui pula seberapa besar prosentase daya dukung masyarakat yang mempunyai anak usia dini serta para pengelola PAUD terhadap keberadaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta.

b. Analisis Optimasi Fasilitas

Teknik analisis ini digunakan untuk mengkaji keoptimalan sebuah fasilitas lembaga yaitu dengan cara mengkaji jumlah permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta, sehingga akan diketahui sejauhmana pemanfaatan lembaga PAUD Non Formal bagi pengguna lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta. Teknik ini mengacu pada Model Interaksi Guna Lahan dan Transportasi, dimana Model Optimasi merupakan model yang memetakan pola guna lahan untuk mengoptimalkan utilitas dari pelaku perjalanan atau mengoptimasikan efisiensi Kota (Bureau of Transport Economics, 1998). Pada model Optimasi

ini didasarkan pada minimasi biaya perjalanan dan biaya pembangunan prasarana atau biaya-biaya sosial yang lain.

c. Analisis Deskriptif Normatif

Teknik analisis ini digunakan untuk mengkaji norma-norma atau standar-standar yang mengatur mengenai Pendidikan terutama di dalam hal PAUD baik di tingkat Nasional sampai dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena atau variabel. (Widodo&Mukhtar,2000:90). Penggunaan teknik analisis ini diharapkan akan dapat mengetahui perbandingan antara kondisi eksisting PAUD Non Formal dengan Standar Pendidikan yang telah baku diberlakukan dalam dunia pendidikan, baik perbandingan secara kualitatif maupun kuantitasnya, sehingga untuk selanjutnya dapat diketahui seberapa besar prosentase keberhasilan program PAUD Non Formal di Kota Surakarta.

1.7.4 Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Singarimbun (1995:151), metode penarikan sampel yang ideal mempunyai sifat-sifat ;

- a. Dapat menghasilkan gambaran yang dapat dipercaya untuk seluruh populasi
- b. Sederhana sehingga mudah untuk digunakan
- c. Dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya.

- d. Dapat menentukan tingkat ketepatan dari hasil penelitian dengan menentukan simpangan baku dari taksiran yang diperoleh.

Mengingat terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian digunakan sampel. Sebuah sampel adalah bagian dari populasi. Survei sampel adalah suatu prosedur di mana hanya sebagian dan populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari populasi (Nazir, 2003:271)

Jumlah Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Singarimbun, 1995:152). Populasi merupakan keseluruhan penduduk atau individu yang dimaksudkan untuk diselidiki. Pendapat lain mengatakan bahwa populasi adalah kumpulan dari ukuran-ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat inferensi. Dalam hal ini populasi berkenaan dengan data bukan pada orangnya atau bendanya (Nazir, 2003:327). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah Jumlah penduduk di Kecamatan Jebres Kota Surakarta tahun 2005 yang dikategorikan dewasa (usia 15 tahun ke atas) yaitu sebanyak 74.156 orang.

Ukuran Sampel

Mengingat terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka untuk mempermudah pelaksanaan penelitian digunakan sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2002).

Sampel yang akan diambil dalam penelitian harus mewakili populasi, dimana semakin heterogen kondisi populasi maka semakin besar sampel yang

dibutuhkan. Metode yang dipakai adalah metode sampel sederhana (*simple random sampling*). Adapun sampel yang digunakan sebagai responden diperhitungkan dengan rumus Slovin (dalam Sevilla, 1993: 163) yaitu :

$$n = N / (Nd^2 + 1)$$

dimana : n = Ukuran sampel, N = Ukuran Populasi, d = Nilai kritis

Apabila diterapkan dalam rumus tersebut di atas, maka didapat jumlah responden yang diperlukan adalah :

$$\begin{aligned} n &= 74.156 / 74.156(0,1)^2 + 1 \\ &= 99,87 \approx 100 \text{ orang responden} \end{aligned}$$

Jumlah responden tersebut terbagi dalam 11 Kelurahan, sehingga masing-masing Kelurahan terwakili 8 – 10 orang responden yang terbagi dalam unsur masyarakat umum dan unsur orang tua murid PAUD Non Formal. Responden dari unsur pengelola PAUD Non Formal, karena jumlahnya relatif sedikit yaitu 17 orang dari 13 pengelola Kelompok Bermain, 3 pengelola TPA dan 1 pengelola POSPAUD, maka tidak dilakukan sampling tetapi dikenakan kepada seluruh responden, demikian juga kepada pihak Pemerintah Kota Surakarta yang mengetahui tentang kebijakan Kota Surakarta di bidang PAUD yang meliputi Pejabat di jajaran Pemkot Kota Surakarta yang berkompeten di BAPEDA (Kepala BAPEDA dan Kasubbid Sosial dan Budaya). Dinas DIKPORA Kota Surakarta (Kasi Perencanaan Subdin Bina Program, Kasubdin Dikmas Pemuda dan Olahraga /PMPO dan Kasi Pendidikan dan Pengetahuan Dasar Subdin PMPO).

TABEL I.2
DAFTAR LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

NO.	NAMA PAUD	ALAMAT
1	KB "I N D A H"	Kepatihan Kulon Rt 7/ I Kel. Kepatihan Kulon
2	KB "SMART PRESCHOOL"	Jl. AR Hakim 80 Kel. Kepatihan Kulon
3	KB "B E T A"	Jl. Arifin 54 Kel. Kepatihan Kulon
4	KB "PUTRA BANGSA"	Kepatihan Kulon 02/Vi Kel. Kepatihan Kulon
5	KB " WARGA"	Jl. Ir. Juanda 72 Kel. Sudiroprajan
6	KB "HARAPAN BANGSA"	Sorogenen Rt 05/V Kel. Jagalan
7	KB "MESEN"	Jl. Surya No 67 Kel. Purwodiningratan
8	KB "PELANGI CERIA"	Jl. Guruh 26 Ngasinan Kel. Jebres
9	KB "PERMATA HATI"	Jl. Petoran Rt 03/ IX Kel. Jebres
10	KB " LAILY "	Guwosari 22 RW 30 Kel. Jebres
11	KB "BINA WIDYA"	Jl. Cokroaminoto 18 Kel. Jebres
12	KB "BUDI KARYA"	Jl. Malabar Raya 8 Kel. Mojosongo
13	KB "SRI JUWITA HANUM"	Jl. Let Jend Sutoyo 133 Kel. Mojosongo
14	TPA " Y P A B "	Jl. Purwoprajan 20 Kel. Jebres
15	TPA " PERMATA HATI "	Jl. Kol. Sutarto 50 Kel. Jebres
16	TPA " PONDOK ASI "	Kompleks Kampus UNS Kel. Jebres
17	POSPAUD "PUSPARINI"	Gulon Rt 05/ 20 Kel. Jebres

Sumber : Penelitian, 2008

Sedangkan penentuan besar kecilnya jumlah responden dari unsur masyarakat umum dihitung dari rentang jumlah penduduk masing-masing Kelurahan yang diatur asumsi sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk < 10.000 orang = 4 responden
2. Jumlah penduduk 10.001 s/d 30.000 orang = 8 responden
3. Jumlah penduduk > 30.000 orang = 10-11 responden

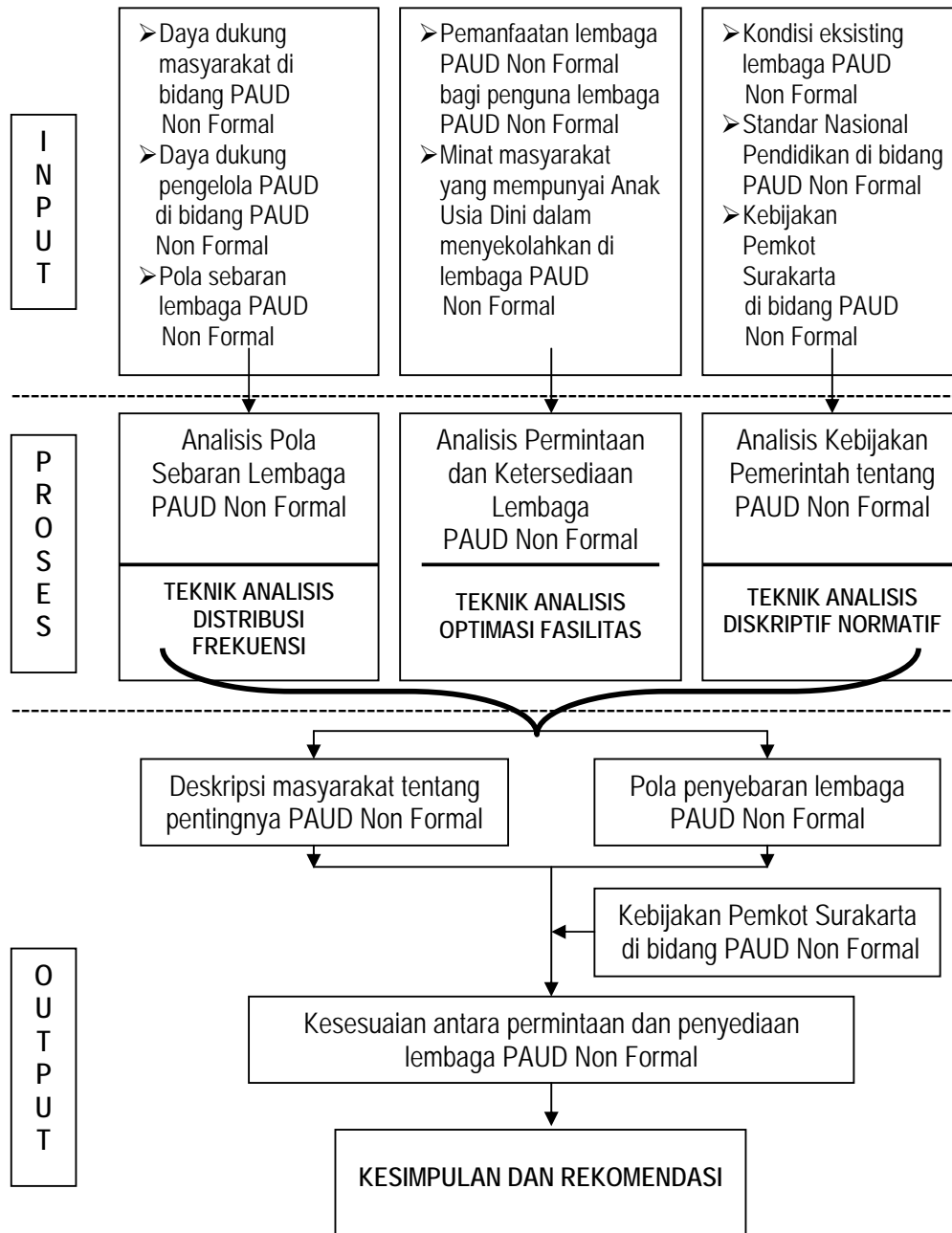
Sedangkan untuk masyarakat dari unsur orang tua murid diwakili oleh 2 orang responden di setiap lembaga PAUD Non Formal. Dengan demikian, maka didapat jumlah responden seperti dalam tabel 1.3.

TABEL I.3
TABEL RESPONDEN DAN JUMLAH RESPONDEN

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah Responden (Unsur Masyarakat)			Jumlah Responden (Unsur Pengelola PAUD Non Formal)			
			Orang Tua Murid PAUD Non Formal (orang)	Masyarakat Umum (orang)	Jml (orang)	Kelompok Bermain (lembaga)	Taman Penitipan Anak (lembaga)	SPS / PAUD TERINTEGRASI DG POSYANDU (lembaga)	Jml (lembaga)
1.	Kepatihan Kulon	2262	8	4	12	4	-	-	4
2.	Kepatihan Wetan	3115	-	4	4	-	-	-	-
3.	Sudiroprajan	4577	2	4	6	1	-	-	1
4.	Gandekan	9515	-	4	4	-	-	-	-
5.	Sewu	8334	-	4	4	-	-	-	-
6.	Pucangsawit	13770	-	8	8	-	-	-	-
7.	Jagalan	12350	2	8	10	1	-	-	1
8.	Purwodining ratan	4702	2	4	6	1	-	-	1
9.	Tegalharjo	6228	-	4	4	-	-	-	-
10.	Jebres	32060	16	11	27	4	3	1	8
11.	Mojosongo	42449	4	11	15	2	-	0	2
	Jumlah	139606	34	66	100	13	3	1	17

Sumber : Penelitian, 2008

Untuk lebih memahami alur analisis yang dipakai dalam penelitian ini maka akan digambarkan dalam sebuah diagram analisis seperti berikut ini :



Sumber : Penelitian,2008

GAMBAR 1.5
DIAGRAM ANALISIS

1.8 Sistematika Penulisan Tesis

Dalam mencapai maksud dan tujuan penulisan ini, secara keseluruhan pembahasan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang ditulisnya topik ini, menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, merumuskan permasalahan sesuai dengan batas-batas permasalahan yang akan dibahas yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian,. Selain itu juga dibahas mengenai Manfaat studi yang berisikan harapan dari apa yang diteliti serta ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Terakhir, bab ini menguraikan secara singkat tentang Kerangka Pikir yang merupakan alur pikir penulis dalam menuangkan pemikiran penulisan, Pendekatan penelitian, metode penelitian, metode analisis serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pada Bab ini dibahas mengenai teori-teori yang merupakan referensi pendukung maupun pendapat para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian mengenai baik dalam kebijakan khususnya mengenai Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal maupun dalam analisis penelitian. Dari hasil kajian pustaka dipakai sebagai acuan dalam penentuan variable penelitian, penentuan metode dan teknik penelitian.

**BAB III PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL
DALAM GAMBARAN WILAYAH KOTA SURAKARTA**

Pada Bab ini akan dibahas mengenai kondisi fisik dan non fisik dari wilayah penelitian. Disamping itu juga akan ditampilkan profil pendidikan beserta berbagai potensi maupun permasalahan yang akan diidentifikasi untuk dikaji lebih lanjut

**BAB IV ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PERMINTAN DAN
PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI JALUR NON FORMAL DI KECAMATAN JEBRES
KOTA SURAKARTA**

Bab ini berisikan hasil analisis penelitian yaitu analisis Pola Sebaran Lembaga PAUD Non Formal dengan teknik analisis Distribusi Frekuensi, Analisis Permintaan dan Ketersediaan Lembaga PAUD Non Formal dengan teknik Optimasi Fasilitas serta Analisis Deskriptif Normatif untuk mengkaji Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang PAUD Non Formal. Dari hasil analisis tersebut maka dapat menyimpulkan beberapa temuan studi

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan beberapa rekomendasi.

BAB II

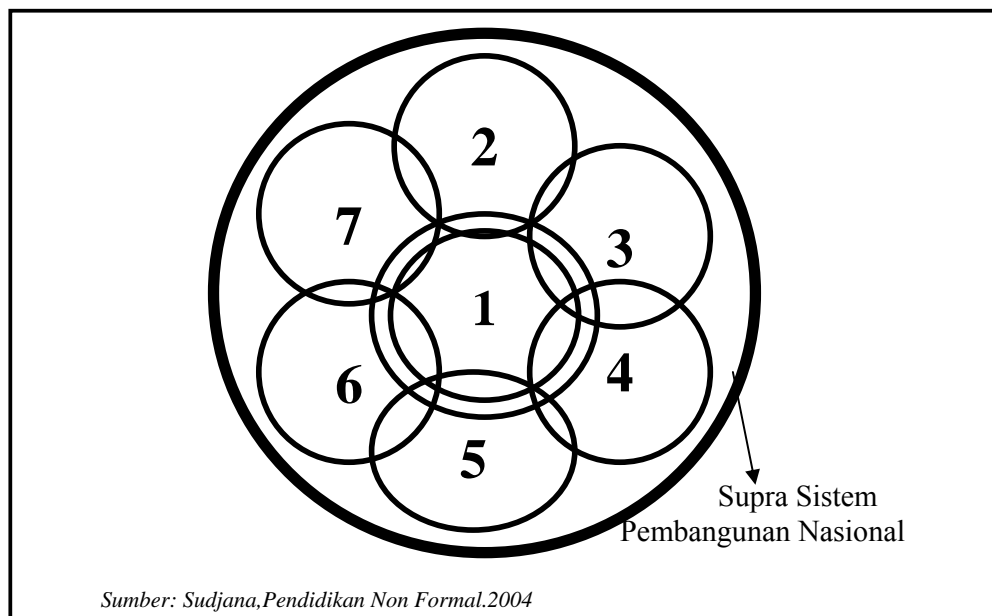
TINJAUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2.1 Konsep Pendidikan Nasional

Upaya pengembangan pendidikan dalam laju pembangunan merupakan suatu keharusan dan kewajaran. Maksud dari keharusan yaitu dengan pendidikan dapat mengembangkan dirinya untuk lebih berperan sebagai wujud pengembangan sumber daya manusia dan tatanan kehidupan global. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran yaitu dengan hadirnya pendidikan sebagai wujud atau produk budaya masyarakat dan bangsa, terus berkembang untuk mencari bentuknya yang paling cocok sesuai dengan perubahan dinamis yang terjadi dalam masyarakat setiap bangsa, dan perubahan dinamis tersebut terjadi akibat wajar dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan nilai-nilai budaya yang makin cepat dan meningkatnya tuntutan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang dapat memenuhi laju pembangunan dan dapat berkiprah pada kehidupan global.

Pendidikan Nasional sebagai salah satu sistem dari supra sistem pembangunan nasional memiliki tiga subsistem pendidikan yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal. Subsistem pertama disebut pula pendidikan sekolah sedangkan subsistem pendidikan Non Formal dan pendidikan Informal berada dalam cakupan Pendidikan Luar Sekolah (Sudjana S,2004:1).

Di Indonesia, sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari supra sistem pembangunan nasional. Untuk menggambarkan letak keterkaitan antara sistem pendidikan nasional dan sistem-sistem lainnya di dalam supra sistem pembangunan nasional dapat dilihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini :



GAMBAR 2.1
KETERKAITAN ANTARA SISTEM DALAM
SUPRA SISTEM PEMBANGUNAN NASIONAL

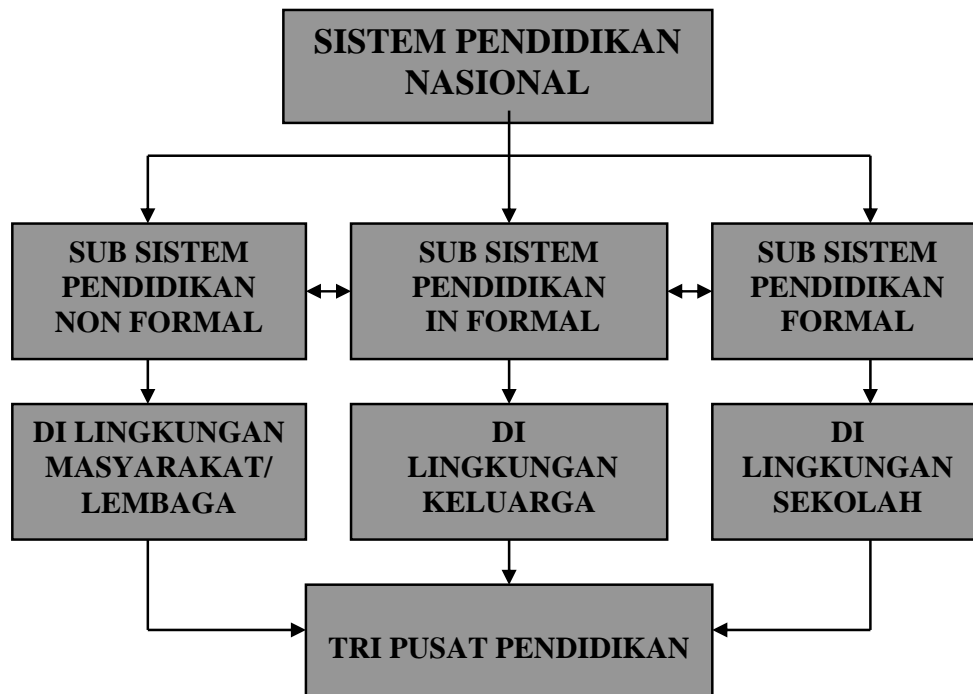
Keterangan :

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | = Sistem Pendidikan Nasional | 4 | = Sistem Ekonomi Nasional |
| 2 | = Sistem Ideologi Nasional | 5 | = Sistem Budaya Nasional |
| 3 | = Sistem Politik Nasional | 6 | = dst. |

Menurut Undang-Undang RI No. 2 tahun 1989 dan No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu

kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional.

Dalam UU tersebut dijelaskan pula bahwa Sistem Pendidikan Nasional terdiri atas tiga subsistem yaitu subsistem pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Semua subsistem ini berkaitan dan saling menopang antara satu dengan yang lainnya. Setiap subsistem memiliki kedudukan yang sama dalam sistem pendidikan nasional. Keterkaitan antara ketiga subsistem pendidikan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 2.2 berikut ini :



Sumber: Sudjana, Pendidikan Non Formal. 2004

GAMBAR 2.2
KETERKAITAN
ANTARA KEDUA SUBSISTEM PENDIDIKAN

2.2 Karakteristik Program Pendidikan Formal dan Non Formal

Untuk memahami jalur Pendidikan Nasional di Indonesia kiranya perlu kita bahas terlebih dahulu mengenai karakteristik masing-masing jalur tersebut, terutama pada Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Non Formal, agar dapat mengetahui ciri khas masing-masing jalur pendidikan tersebut sehingga bahasan lebih lanjut dalam Penelitian ini menemui kesepahaman pengertian, konsep dan ruang lingkupnya. Berdasarkan model yang digunakan Paulston (1972), dapat dibedakan karakteristik Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang digolongkan menjadi lima kategori yang meliputi : tujuan program, waktu penyelenggaraan, isi kegiatan, proses pembelajaran dan pengendalian program (Sudjana S,2004:29-32). Kelima kategori tersebut dapat dijabarkan melalui Tabel II.1.

2.3 Kebijakan Tata Ruang dalam Kaitan Pendidikan Anak Usia Dini

Konsep tata ruang kota merupakan pemikiran atau gagasan yang mencakup semua hal dan berkaitan dengan karakteristik permasalahan tata ruang kota. Sementara itu tata ruang kota yang dinamis adalah tata ruang kota yang mampu mewakili laju pembangunan di dalam kota, dimana rencana tata ruang kota tersebut harus didasarkan atasantisipasi dan pemahaman terhadap seluk beluk kekuatan sosial ekonomi politis, yang akan mendorong dan melatar belakangi suatu kegiatan pembangunan (Hendropranoto, 1991:3).

TABEL II.1
PERBEDAAN KARAKTERISTIK PROGRAM PENDIDIKAN
PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL

PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
A. TUJUAN	
1. Jangka panjang dan umum	1. Jangka pendek dan khusus
2. Orientasi pada pemilihan ijazah	2. Kurang menekankan pentingnya ijazah
B. W A K T U	
1. Relatif lama	1. Relatif Singkat
2. Berorientasi ke masa depan	2. Menekankan masa sekarang
3. Menggunakan waktu penuh dan terus menerus	3. Menggunakan waktu tidak terus menerus
C. ISI PROGRAM	
1. Kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan	1. Kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik
D. PROSES PEMBELAJARAN	
1. Dipusatkan di lingkungan sekolah	1. Dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga
2. Terlepas dari lingkungan kehidupan Peserta didik di masyarakat	2. Berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat
3. Struktur program yang ketat	3. Struktur program yang luwes
4. Berpusat pada pendidik	4. Berpusat pada peserta didik
5. Pengerahan daya dukung secara maksimal	5. Penghematan pada sumber-sumber yang tersedia
E. PENGENDALIAN	
1. Dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih Tinggi	1. Dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik
2. Pendekatan berdasarkan kekuasaan	2. Pendekatan demokratis

Sumber: Sudjana, Pendidikan Non Formal. 2004

Dalam hubungan ini efektivitas penataan ruang sebagai implementasi rencana tata ruang sangat tergantung pada situasi/ kondisi obyektif yang ada pada masyarakat yang sifatnya lebih sangat mendasar dan selalu menciptakan perubahan-perubahan. Dengan demikian konsep tata ruang kota yang dinamis adalah suatu konsep tata ruang kota yang akomodatif dan implementatif sifatnya serta menampung semua persyaratan yang diperlukan baik teknis, ekologis secara seimbang dan proporsional (Dirjen Cipta Karya, 1992: 19).

Strategi pengembangan struktur ruang diupayakan dapat dilakukan untuk mendukung pola keterkaitan antar ruang berupa kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan.

Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain : struktur ruang yang terbentuk, ketersediaan dan rencana jaringan prasarana dan kegiatan potensial setiap kawasan. Adapun suatu lingkungan dapat ditinjau dari segi kualitasnya amat dipengaruhi oleh 2 variabel, yaitu : Variabel Lokasi, yaitu jarak ke pusat pelayanan, iklim dan topografi. Serta Variabel Fisik yaitu organisasi ruang yang jelas, udara bersih dan tenang (Rapoport, 1997: 60-61). Selain itu, perkembangan suatu kota juga sangat dipengaruhi oleh : faktor manusia, faktor kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan antar pusat kegiatan. (Sujarto, 1998: 14)

Konsep tata ruang kota dinamis selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan dielaborasi oleh Stren, White & Whitney dalam Budihardjo, Sujarto (1998: 10) sebagai suatu interaksi antara tiga sistem-sistem biologis dan sumberdaya, sistem ekonomi dan sistem sosial. Memang dengan kelengkapan konsep berkelanjutan dalam trilogi : ekologi-ekonomi-sosial tersebut menjadi semakin menyulitkan pelaksanaannya, namun jelas lebih bermakna dan berkaitan dengan masalah, khususnya di negara berkembang. Sebagai contoh, dengan masuknya tolok ukur sosial, maka sasaran berkelanjutan menjadi lebih jelas dan terarah, antara lain dikaitkan dengan upaya pemerataan sosial (*social equity*), penanggulangan dan penghapusan kemiskinan (*poverty eradication*), keadilan spasial (*spatial justice*) dan semacamnya.

Dalam struktur pengembangan tata ruang wilayah Kota Surakarta secara lebih spesifik dimaksudkan untuk mengarahkan sistem pusat-pusat pemukiman sesuai dengan hirarki dan fungsinya dalam konteks pengembangan wilayah kota yang terintegrasi dengan memacu pengembangan pusat-pusat kegiatan kota.

Hirarki pusat-pusat pelayanan di Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan pengembangan wilayah secara merata. Peningkatan peran pusat pelayanan yang dikembangkan dapat dilakukan dengan melalui penyediaan sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan sesuai dengan peran fungsi kotanya disamping juga memberikan sarana prasarana khusus sebagai penarik aktifitas masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa suatu perencanaan apapun apalagi menyangkut tata ruang kota, memang sudah semestinya harus mengingat beberapa faktor pendukungnya terutama kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah setempat.

Dalam kaitannya dengan tema penelitian ini, yaitu mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal memang sekilas hanya membahas bahwa suatu wilayah dengan jumlah penduduk tertentu menerapkan standar ideal untuk menyediakan lembaga PAUD Non Formal. Namun apabila dikaji lebih mendalam, ternyata tidak sesederhana hal tersebut.

Dalam Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa dalam 1 Desa / Kelurahan , minimal terdapat 1 lembaga PAUD Non Formal. Sedangkan dalam Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan

menyebutkan bahwa fasilitas pendidikan itu mencakup dasar perencanaan, perancangan dan pelaksanaan pembangunan gedung sekolah dimana setiap jenjang pendidikan membutuhkan ruang belajar untuk melayani Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun / LPSTB (BSN, 2004: 8).

Untuk itu sebagai tolok ukur dalam merencanakan kebutuhan lembaga pendidikan khususnya lembaga Pendidikan PAUD yang dalam sumber tersebut diistilahkan sebagai Fasilitas Pendidikan Pra Belajar, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL II.2
FASILITAS PENDIDIKAN
PRA BELAJAR

Jumlah minimum penghuni yang dilayani (jiwa)	Fungsi	Letak	Jarak	Kebutuhan jumlah ruang belajar	Luas lantai yang dibutuhkan	Luas lahan yang dibutuhkan (m ²)
1000 anak-anak usia 5-6 tahun sebanyak 8 %	Menampung pelaksanaan pendidikan pra sekolah usia 5-6 tahun	Ditengah-tengah kelompok keluarga/ digabung dengan taman-taman tempat bermain di RT/ RW	Mudah dicapai dengan radius pencapaian maksimum 500 m, dihitung dari unit terjauh	Dihitung berdasarkan sistem pendidikan SD 6 tahun dengan menggunakan rumus (1)	125 m ² atau 1,5 m ² / siswa	250

Sumber : Standar Nasional Indonesia, 2004

Keterangan :

Rumus (1) Kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra belajar berdasarkan sistem pendidikan SD 6 tahun :

$$S = \frac{(UP5 - Us) \times a\%}{E}$$

Dimana :

- S : kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra sekolah;
- UP5 : hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun;
- Us : jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung;
- a % : anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra sekolah;
- E : daya tampung paling efektif/efisien berdasarkan kondisi lingkungan 35–40 siswa

Bila dilihat dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk merencanakan satu lembaga pendidikan harus mempertimbangkan jumlah penduduk, fungsi, letak, jarak, kebutuhan ruang belajar, luas lantai dan luas lahan yang dibutuhkan, sehingga dapat mengatur sebaran lokasi lembaga pendidikan dimaksud.

Namun apabila dilihat dari faktor yang lain bahwa dari lingkungan masyarakat yang marginal, kebutuhan lembaga PAUD Non Formal sangatlah mendesak karena selain keterbatasan ekonomi dan jauhnya jarak tempuh dengan pusat layanan maka sangatlah diperlukan lembaga layanan pendidikan yang berpihak pada masyarakat miskin. Dengan kata lain pengembangan program PAUD Non Formal menggunakan sistem “*jemput bola*” yang artinya lembaga terkait yang mendekati masyarakat agar strategi pengembangan program tercapai.

Hal tersebut sejalan dengan telah diberlakukannya Otonomi Daerah, maka strategi pendekatan dalam rangka pengembangan program layanan PAUD ke depan adalah berbasis masyarakat, dengan memberdayakan semua potensi yang ada, sosialisasi PAUD kepada seluruh lapisan masyarakat, pengembangan jaringan kemitraaan, pemberian bimbingan teknis/ pendampingan, pembuatan percontohan dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang lemah dan terisolasi.

2.4 Hakekat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Ilmu pendidikan telah berkembang pesat dan terspesialisasi. Salah satu diantaranya ialah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang membahas pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun. Anak usia tersebut dipandang memiliki

karakteristik yang berbeda dengan anak usia di atasnya sehingga pendidikannya dipandang perlu untuk dikhususkan. PAUD telah berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian yang luar biasa terutama di negara-negara maju. Karena menurut ilmu tersebut pengembangan kapasitas manusia akan lebih mudah dilakukan sejak usia dini. PAUD adalah investasi yang sangat besar bagi keluarga dan juga bagi suatu bangsa.

PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Adapun dasar-dasar yang dipergunakan Pemerintah Indonesia dalam menggalakkan program PAUD di negara ini adalah :

1. *UUD 1945* menyatakan bahwa

”.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”.Amandemen UUD 1945 pasal 28 b menyebutkan : *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

2. *UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Pasal 3 : perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Pasal 4 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 8 : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spriritual dan sosial

3. *UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Pasal 1 butir 14 :

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Pasal 28 :

- (1) PAUD diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar
- (2) PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal, dan/ atau In formal
- (3) PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat

- (4) PAUD pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat
- (5) PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan

4. *Konvensi Hak Anak*

- * non diskriminasi
- * kepentingan yang terbaik bagi anak
- * hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- * penghargaan terhadap pendapat anak

5. *Deklarasi Dakkar tahun 2002*

Tentang pendidikan untuk semua memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik

6. *World For Children 2002 (dunia yang layak bagi anak)*

- mencanangkan kehidupan yang sehat
- memberikan pendidikan berkualitas
- perlindungan terhadap aniaya, eksploitasi dan kekerasan
- memerangi HIV/ AIDS

Adapun tujuan diselenggarakannya PAUD ada dua yaitu :

Tujuan Utama :

Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.

Tujuan Penyerta :

Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah

2.5 Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung sekilas mengenai hakekat PAUD dan arti pentingnya PAUD, namun tidak ada salahnya kalau mengetahui beberapa pendapat para ahli mengenai pentingnya PAUD sesuai yang dirangkum oleh Dr. Siskandar dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar PAUD di Jakarta pada tanggal 20 Nopember 2002 sebagai berikut :

Carnegie Task Force (1994) menyebutkan perlunya PAUD sbb. :

- Perkembangan otak anak sebelum usia satu tahun lebih cepat dan ekstensif dari yang diketahui sebelumnya. Walaupun pembentukan sel otak telah lengkap sebelum anak lahir tetapi kematangan otak terus berlangsung sesudah anak lahir.
- Perkembangan otak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari yang diketahui sebelumnya. Gizi yang tidak layak pada masa kehamilan dan tahun pertama

kelahiran secara serius mempengaruhi perkembangan otak anak dan dapat menyebabkan kecacatan pada syaraf dan pada tingkah laku anak, seperti kesulitan belajar atau keterbelakangan mental.

- Pengaruh lingkungan awal pada perkembangan otak berdampak lama (awet). Terdapat bukti bahwa bayi yang diberi gizi yang baik, mainan dan teman bermain fungsi otaknya lebih baik dari pada anak yang tidak mendapatkan stimulasi lingkungan yang baik.
- Lingkungan tidak saja menyebabkan penambahan jumlah sel otak dan penambahan jumlah hubungan antar sel tetapi juga cara bagaimana hubungan antar sel otak tersebut terjadi. Proses pemerayaan ini sangat besar terjadi di masa usia dini dan diperluas oleh pengalaman sensori anak dengan dunia luar.
- Stress pada usia dini dapat merusakkan secara permanen fungsi otak anak, cara belajarnya dan memorinya. Penelitian sebelumnya menunjukkan anak yang mengalami stress yang sangat besar pada usia dini memiliki resiko sangat besar dalam perkembangan kognitif, tingkah laku dan kesulitan emosionalnya dikemudian hari.

NAEYC (*National Association for the Education of Young Children*) dalam pendahuluan untuk komitmentnya pada pendidikan anak memberikan rasional tentang pentingnya pendidikan anak dengan mengacu beberapa penelitian di bawah ini :

- Dana Alliance (1997) menyatakan adanya penelitian yang memperlihatkan dari bayi sampai lebih kurang 10 tahun, sel otak tidak saja membentuk hampir seluruh hubungan yang harus dilakukan untuk seluruh hidupnya tetapi juga

perkembangan terbesarnya. Jadi stimulasi kognitif pada usia sebelum 10 tahun mempengaruhi seluruh kehidupan anak.

- Bowlby 1969; Stern 1985 menyebutkan bahwa hubungan yang positif dan membangun sangat penting pada masa anak usia dini. Menurut mereka data menunjukkan bahwa hal ini tidak saja penting untuk perkembangan kognitif anak tapi juga untuk perkembangan emosi dan sosialnya.
- Galiahue 1993 menyatakan bahwa usia prasekolah adalah waktu yang paling optimal untuk perkembangan mendasar dari keterampilan motorik anak. Sedangkan Dyson & Genishi, 1993 menyebutkan pentingnya usia tersebut pada perkembangan bahasa anak.
- Barnett 1995 menyatakan bahwa penelitian-penelitian terbaru secara jelas memperlihatkan bahwa program pendidikan usia dini yang berkualitas tinggi serta yang sesuai dengan perkembangan anak (*developmentally appropriate*) akan menghasilkan efek positif secara jangka panjang maupun pendek pada perkembangan kognitif dan sosial anak. Selanjutnya disimpulkan dari berbagai penelitian bahwa pendidikan prasekolah yang bermutu akan menyebabkan anak sukses dalam pendidikannya.

2.6 Bentuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada dasarnya yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak usia dini pada tahap pertama adalah lingkungan keluarganya. Pelaksanaannya terjadi secara informal karena secara tidak langsung anak akan memperoleh pengalaman baik secara sadar maupun tidak sadar dan hal ini akan berlangsung sejak anak

lahir sampai meninggal dunia. Orang tua berperan untuk melatih dan mengajarkan anaknya untuk dapat berbicara dan berjalan, melatih berbagai keterampilan seperti cara mengurus diri sendiri, sopan santun, nilai-nilai dan mengenai berbagai obyek yang ditemuinya di lingkungan terdekatnya.

Sedangkan lingkungan kedua yang berfungsi juga sebagai tempat pendidikan di luar keluarga adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan kumpulan beberapa keluarga. Dalam masyarakat ini anak akan bergaul dengan orang lain sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan saling mempengaruhi sehingga akan berpengaruh pada pembentukan pribadi anak.

Unsur lain yang berperan dalam pendidikan anak adalah lingkungan “Sekolah” yaitu lingkungan formal yang dalam hal ini biasanya dilakukan di suatu lembaga tertentu yang telah terstruktur dan mempunyai program yang baku. Berbagai bentuk pelayanan pendidikan bagi anak usia dini banyak ditemukan di lingkungan sekitar, baik yang bersifat informal, non formal maupun yang formal. Beberapa contoh lembaga pendidikan tersebut antara lain Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal dsb.

Beberapa bentuk layanan program PAUD tersebut ada yang mempunyai persamaan maupun perbedaannya selain bidang jalur garapannya yang sudah diuraikan sebelumnya. Persamaan antara Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak adalah :

- a. Bertujuan mengembangkan seluruh aspek fisik, mental, emosi dan sosial anak
- b. Isi program merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan masing-masing
- c. Tenaga pendidik umumnya lulusan SPG, SGTk dan SMU.

Sedangkan perbedaannya adalah :

- Frekwensi kehadiran, Taman Kanak-Kanak masuk setiap hari, sedangkan Kelompok Bermain hanya beberapa hari (3 hari)
- Taman Kanak-Kanak memiliki kurikulum yang baku, sedangkan Kelompok Bermain tidak. Kalaupun memiliki kurikulum maka penerapannya akan lebih fleksibel.
- Kelompok Bermain menampung anak usia 3-5 tahun, sedangkan Taman Kanak-Kanak menampung anak usia 5-6 tahun (Rahman, 2002:60-61)

Ada juga yang memerinci bentuk layanan PAUD menjadi 5 jenis kunci layanan anak usia dini yang dapat diidentifikasi di Indonesia seperti hasil Laporan Review Kebijakan (2005:13-14) seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL II.3
PROFIL KUNCI PELAYANAN ANAK USIA DINI

	TK/ RA	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	Posyandu	Bina Keluarga Balita (BKB)
Usia	5-6 th	2-6 th	3 bl-6 th	0-6 th	0-5 th
Target	Anak	Anak	Anak	Anak dan Ibu	Ibu
Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Anak Usia Dini • Perkembangan Anak dan kesiapan bersekolah • Ajaran agama di RA 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan pada dasarnya bermain-main • Perkembangan emosi dan mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan perawatan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja, digabung dengan komponen perkembangan emosi dan mental 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak; digabung dengan pendidikan orang tua 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan orang tua; kegiatan untuk anak juga ditawarkan selama pertemuan
Waktu Kegiatan	2 jam setiap hari	2 jam. Minimum 3 x seminggu	8-10 jam setiap hari	2 jam, 2 x sebulan	2 jam, 2 x sebulan
Persyaratan Kualifikasi Guru	2 th di akademi	SLTA dengan training khusus termasuk magang	SLTA dengan training khusus termasuk magang	SMP dengan pelatihan khusus termasuk magang	SMP dengan pelatihan berhubungan dengan kerja termasuk magang
Agen Pemerintah yang bertanggung jawab	DEPDIKNAS DEPAG (Supervisi dan Monitoring)	DEPSOS DEPDIKNAS (Kurikulum)	DEPSOS (Supervisi) DEPDIKNAS (Garis-garis Besar Perkembangan)	DEPKES (Bantuan teknis, Supervisi) MENDAGRI (Memberi inisiatif pelayanan dalam kerjasama dengan kesejahteraan keluarga gerakan pemberdayaan)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan BKKBN

Sumber :Laporan Review Kebijakan, 2005.

2.7 Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sesuai Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Khusus untuk pendidikan anak usia dini sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya proporsi anak yang terlayani di PAUD dengan tetap memperhatikan tiga pilar kebijakan departemen, yakni : Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan; Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing; serta Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik.

a. Pemerataan dan Perluasan Akses

Pemerataan dan perluasan akses akan diupayakan bersama-sama oleh Pemerintah dan Swasta, dimana pemerintah lebih berkonsentrasi pada pendidikan formal TK/RA dan mendorong swasta melakukan perluasan PAUD Non Formal (KB,TPA). Perluasan oleh pemerintah antara lain juga dilakukan dengan mendirikan model-model atau rintisan penyelenggaraan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah / wilayah. Pada tahun 2009, pemerintah menargetkan APK TK/RA mencapai 45 %, sedangkan APK PAUD Non Formal usia 2-4 tahun 35 % atau sekitar 4,3 juta orang. Perluasan akses PAUD akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan berikut :

- **Penyediaan Sarana/ Prasarana**
Dengan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) TK dan mengembangkan model rintisan penyelenggaraan PAUD yang sesuai dengan kondisi lokal.
- **Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan**
Biaya ini diberikan dalam bentuk subsidi kepada penyelenggara PAUD baik negeri maupun swasta, terutama pada lembaga yang peserta didiknya sebagian besar berasal dari keluarga miskin.
- **Mendorong Peran Serta Masyarakat**
Untuk menumbuhkan minat masyarakat dalam menyelenggarakan lembaga PAUD, termasuk bekerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi lain serta Perguruan Tinggi melalui subsidi imbal swadaya, kemudahan perizinan dan bantuan fasilitas.
- **Pengembangan TK-SD Satu Atap**
Mendorong SD yang mempunyai fasilitas cukup untuk membuka TK yang terintegrasi dengan SD melalui subsidi pembiayaan secara kompetitif.

b. *Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing*

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut :

- **Pengembangan Menu Generik Pembelajaran dan Penilaian**

Merupakan kegiatan yang menyangkut pengembangan kurikulum, khususnya materi bahan ajar, model-model pembelajaran dan penilaian

➤ Pengembangan Program PAUD Model

Sebagai rujukan bagi pengembangan PAUD yang diselenggarakan oleh swasta yang kualitasnya masih di bawah standar.

➤ Peningkatan Kapasitas Institusi dan Sumberdaya Penyelenggara dan satuan PAUD

➤ Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD

c. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik

Kegiatan ini diarahkan pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol dan evaluasi kinerja PAUD dapat mengambil peran makin nyata dan efektif.

2.8 Standar Kebutuhan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Sebagai acuan penyelenggaraan lembaga PAUD, standar nasional harus mencakup standarisasi unsur-unsur utama dari input dan proses guna menghasilkan output yang diharapkan. Dengan demikian, standar nasional perlu mencakup unsur-unsur : kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, ketenagaan, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, organisasi kelembagaan, administrasi dan manajemen, serta lingkungan pendukung serta pembiayaan.

2.8.1 Standar menurut Departemen Pendidikan Nasional

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pada BAB XII pasal 45 yang membahas tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan, disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional dan kejiwaan peserta didik.

Disamping itu, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada BAB VII pasal 42 (2) disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Kriteria prasarana yang seharusnya ada dalam satuan pendidikan anak usia dini, khususnya jalur non formal yang berbentuk Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, Depdiknas melalui Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia telah mengeluarkan Buku Pedoman Rintisan Program Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak yang mensyaratkan kriteria tentang prasarana yang sesuai dengan satuan pendidikan yang dikelola. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa :

Prasarana Kelompok Bermain adalah tempat kegiatan Kelompok Bermain yang memenuhi syarat sebagai berikut : Terletak di lingkungan yang

bersih, strategis, aman dan nyaman bagi anak, Tata ruang dan dekorasi ruangan teratur dan menarik, Sirkulasi udara baik, Cukup cahaya, Cukup tersedia air bersih

Yang termasuk prasarana adalah Fasilitas gedung dan Sarana alat bermain

Sedangkan persyaratan prasarana dalam Taman Penitipan Anak (TPA) adalah

- Pengadaan gedung untuk TPA harus berorientasi pada tumbuh kembang anak dan kondisi setempat.
- Gedung dengan luas minimal 200 m² untuk kapasitas daya tampung anak \pm 40 anak
- Ruang dan tempat bermain bagi anak usia 1-2 tahun, 3-4 tahunan dan 5-6 tahun

(Depdiknas, 2003:31)

2.8.2 Standarisasi Prasarana PAUD menurut Pandangan Umum

Dari hasil rumusan Tim Perumus Semiloka Nasional PAUD yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 8-12 Oktober 2004, diungkapkan bahwa standarisasi prasarana dalam PAUD adalah adanya ruangan pokok yaitu :

- a. tempat bermain dalam ruangan
- b. tempat bermain di luar ruangan
- c. kamar mandi dan wc
- d. tempat cuci tangan.

Untuk ruang tidur/ beristirahat merupakan ruangan pokok khusus untuk Taman Penitipan Anak. Ruang penunjang yang disarankan adalah dapur (khusus TPA), ruang administrasi (TPA & KB), area baca (TPA & KB), ruang kesehatan (TPA, KB & SPS) dan ruang / tempat tunggu (TPA, KB & SPS).

Sedangkan menurut Suryanto (2002:171), disebutkan bahwa tempat atau lokasi untuk satuan PAUD perlu di desain agar menarik dan fungsional untuk bermain dan belajar. Tempat bermain perlu dirancang sebaik mungkin agar aman, nyaman dan kondusif untuk belajar anak. Aman, nyaman dan kondusif merupakan tiga kriteria utama dalam merancang tempat satuan PAUD

Setelah mencermati berbagai kriteria dan persyaratan sebuah prasarana untuk satuan pendidikan anak usia dini seperti tersebut di atas, kiranya dapat dikelompokkan sebagai acuan standar pengadaan prasarana untuk PAUD Non Formal yang dapat tertuang dalam tabel berikut ini :

TABEL II.4
STANDAR PRASARANA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR NON FORMAL

No.	Jenis PAUD Non Formal	Standar Pengadaan Prasarana yang dimiliki
1.	Kelompok Bermain	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat arena bermain di dalam ruangan ➤ Terdapat arena bermain di luar ruangan ➤ Terdapat ruang guru/ kantor ➤ Terdapat tempat cuci tangan ➤ Terdapat kamar mandi dan WC ➤ Terdapat tempat tunggu orang tua ➤ Terdapat gudang tempat menyimpan mainan ➤ Terdapat dapur dan ruang makan ➤ Terdapat ruang UKS dan ruang istirahat
2.	Taman Penitipan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat arena bermain di dalam ruangan ➤ Terdapat arena bermain di luar ruangan ➤ Terdapat ruang guru/ kantor ➤ Terdapat tempat cuci tangan ➤ Terdapat kamar mandi dan WC ➤ Terdapat kamar tidur sesuai kelompok umur ➤ Terdapat gudang tempat menyimpan mainan ➤ Terdapat dapur dan ruang makan ➤ Terdapat ruang UKS dan ruang istirahat
3.	Satuan PAUD Sejenis (SPS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat arena bermain di dalam dan di luar ruangan ➤ Terdapat tempat cuci tangan ➤ Terdapat kamar mandi dan WC ➤ Terdapat ruang UKS dan ruang istirahat ➤ Terdapat tempat tunggu orang tua

Sumber : Slamet Suryanto, 2005

2.9 Rangkuman Kajian Pustaka

Dari uraian mengenai Pendidikan Anak Usia Dini yang tersaji dalam rangkain teori dari berbagai sumber pustaka tersebut diatas dapat dibuat suatu rangkuman kajian pustaka sebagaimana tabel berikut :

TABEL II.5
RANGKUMAN KAJIAN PUSTAKA

NO	SUMBER	RINGKASAN MATERI	VARIABEL	KETERKAITAN PENELITIAN
1.	Sudjana S,2004	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Nasional memiliki tiga subsistem pendidikan yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal • Karakteristik Jalur Pendidikan Formal dan Jalur Pendidikan Non Formal meliputi : tujuan program, waktu penyelenggaraan, isi kegiatan, proses pembelajaran dan pengendalian program. 	Pengertian Sub Sistem Pendidikan dalam Pendidikan Nasional Ciri-ciri khas jalur pendidikan formal dan non formal	<p style="text-align: center;">Mengetahui perbedaan dari tiga jalur pendidikan (Formal, Non Formal dan Informal)</p> <p style="text-align: center;">Mengetahui ciri khas jalur pendidikan non formal</p>
2.	Hendropranoto, 1991	Tata Ruang Kota yang dinamis adalah tata ruang kota yang mampu mewakili laju pembangunan di dalam kota dan memahami seluk beluk kekuatan sosial ekonomi politis, yang akan mendorong dan melatar belakangi suatu kegiatan pembangunan	Pengertian Tata Ruang Kota	Sebagai dasar kajian kesesuaian lembaga PAUD
3.	Dirjen Cipta Karya, 1992	Konsep tata ruang kota yang dinamis adalah suatu konsep tata ruang kota yang akomodatif dan implementatif sifatnya	Pengertian Tata Ruang Kota	Sebagai dasar kajian kesesuaian lembaga PAUD
4.	<ul style="list-style-type: none"> • UUD 1945 • UU No. 23 th.2002 • UU No. 20 th.2003 • Konvensi Hak Anak • Deklarasi Dakkar th. 2002 • World For Children 2002 	Dasar-dasar yang dipergunakan Pemerintah Indonesia dalam menggalakkan program PAUD	Dasar hukum pentingnya PAUD	Mengetahui arti pentingnya PAUD

dilanjutkan ke halaman 63

lanjutan

NO	SUMBER	RINGKASAN MATERI	VARIABEL	KETERKAITAN PENELITIAN
5.	Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005	Prioritas tertinggi dalam pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009	Mengetahui kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan khususnya PAUD
6.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 20 th 2003 • PP Republik Indonesia No.19 Th 2005 • Standar Nasional Indonesia th. 04 	membahas tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan dan tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Standar pelayanan PAUD dan standar fasilitas pendidikan pra belajar	Mengetahui Standar Pelayanan Minimal di bidang PAUD baik kualitas maupun kuantitasnya dan mengetahui kebutuhan lembaga pendidikan PAUD
7.	Drs. Slamet Suryanto, M.Ed (2004)	Tempat atau lokasi untuk satuan PAUD perlu di desain agar menarik dan fungsional untuk bermain dan belajar	Standar prasarana PAUD	Mengetahui kesesuaian kualitas dan kuantitas prasarana PAUD

Sumber : hasil rangkuman literatur, 2008

2.10 Variabel Penelitian

Dari rangkuman daftar pustaka sebagaimana tersebut diatas, dapat dirumuskan variabel penelitiannya adalah sebagai berikut :

TABEL II.6
VARIABEL PENELITIAN

NO	SASARAN	VARIABEL	FAKTOR	URAIAN
1.	<p>Mengidentifikasi jumlah lembaga PAUD jalur Non Form</p> <p>Mengidentifikasi jumlah anak usia dini di wilayah sasaran beserta jenis-jenis layanan pendidikan yang didapat</p> <p>Menganalisis jumlah permintaan dan potensi penyediaan lembaga PAUD Non Formal</p> <p>Menganalisis kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD</p>	Kesesuaian lembaga PAUD Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pentingnya PAUD Non Formal ➤ Kelengkapan sarana dan prasarana PAUD Non Formal ➤ Potensi Anak Usia Dini ➤ Sumber Daya Manusia (masyarakat yang mempunyai anak usia dini) ➤ Sebaran lembaga PAUD Non Formal 	Mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal
2.	Menganalisis kebijakan pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung program PAUD	Standar Pelayanan Minimal di bidang PAUD Non Formal	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta ➤ Pengembangan wilayah dalam Sub Wilayah Pembangunan Kota Surakarta ➤ Kesadaran masyarakat dalam PAUD Non Formal 	Menganalisis kebijakan pemerintah dan pemahaman masyarakat di bidang PAUD Non Formal

Sumber :hasil interpretasi literatur, 2008

BAB III

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR NON FORMAL DALAM GAMBARAN WILAYAH KOTA SURAKARTA

3.1 Kondisi Fisik

Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan nama Kota Sala (Kota Solo) merupakan kota besar kedua di Provinsi Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Secara geografis, wilayah Kota Surakarta terletak di antara dua buah gunung yaitu Gunung Lawu dan Gunung Merapi serta berada ditepi sungai Bengawan Solo, sehingga Kota Surakarta memiliki topografi yang relatif rendah, dengan ketinggian + 92 m² dari permukaan laut dan merupakan sebuah dataran rendah yang terletak di cekungan lereng pegunungan Lawu dan pegunungan Merapi. Terletak diantara 110 45` 15" - 110 45` 35" Bujur Timur dan 70` 36" - 70` 56" Lintang Selatan. Kota Surakarta dibelah dan dialiri oleh 3 (tiga) buah sungai besar yaitu sungai Bengawan Solo, Kali Jenes dan Kali Pepe. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangan.

Dalam perkembangan sistem kota-kota di Provinsi Jawa Tengah pendekatan yang digunakan Kota Surakarta adalah pada konsep *growth pole* atau *growth center* sebagai titik tumbuh yang diharapkan berperan meratakan perkembangan pada daerah belakangnya (*spread effect*). Konsep dan strategis yang akan diterapkan dengan strategi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan utama (*Growth Pole*), yaitu memberikan alokasi pembangunan pada pusat-pusat pertumbuhan.

Kota Surakarta berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur dengan Kabupaten Karanganyar, sebelah selatan dengan Kabupaten Sukoharjo dan di sebelah barat dengan Kabupaten Sukoharjo. Yang terbagi menjadi 5 (lima) Kecamatan, yaitu : Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari. Adapun luas wilayah dan jumlah penduduk di masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.1
JUMLAH PENDUDUK DAN LUAS WILAYAH TIAP KECAMATAN
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Orang)
1.	LAWEYAN	8,63	109.155
2.	SERENGAN	3,19	60.635
3.	PASARKLIWON	4,82	86.708
4.	JEBRES	12,58	139.292
5.	BANJARSARI	14,83	162.256
JUMLAH		44,06	558.046

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2005

Sedangkan pembagian wilayah-wilayah tersebut dapat dilihat pada Peta Administrasi Kota Surakarta yang telah tertera di Bab I.

Luas tanah kota Surakarta mencapai 44,06 km² dengan penggunaan tanah sebagian besar digunakan untuk kawasan pemukiman yaitu mencapai 2,642.44 (60 %), kawasan wisata-budaya seluas 99.09 (2.25 %), kawasan olah

raga seluas 79.27 (1.80%), jasa wisata seluas 55.05 (1.25 %), kawasan perdagangan seluas 264.24 (6.00 %), kawasan perkantoran komersial seluas 44.04 (1.00%), kawasan perkantoran pemerintah seluas 77.07 (1.75 %), kawasan pendidikan seluas 253.23 (5.75 %), fasilitas sosial seluas 121.11 (2.75 %) , fasilitas transportasi seluas 44.04 (1.00%), industri seluas 85.88 (2.00 %), kawasan ruang terbuka seluas 22.02 (0.50 %), fasilitas khusus 11.01(0.25 %), lain-lain seluas 605.58 (13.70 %).(Kota Surakarta Dalam Angka, 2005).

Sedangkan apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut katagori dewasa dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

TABEL III.2
PENDUDUK KOTA SURAKARTA MENURUT KATAGORI
DEWASA DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2005

NO	KECAMATAN	DEWASA		
		L	P	JML
1	LAWEYAN	36.771	31.559	68.330
2	SERENGAN	16.228	16.884	33.112
3	PASARKLIWON	30.808	32.714	63.522
4	JEBRES	36.469	37.687	74.156
5	BANJARSARI	40.569	42.243	82.912
	JUMLAH	160.845	161.087	32.2032

Sumber : Kota Surakarta Dalam Angka 2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Jebres yang dikategorikan dewasa berjumlah 74.156 orang. Menurut sumber tersebut yang dikategorikan dewasa dalam hal ini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dan hubungannya dengan obyek penelitian ini yaitu diasumsikan bahwa usia tersebut merupakan usia produktif sehingga dimungkinkan telah

pernah menikah dan mempunyai anak. Hal ini perlu penulis jelaskan, karena yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di Kecamatan Jebres yang telah berusia dewasa dengan prioritas penduduk yang mempunyai anak usia dini.

3.2 Kondisi Non Fisik

Melihat Kota Surakarta tidak hanya menarik secara kondisi fisiknya saja, melainkan kondisi non fisik yang meliputi kondisi sosial, ekonomi dan kebudayaannya pun juga mempunyai daya tarik tersendiri yang sangat menantang untuk dijadikan sebagai suatu ajang penelitian.

3.2.1 Kependudukan dan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas, 2005), jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 558.046 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 88.44, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sebanyak 88 orang penduduk laki-laki (Kota Surakarta Dalam Angka, 2005)

Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta mencapai 12.716 jiwa / km² dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Serengan yang mencapai angka 60.635 jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta mencapai 237.888 atau sebesar 44.50 % dari seluruh penduduk Kota Surakarta. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 89.14 % dari angkatan kerja, sedangkan sebesar 10.86 % termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Penduduk wanita yang bekerja mencapai angka sebesar 34.64 % dari angkatan kerja yang bekerja. (Kota Surakarta Dalam Angka, 2005). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa Kota Surakarta adalah kota yang sebagian besar penduduknya adalah sebagai pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang sangat besar, artinya bahwa devisa Kota Surakarta sebagian besar dihasilkan oleh masyarakatnya sendiri. Begitu juga untuk tenaga kerja wanita yang prosentasenya cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa peran perempuan di Kota Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Hampir di semua sektor lapangan usaha, terdapat peran wanita yang ikut andil di dalamnya. Sebagian besar wanita di Kota Surakarta sudah mandiri dalam hal ekonomi, seperti dapat dilihat pada tabel III.3

TABEL III.3
BANYAKNYA PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS
YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

No.	Lapangan Usaha	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Pertanian, Perikanan	2.124	236	2.360
2	Pertambangan	236	0	236
3	Industri Pengolahan	32.096	21.948	54.044
4	Listrik, Gas dan Air	472	0	472
5	Konstruksi	9.912	236	10.148
6	Perdagangan, Rumah Makan, Akomodasi	38.232	37.052	75.284
7	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	11.800	708	12.508
8	Keuangan dan Asuransi	2.596	708	3.304
9	Jasa (Pendidikan, Kesehatan, Administrasi Pemerintahan)	33.984	22.656	56.640
Jumlah		131.452	83.544	214.996

Sumber : Kota Surakarta dalam angka Tahun 2005

Melihat tabel di atas dapat kita ketahui bahwa para wanita di Kota Surakarta menduduki posisi jumlah yang hampir sama dengan laki-laki pada

lapangan usaha perdagangan, rumah makan dan akomodasi. Hal ini terlihat dalam kenyataan bahwa biarpun para ibu rumah tangga yang tinggal di rumahpun rata-rata mempunyai usaha kios, warung makan, pengelola kos-kosan dan lain sebagainya.

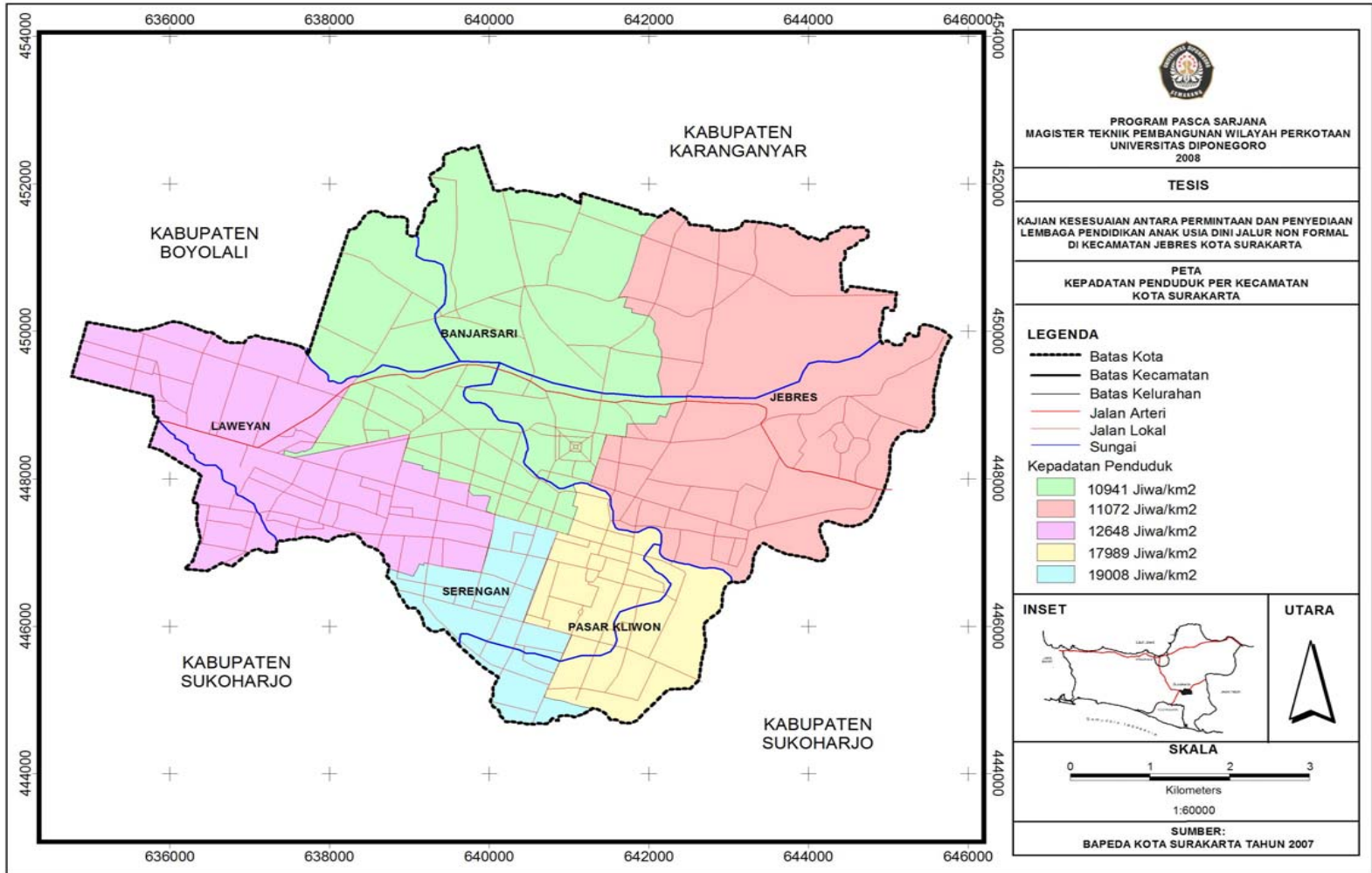
Sedangkan banyaknya penduduk menurut jenis mata pencahariannya seperti pada tabel berikut ini :

TABEL III.4
BANYAKNYA PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

No.	Mata Pencapaian	Kecamatan					Jumlah
		Laweyan	Serengan	Pasarkliwon	Jebres	Banjarsari	
1.	Petani Sendiri	44	-	-	82	360	486
2.	Buruh Tani	154	-	-	-	415	569
3.	Pengusaha	529	1.593	2.206	1.071	2.643	8.042
4.	Buruh Industri	19.112	7.890	9.583	17.403	16.266	70.254
5.	Buruh Bangunan	17.024	5.248	7.320	16.278	18.536	64.406
6.	Pedagang	4.982	5.034	7.501	4.046	10.412	31.975
7.	Angkutan	5.034	1.873	4.312	1.434	7.288	19.941
8.	PNS/TNI/POLRI	7.501	1.598	3.881	6.981	9.379	29.340
9.	Pensiunan	4.046	1.023	14.429	2.848	7.880	30.226
10.	Lain-lain	10.412	17.479	13.425	45.707	44.382	131.405
	Jumlah	68.838	41.738	62.657	95.850	117.561	386.644

Sumber : Kota Surakarta dalam angka Tahun 2005

Adapun kepadatan penduduk Kota Surakarta dapat kami gambarkan dalam Peta Kepadatan Penduduk berikut ini :



GAMBAR 3.1
PETA KEPADATAN PENDUDUK PER KECAMATAN
KOTA SURAKARTA

Sedangkan untuk melihat banyaknya jumlah Kelurahan, RT, RW dan Kepala Keluarga di Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.5
BANYAKNYA KELURAHAN, RT, RW DAN KEPALA KELUARGA
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			
		KELURAHAN	RW	RT	KK
1	LAWEYAN	11	105	451	22.864
2	SERENGAN	7	75	332	15.020
3	PASARKLIWON	9	100	424	20.242
4	JEBRES	11	145	605	31.870
5	BANJARSARI	13	167	832	37.746
JUMLAH		51	592	2644	187.742

Sumber : Kota Surakarta dalam angka Tahun 2005

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Jebres merupakan wilayah kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak kedua setelah Kecamatan Banjarsari. Adapun jumlah penduduk menurut mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel III.6.

TABEL III.6
JUMLAH PENDUDUK USIA DI ATAS 10 TAHUN
MENURUT MATAPENCAHARIAN
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

No	Kelurahan	Jenis Mata Pencaharian											Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kepatihan Kulon	-	-	-	42	847	85	202	114	112	46	650	2098
2	Kepatihan Wetan	-	-	-	28	502	462	573	182	192	3	920	2854
3	Sudiroprajan	-	-	-	83	193	36	34	-	23	24	3607	4080
4	Gandekan	-	-	-	129	1639	1642	823	114	389	291	2255	7483
5	Sewu	-	-	-	22	538	211	87	189	129	155	4224	5045
6	Pucangsawit	-	-	-	349	1038	796	522	234	455	340	5261	10252
7	Jagalan	-	-	-	66	1028	542	132	38	213	96	6176	9495
8	Purwodiningratan	-	-	-	31	953	274	420	56	132	67	2897	3320
9	Tegalharjo	-	-	-	18	779	271	91	152	139	140	4761	5045
10	Jebres	-	-	-	43	4947	4638	621	134	950	755	6761	20016
11	Mojosongo	82	-	-	260	4938	7321	541	221	4246	931	8195	28990
	Jumlah	82	-	-	1077	17403	16278	4046	1434	6981	2848	45707	98158

Sumber : Monografi Kecamatan Jebres Tahun 2005

Keterangan :

1	= Petani Sendiri	7	= Pedagang
2	= Buruh Tani	8	= Pengangkutan
3	= Nelayan	9	= Pegawai Negereri Sipil/ ABRI
4	= Pengusaha	10	= Pensiunan
5	= Buruh Industri	11	= Lain-Lain
6	= Buruh Bangunan		

3.2.2 Kependidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana dan prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan pendidikan.

Menurut hasil SUSENAS 2004 ada sebanyak 1,31 % penduduk usia 7-15 tahun yang putus sekolah, sementara itu yang belum pernah sekolah mencapai 0,29 %

jumlah penduduk usia 7-15 tahun. Kota Surakarta disebut juga sebagai Kota Pendidikan yang merupakan kota dengan penduduk yang cukup padat, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,52 % per tahun. Tingkat pendidikan penduduk Kota Surakarta 28,07% lulusan SLTA, 22,93 % lulusan SD dan sederajat, 19,9 % lulusan SLTP dan sederajat, 6,3 % lulusan SMK, 4,55 % lulusan Diploma dan 0,25 % lulusan Sarjana. Berikut ini kami paparkan data pendidikan dari jenjang TK sampai dengan SLTA di wilayah Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini :

TABEL III.7
DATA BANYAKNYA GEDUNG SEKOLAH, RUANG KELAS, MURID DAN GURU
PADA JENJANG TK, SD, SMP, SMA, SMK
MENURUT KECAMATAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2005

NO	INDIKATOR	KECAMATAN					JML
		L	S	P	J	B	
1	Taman Kanak-Kanak :						
	- Jumlah Gedung	52	30	33	69	79	263
	- Jumlah Ruang Kelas	103	61	109	97	150	
	- Jumlah Murid	2547	555	1953	920	5154	
- Jumlah Guru	207	185	207	167	337		
2	Sekolah Dasar :						
	- Jumlah Gedung	47	31	59	54	81	272
	- Jumlah Ruang Kelas	407	225	375	405	560	
	- Jumlah Murid	2366	996	1768	1789	3475	
- Jumlah Guru	844	368	609	659	1045		
3	Sekolah Menengah Pertama:						
	- Jumlah Gedung	17	10	9	17	18	71
	- Jumlah Ruang Kelas	219	102	114	185	275	
	- Jumlah Murid	8201	3767	4340	6520	10885	
- Jumlah Guru	613	302	305	538	732		
4	Sekolah Menengah Atas :						
	- Jumlah Gedung	12	3	4	6	16	41
	- Jumlah Ruang Kelas	145	44	39	114	216	
	- Jumlah Murid	5541	1820	1441	4336	8011	
- Jumlah Guru	427	129	144	327	692		
5	Sek. Menengah Kejuruan :						
	- Jumlah Gedung	12	4	2	6	17	41
	- Jumlah Ruang Kelas	206	68	39	83	208	
	- Jumlah Murid	7786	2249	1565	2335	7358	
- Jumlah Guru	590	173	130	243	683		

Sumber : Kota Surakarta dalam angka Tahun 2005

Keterangan : L = LAWEYAN J = JEBRES P= PASARKLIWON
S = SERENGAN B = BANJARSARI

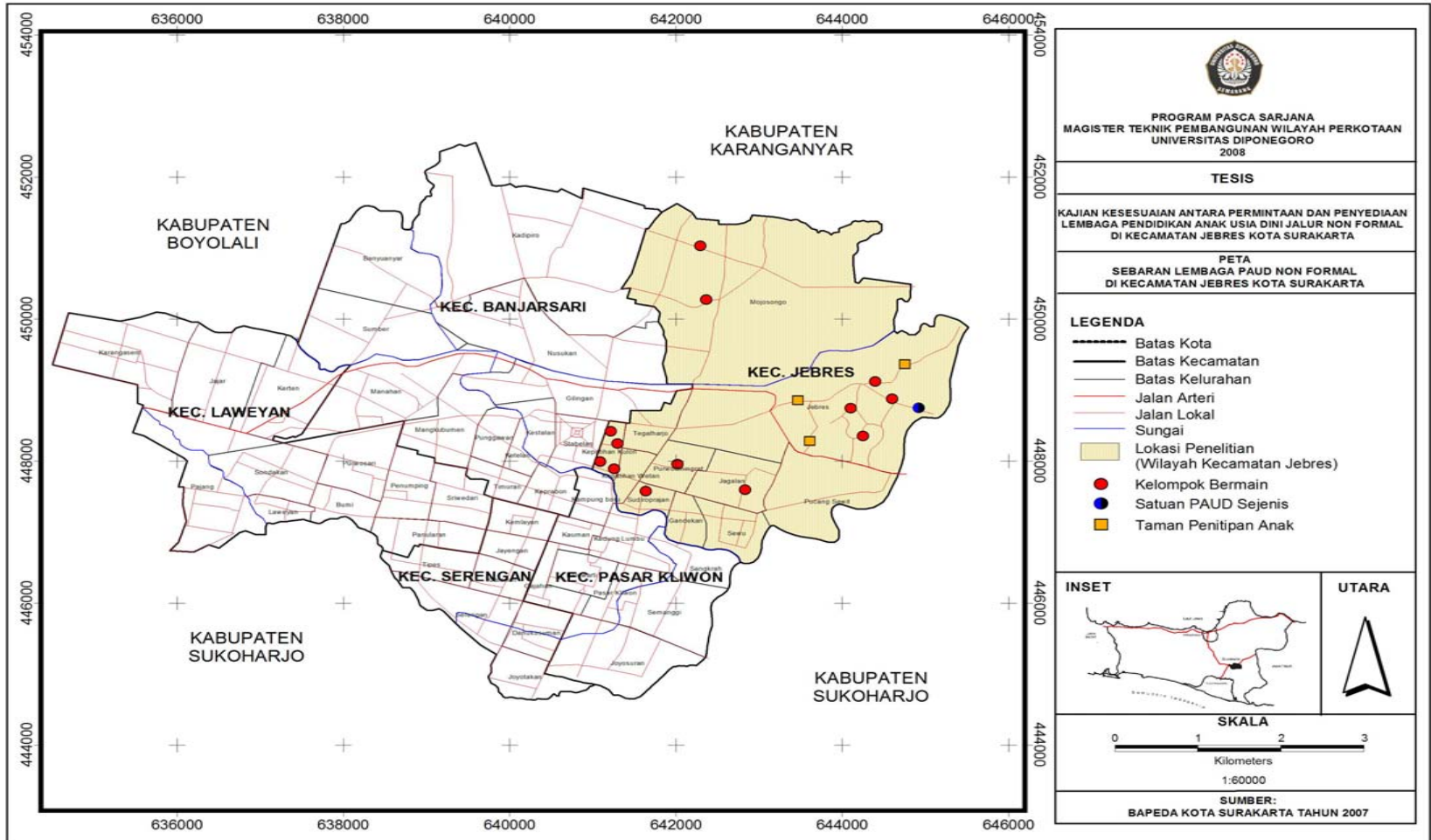
Tabel di atas merupakan data tentang pendidikan bila dilihat dari Jalur formal, dimana untuk Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak) sudah menunjukkan bahwa jumlah PAUD jalur Formal sudah memenuhi standar minimal kebutuhan masyarakat, namun dalam hal PAUD Non Formal yang juga merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Surakarta memang belum menunjukkan kondisi yang ideal dalam arti sesuai dengan jumlah anak usia dini yang sebenarnya ada di wilayah tersebut. Hal ini dapat di lihat dalam tabel berikut ini :

TABEL III.8
DATA JUMLAH LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2006

NO	KECAMATAN	JENIS LEMBAGA PAUD NON FORMAL		
		KELOMPOK BERMAIN (KB)	TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)	SATUAN PEND.SEJENIS (SPS)
1.	LAWEYAN	12	5	3
2.	SERENGAN	5	2	0
3.	PASARKLIWON	9	5	2
4.	JEBRES	13	3	1
5.	BANJARSARI	14	1	5
	JUMLAH	53	16	11

Sumber : Subdin Dikmas Pemuda & OR Dinas Dikpora Kota Surakarta

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Jebres sebagai wilayah penelitian, keberadaan PAUD jalur Non Formal belum tersebar merata. Apabila digambarkan dalam peta, maka sebaran letak lembaga PAUD Non Formal yang berada di wilayah Kecamatan Jebres adalah sebagai berikut :



GAMBAR 3.2
PETA SEBARAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

Terlihat dalam peta di atas bahwa keberadaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres belum dapat dikatakan merata. Hal ini dikarenakan jumlah tersebut belum mewakili masing-masing Kelurahan, padahal apabila di lihat dari jumlah anak usia dini yang ada di Kecamatan Jebres, masih banyak yang belum terlayani dalam PAUD jalur Non Formal. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**TABEL III.9
DATA LAYANAN PROGRAM PAUD
JALUR FORMAL (TK) DAN NON FORMAL (KB, TPA DAN SPS)
DI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2006**

NO.	KECAMATAN	JML ANAK USIA 0-6 TH	JUMLAH ANAK YANG TERLAYANI PROGRAM PAUD					BELUM TERLAYANI
			TK	KB	TPA	SPS	JUMLAH	
1.	LAWEYAN	13608	845	213	72	65	1195	12413
2.	SERENGAN	9841	628	360	0	22	1010	8831
3.	PASARKILWON	7729	860	196	10	80	1146	6583
4.	JEBRES	21949	920	190	33	32	1175	20774
5.	BANJARSARI	26481	1367	438	21	122	1948	24533
	JUMLAH	79608	4620	1397	136	321	6474	73134

Sumber : Dinas Dikpora Kota Surakarta, 2006

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Jebres masih terdapat sasaran anak usia dini yang belum terlayani di program PAUD sebesar 20.774 anak. Suatu jumlah yang begitu besar untuk menjadi suatu Pekerjaan Rumah bagi Pemerintah Kota Surakarta mengingat anak usia dini merupakan

potensi sekaligus investasi suatu generasi untuk diabaikan begitu saja. Khusus mengenai wilayah penelitian, yaitu Kecamatan Jebres, berikut adalah data dasar yang berkaitan dengan PAUD Non Formal yang ada di Kecamatan Jebres Kota Surakarta pada tahun 2006.

TABEL III.10
DATA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA
TAHUN 2006

No	Nama Kelurahan	Jumlah Pddk (Total)	Jumlah Penduduk Usia 0 – 6 tahun			Jumlah Lembaga PAUD Non Formal		
			L	P	Jml	KB	TPA	SPS
1	Kepatihan Kulon	2262	740	822	1562	4	-	0
2	Kepatihan Wetan	3115	872	909	1781	-	-	0
3	Sudiroprajan	4577	946	1019	1965	1	-	0
4	Gandekan	9515	972	1022	1994	-	-	0
5	Sewu	8334	1014	1034	2048	-	-	0
6	Pucangsawit	13770	940	987	1927	-	-	0
7	Jagalan	12350	1348	1452	2800	1	-	0
8	Purwodiningratan	4702	512	532	1044	1	-	0
9	Tegalharjo	6228	327	412	739	-	-	0
10	Jebres	32060	1060	1147	2207	4	3	1
11	Mojosongo	42449	1399	2483	3882	2	-	0
JUMLAH		139606	10130	11819	21949	13	3	1

Sumber : Monografi Kecamatan Jebres Kota Surakarta

Ket. : KB = Kelompok Bermain, SPS = Satuan PAUD Sejenis
TPA = Taman Penitipan Anak,

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa lembaga PAUD Non Formal yang ada di Kecamatan Jebres belum merata pada setiap wilayah Kelurahan. Di satu sisi terdapat Kelurahan dengan jumlah lembaga PAUD Non Formal lebih dari 1 lembaga, sedang di sisi lain terdapat Kelurahan yang sama sekali belum mempunyai lembaga PAUD Non Formal.

3.3 Arah Kebijakan dalam PAUD di Kota Surakarta

Merujuk pada kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DIKPORA) Kota Surakarta mengenai Pendidikan Anak Usia Dini, maka visi dan misi PAUD adalah sebagai berikut :

Visi PAUD

- Tertampungnya anak usia dini di Kota Surakarta dalam lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Misi PAUD

- Mengupayakan pemerataan layanan, peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini di Kota Surakarta
- Mengupayakan perintisan lembaga PAUD untuk menampung anak-anak usia dini di Kota Surakarta
- Memberdayakan semua potensi masyarakat, pemerintah dan kelembagaan lainnya dalam berperan serta merencanakan program perintisan lembaga PAUD di Kota Surakarta

Tujuan Program PAUD

Tujuan program Pendidikan dalam PAUD di Kota Surakarta adalah :

- a. Mewujudkan pemerataan layanan, peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan dini
- b. Mewujudkan rencana perintisan, rehabilitasi gedung dan penambahan ruang kelas baru bagi lembaga PAUD untuk menampung anak usia dini di Kota Surakarta

- c. Menciptakan kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan kelembagaan dalam berperan serta merencanakan program perintisan lembaga PAUD di Kota Surakarta

Strategi

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan program di atas, diperlukan strategi pendekatan yang bersifat holistik dan terintegrasi. Wujud strategi tersebut adalah :

- a. Mewujudkan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia dini melalui :
 1. Pembangunan/ perintisan lembaga PAUD, terutama di wilayah Kelurahan yang belum terdapat sama sekali lembaga tersebut;
 2. Pengembangan dan perintisan berbagai model/ bentuk layanan PAUD terutama jalur Non Formal (TPA, Kelompok Bermain atau Satuan PAUD Sejenis)
- b. Peningkatan mutu layanan pendidikan di bidang PAUD , melalui :
 1. Merintis lembaga PAUD Non Formal dengan fasilitas/ layanan yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal ;
 2. Memanfaatkan lembaga dan stakeholder terkait yang berada di wilayah (Perguruan Tinggi, LSM bidang anak, Stasiun TV dan organisasi masyarakat) guna memberikan kontribusi dalam hal peningkatan mutu prasarana PAUD
- c. Peningkatan *Good Governance* (tata kelola), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik, ditempuh melalui :

1. Sosialisasi dan pemasyarakatan Program PAUD;
2. Optimalisasi organisasi mitra PAUD (yaitu Forum PAUD dan HIMPAUDI / Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia);
3. Optimalisasi kerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi dan stakeholders yang terkait dengan PAUD, terutama dalam pengadaan prasarana PAUD;
4. Mengadakan pemantauan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi

3.4 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta

Sejak program PAUD gencar disosialisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2003, Pemerintah Kota Surakarta berusaha untuk menyambut program yang masih dianggap sebagai program baru tersebut dengan meneruskan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat di tingkat bawah, yaitu melalui pertemuan-pertemuan PKK atau Posyandu.

Setelah Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Surakarta memang sangat menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap kemajuan pendidikan, termasuk di dalamnya Pendidikan bagi anak usia dini. Dinas yang secara khusus menangani hal ini adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta yang secara teknisnya berada di bawah Seksi Pendidikan Masyarakat Subdin Dikmas Pemuda dan Olahraga (PMPO).

Berbagai usaha telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surakarta, terbukti para pejabat eksekutif, legeslatif, organisasi masyarakat dan LSM yang

menangani bidang anak, sangat antusias dan optimis bahwa pendidikan anak sejak usia dini merupakan investasi jangka panjang yang nantinya akan terlihat hasilnya dalam kurun waktu berpuluh-puluh tahun yang akan datang. Hal ini senada dengan pendapat para pakar di bidang tumbuh kembang anak termasuk para pakar pendidikan yang mengatakan bahwa pendidikan yang salah pada masa dini akan berdampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan.

Begitu pentingnya program PAUD ini sehingga perlu dikaji lebih mendalam, karena kesiapan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Surakarta memang dirasa masih perlu ditingkatkan lagi. Mengingat potensi penduduk yang berusia 0-6 tahun yang menjadi garapan dari program PAUD masih banyak yang belum tertampung dalam satuan pendidikan PAUD baik yang digarap melalui jalur Formal (TK, BA, RA), Non Formal (TPA, Kelompok Bermain dll) serta jalur Informal (pendidikan keluarga dll).

Kesiapan yang dimaksud disini diantaranya adalah kesiapan dalam hal sarana dan prasarana dalam program PAUD yang dalam penelitian ini khusus dibahas mengenai PAUD jalur Non Formal. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa demi meningkatkan mutu pendidikan selain faktor tenaga pendidik, faktor sarana prasarana juga memegang peranan yang sangat penting. Terutama prasarana pendidikan karena menyangkut tempat belajar anak, layak dan tidaknya serta memenuhi standar atau tidak.

Adapun program-program PAUD yang telah terselenggara di wilayah Pemerintah Kota Surakarta yaitu :

- a. Taman Penitipan Anak (TPA)
- b. PAUD terintegrasi dengan Posyandu (POSPAUD)
- c. Taman Kanak-Kanak (TK)
- d. Kelompok Bermain (Playgroup)

3.5 Rencana Strategis Kota Surakarta

Sebelum memaparkan tentang rencana strategis bidang pendidikan yang direncanakan Pemerintah Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2002 s/d 2008), sebaiknya kami sampaikan terlebih dahulu Visi dan Misi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dinas Dikpora) sebagai Dinas yang menangani tentang Pendidikan.

❖ *VISI DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA :*

Terwujudnya masyarakat Surakarta yang BERIMAN, BERTAQWA, CERDAS, SEHAT, BERPRESTASI DAN BERBUDAYA.

❖ *MISI DINAS DIKPORA KOTA SURAKARTA :*

- Mewujudkan masyarakat Surakarta yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, kreatif, inovatif dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Mewujudkan masyarakat yang gemar berolah raga, memiliki kesegaran jasmani dan menghasilkan bibit olah raga yang berprestasi;
- Mewujudkan generasi muda yang tangguh, trampil dan produktif;

- Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, berdaya tahan dan mampu memfilter budaya asing.

Dalam Renstra dan Program Prioritas Lima Tahunan Daerah Kota Surakarta, yang menjadi program-program dan kegiatan prioritas di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yaitu :

A. Program peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Bantuan Operasional untuk pengembangan TK/ PAUD;
2. Peningkatan kualitas tenaga pengajar TK/ PAUD;
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan TK/ PAUD, alat peraga, alat permainan/ bermain;
4. Bantuan operasional untuk membayar IGTKI dan penyuluhan PAUD;
5. Usaha penambahan kelas baru pada satuan PAUD;
6. Peningkatan kualitas guru dan pengelola PAUD.

B. Program peningkatan kualitas tenaga pengajar, dengan kegiatan berupa Diklat guru dan pengelola PAUD

3.6 Kebutuhan Prasarana dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Surakarta

Pembangunan pendidikan di Kota Surakarta selama ini telah melakukan pemberian pelaksanaan kurikulum pemberdayaan tenaga pengajar, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pembinaan kesiswaan. Namun masih

ditemui beberapa permasalahan yang membutuhkan pemikiran khusus untuk mengatasinya. Permasalahan tersebut yaitu :

- A. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak berat
- B. SDM (tenaga pengajar) masih ada yang belum mengetahui program pengajaran yang ditentukan
- C. Terbatasnya alat peraga yang menunjang proses belajar mengajar

Dari permasalahan pokok tersebut di atas, sekiranya perlu dikaji sejauhmana kesesuaian antara permintaan berupa jumlah anak usia dini dengan ketersediaan lembaga PAUD yang mampu melayani anak-anak tersebut. Sehingga akan diketahui seberapa perlunya dan mendesaknya kebutuhan pengadaan prasarana pendidikan anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar segera teratasinya anak-anak usia dini tertampung ke dalam dunia pendidikan yang merupakan aset pembangunan di masa datang.

Beberapa aktivitas dalam PAUD Non Formal bentuk Kelompok Bermain dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber :Dokumentasi Penelitian, 2008

GAMBAR 3.3
KEGIATAN BELAJAR DAN BERMAIN
DI KELOMPOK BERMAIN “PELANGI CERIA”
KELURAHAN JEBRES KECAMATAN JEBRES

Dalam gambar di atas dapat dilihat bahwa PAUD Non Formal (bentuk Kelompok Bermain) dapat diselenggarakan secara akrab dan penuh keceriaan. Anak-anak didik diberikan pelajaran sambil bermain sehingga tidak membuat anak bosan untuk mengikuti semua instruksi para guru/ pendidiknya. Hal inilah yang menjadi salah satu keunggulan pendidikan yang dilaksanakan secara non formal, yaitu tidak terbelenggu pada ruangan tertutup dengan pelajaran-pelajaran yang baku namun dapat diajarkan secara luwes dan kekeluargaan.

BAB IV
ANALISIS KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN
PENYEDIAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

Kajian mengenai kesesuaian antara permintaan dan penyediaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dilakukan dengan beberapa analisis yang berkaitan antara yang satu dengan lainnya. Analisis tersebut adalah analisis pola sebaran Lembaga PAUD Non Formal, Analisis permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal serta Analisis Kebijakan Pemerintah di bidang PAUD Non Formal.

Dalam melakukan analisis tersebut di atas dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang ada pada saat ini dan kondisi yang seharusnya. Namun sebelum melakukan analisis tersebut di atas, akan lebih baik apabila ditinjau terlebih dahulu wilayah penelitian dalam sebuah tinjauan secara fisik dan non fisiknya.

4.1 Analisis Fisik dan Non Fisik sebagai Sebuah Pengantar

Kecamatan Jebres merupakan wilayah kecamatan terbesar kedua setelah Kecamatan Banjarsari yaitu seluas 12,58 Km² (Sumber : Kota Surakarta dalam Angka 2005). Adapun tingkat kemiringan tanah di wilayah ini adalah 0-15 %. Sesuai karakter alam di Kota Surakarta, di Kecamatan Jebres sudah tidak terdapat

lahan pertanian maupun perikanan, namun masih ada jenis peternakan dan perkebunan sebagai mata pencaharian penduduk.

Wilayah Kecamatan Jebres bagian Timur berbatasan dengan wilayah kabupaten lain yaitu Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo. Hal ini berdampak positif dengan adanya arus perdagangan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu potensi lain yang merupakan keunggulan dari Kecamatan Jebres dibanding dengan kecamatan lain di Kota Surakarta yaitu di wilayah Kecamatan Jebres terdapat sebuah Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), sebuah Institut Seni Indonesia (ISI) dan beberapa Lembaga Pendidikan dan Keterampilan (LPK), juga Stasiun Kereta Api Jebres, sebuah Stasiun Televisi Daerah (TA TV) serta sebuah Rumah Sakit Umum Daerah yaitu RSUD Dr. Muwardi dan beberapa Rumah Sakit Swasta. Semua tempat-tempat unggulan tersebut sangat berdampak positif terhadap kemajuan pembangunan di wilayah Kecamatan Jebres, sehingga tidak salah apabila wilayah ini termasuk dalam Sub Wilayah Pembangunan di bidang Pendidikan.

Demikian pula dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres Surakarta, apabila dilihat dari segi lokasi lembaga yang sudah ada, terdapat beberapa wilayah Kelurahan di Kecamatan Jebres sudah mempunyai lembaga PAUD Non Formal walaupun keberadaannya belum merata di tiap wilayah Kelurahan.

Hasil dari observasi di wilayah penelitian didapat bahwa sebanyak 11 Kelurahan di Kecamatan Jebres Surakarta yang mempunyai lembaga PAUD Non

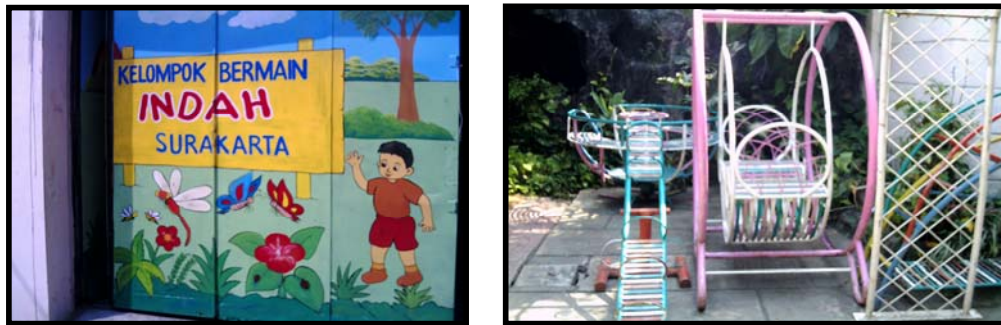
Formal hanya 6 Kelurahan saja. Dari jumlah tersebut belum terlihat penyebaran lokasi yang merata di setiap wilayahnya, terbukti masih terdapat beberapa Kelurahan yang belum mempunyai satupun lembaga PAUD Non Formal, sedangkan wilayah Kelurahan yang lain telah mempunyai beberapa lembaga. Hal ini terjadi lebih disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang terus menerus dari pihak Pemerintah Kota setempat.

Berdasarkan responden yang berasal dari unsur masyarakat umum, 75 % masih beranggapan bahwa lembaga PAUD Non Formal, khususnya bentuk Kelompok Bermain, baru menyentuh kelompok masyarakat menengah ke atas sedangkan yang diperuntukkan oleh masyarakat bawah boleh dikatakan sangat minim. Letak lokasi Kelompok Bermain itu sendiri menjadi penyebab utama mengapa kurang menyentuh untuk kelompok masyarakat ekonomi lemah. Dari 13 lembaga Kelompok Bermain, hanya 2 lembaga yang lokasinya berada di tengah-tengah perkampungan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yaitu Kelompok Bermain “PELANGI CERIA” di Kelurahan Jebres dan Kelompok Bermain “INDAH” di Kelurahan Kepatihan Kulon, selebihnya letak lokasi Kelompok Bermain berada di pinggir jalan raya, sehingga pemanfaatan akses lembaga tersebut banyak terserap oleh masyarakat dari luar lingkungan PAUD Non Formal itu sendiri. Namun apabila dilihat dari jarak antara lokasi lembaga dengan pemukiman penduduk, hasil observasi membuktikan bahwa keseluruhan letak lokasi PAUD Non Formal yang ada di Kecamatan Jebres mempunyai jarak antara 1 – 3 Km dari pemukiman masyarakat sasaran.

Kedekatan antara lokasi lembaga dengan lokasi pemukiman masyarakat ternyata bukan merupakan faktor penentu dari keberhasilan sebuah program PAUD Non Formal. Masih banyak faktor lain yang menjadi kendala tersendiri dalam mensosialisasikan program PAUD Non Formal di tengah-tengah masyarakat, misalnya masalah biaya pendidikan dan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam hal mendidik anak.

Agar lebih dapat membandingkan antara kondisi lembaga Kelompok Bermain yang berlokasi di tengah-tengah perkampungan dengan lokasi yang berada di pinggir jalan raya , untuk ini terdapat beberapa contoh gambar lokasi lembaga Kelompok Bermain yang berada di tengah-tengah perkampungan penduduk (Kelompok Bermain “INDAH”) dan yang berlokasi di pinggir jalan raya (Kelompok Bermain “MESEN”) seperti gambar 4.1

Gambar tersebut membuktikan bahwa lokasi lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres tidak bisa menjadi ukuran bahwa lembaga tersebut mempunyai anak didik dari warga sekitar. Dari hasil wawancara dengan Pengelola Kelompok Bermain tersebut, diketahui bahwa Lembaga Kelompok Bermain “MESEN” yang berlokasi di wilayah Kelurahan Purwodiningratan adalah milik Yayasan MESEN yang mayoritas beranggotakan dari golongan etnis Thionghoa, sehingga hal tersebut membuat warga sekitar lembaga berpikiran bahwa sangat tidak mungkin untuk mengikutsertakan anak-anaknya dalam pendidikan di Kelompok Bermain “MESEN”. Rata-rata masyarakat merasa ada jurang pemisah antara penduduk pribumi dengan non pribumi selain masalah biaya pendidikan yang sebagian besar dibebankan kepada orang tua murid.



Lokasi Kelompok Bermain "INDAH"
Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres Surakarta



Lokasi Kelompok Bermain "MESEN"
Kelurahan Purwodiningratan Kecamatan Jebres Surakarta

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2008

GAMBAR 4.1
LOKASI KELOMPOK BERMAIN YANG BERADA
DI TENGAH-TENGAH PERKAMPUNGAN
DAN DI PINGGIR JALAN RAYA

Gambar tersebut merupakan sepeggal bukti bahwa lokasi lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres tidak bisa menjadi ukuran bahwa lembaga tersebut mempunyai anak didik dari warga sekitar. Dari hasil wawancara dengan Pengelola Kelompok Bermain tersebut, diketahui bahwa Lembaga Kelompok Bermain “MESEN” yang berlokasi di wilayah Kelurahan Purwodiningratan adalah milik Yayasan MESEN yang mayoritas beranggotakan dari golongan etnis Thionghoa, sehingga hal tersebut membuat warga sekitar lembaga berpikiran bahwa sangat tidak mungkin untuk mengikutsertakan anak-anaknya dalam pendidikan di Kelompok Bermain “MESEN”. Yang menjadi pemberat dalam pola pikir tersebut adalah yang pertama merasa ada jurang pemisah antara penduduk pribumi dengan non pribumi, yang kedua dalam hal biaya pendidikan. Karena dikelola sebuah yayasan swasta, sehingga operasional lembaga tersebut termasuk biaya pendidikannya sebagian besar dibebankan kepada orang tua murid.

Lain halnya dengan lembaga Kelompok Bermain “INDAH” dimana lokasinya berada di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan lembaga ini memang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar, disamping karena biaya pendidikan yang murah dan terjangkau, juga memberlakukan subsidi silang bagi orang tua murid yang tidak mampu.

Berbicara mengenai Non Fisik, tentunya pikiran kita tertuju kepada bentuk penduduk dan kependudukan serta Sumber Daya Manusia yang melekat di dalamnya. Karena sepanjang pengetahuan kita bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang secara potensial dan dinamis mampu

mengolah Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB) yang ada untuk mencapai tingkat produktifitas yang optimal sehingga akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Demikian juga dalam kondisi di Kota Surakarta, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2005, tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta mencapai 12.716 jiwa/ km² hal ini akan berdampak pada munculnya masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan, pendidikan dan juga tingkat kriminalitas (BAPEDA. 2005).

Khusus di Wilayah Kecamatan Jebres, kondisi non fisik di bidang mata pencaharian adalah sebagian besar penduduk wilayah ini bermatapencaharian pada lapangan usaha industri pengolahan (pabrik tekstil, pabrik plastik) sebagai buruh pabrik/ buruh industri. Selain itu mayoritas status pekerjaan masyarakat di sana adalah berusaha sendiri yaitu di bidang pengelolaan kos-kosan dan warung makan. Hal ini dapat dimaklumi sebab dengan banyaknya lembaga pendidikan dan lokasi perkantoran di Kecamatan Jebres sangat memungkinkan bahwa usaha sendiri tersebut merupakan pilihan terbaik dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga.

Dalam hal mendidik anak, hasil wawancara dan observasi terhadap responden masyarakat di Wilayah Kecamatan Jebres dihasilkan suatu kesimpulan bahwa hampir semuanya mendukung dalam hal pendidikan anak diberikan pada anak sejak usia dini (terutama PAUD Non Formal). Namun pada kenyataannya mereka terkendala dalam hal biaya pendidikan yang dirasa masih belum terjangkau untuk masyarakat menengah ke bawah

Sebanyak 50 % masyarakat sekitar lembaga tersebut merasa membutuhkan pendidikan bagi anaknya yang berusia dini, hanya saja masih merasa rendah diri/ minder apabila sudah dihadapkan pada biaya pendidikan yang masih dirasakan belum terjangkau untuk ukuran masyarakat ekonomi lemah. Walaupun semua lembaga PAUD Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres telah menerapkan sistem subsidi silang bagi warga yang kurang mampu yaitu dengan cara meminimalisir biaya-biaya pendidikan bahkan membebaskannya dari semua biaya, karena dalam persyaratan pendirian PAUD Non Formal memang diharuskan untuk merekrut minimal 30 % untuk warga tidak mampu agar tujuan utama Pendidikan Anak untuk Anak Usia Dini benar-benar merata ke semua lapisan masyarakat. Namun pada kenyataannya, respon masyarakat yang kurang mampu merasa kurang percaya diri apabila anak-anaknya harus belajar sejajar dengan anak-anak yang mampu.

Pada data awal penulisan telah dapat kita lihat bahwa penduduk Kecamatan Jebres mayoritas bermatapencaharian buruh industri (17,73 %) dan buruh bangunan (16,58 %), selebihnya bermatapencaharian beragam mulai dari Pengusaha (1,10 %), Pedagang (4,12 %), Pengangkutan (1,46 %), PNS / TNI (7,1 %), Pensiunan (2,9 %) dan lain-lain. Dengan didukung dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat golongan buruh, didapat satu kondisi bahwa terdapat kecenderungan dari kalangan mereka untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang pendidikan pra sekolah atau PAUD dengan alasan pemborosan dan buang-buang waktu. Mereka lebih menginginkan anak-anaknya untuk langsung masuk ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Kalaupun

mempunyai minat untuk menyekolahkan ke jenjang PAUD pasti yang dipilih adalah PAUD dari jalur formal yaitu Taman Kanak-Kanak. Hal ini membuktikan bahwa sosialisasi tentang PAUD jalur Non Formal belum mengena pada masyarakat lapisan bawah. Anggapan bahwa PAUD jalur Non Formal terutama bentuk Kelompok Bermain adalah hanya untuk masyarakat yang mampu saja masih begitu kental diyakini oleh golongan masyarakat ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara responden bahwa 50 % masyarakat umum beranggapan bahwa menyekolahkan anak ke jenjang Pendidikan Formal adalah lebih penting dari pada di jalur Non Formal dengan alasan jalur formal lebih diakui. Hal ini merupakan kendala tersendiri betapa perlunya sosialisasi yang gencar dan kerjasama yang baik antara tokoh masyarakat, Yayasan/ Pemilik modal dan Pemerintah Kota lebih ditingkatkan lagi agar tujuan untuk memberi bekal pendidikan kepada anak sejak usia dini lebih tepat sasaran dan terjangkau sampai ke lapisan masyarakat kurang mampu.

4.2 Analisis Pola Sebaran Lembaga PAUD Non Formal

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta terbukti masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah anak usia dini (0-6 tahun) dan jumlah wilayah Kelurahan yang ada.

Dalam menganalisis pola sebaran lembaga PAUD Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres Surakarta dibutuhkan teknik analisis yaitu teknik *Analisis Distribusi Frekuensi*. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui

sebaran lembaga PAUD Non Formal yang sangat dipengaruhi oleh sejauhmana daya dukung masyarakat yang mempunyai anak usia dini serta para pengelola PAUD Non Formal terhadap keberadaan lembaga PAUD.Non Formal dengan cara mengolah data yang didapat dari hasil survei dan wawancara dengan responden sehingga didapat suatu nilai-nilai sesuai dengan kelompok-kelompok katagori yang ingin diketahui untuk kemudian nilai-nilai tersebut diprosentasekan agar terlihat distribusi frekuensi dari masing-masing katagori tersebut.

Menurut Mukhtar (2000:131-132), Rumus yang dapat digunakan secara sederhana untuk menentukan prosentase tabel frekuensi dan prosentase adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{f}{k} \times 100$$

Keterangan :

n	=	jumlah populasi
f	=	frekuensi
k	=	katagori
100	=	% (prosentase)

Dari rumus di atas dapat digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi dari Jumlah Anak Usia Dini yang terlayani dan belum terlayani PAUD di Kecamatan Jebres sesuai katagori usia layanan melalui jalur Formal dan Non Formal sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini :

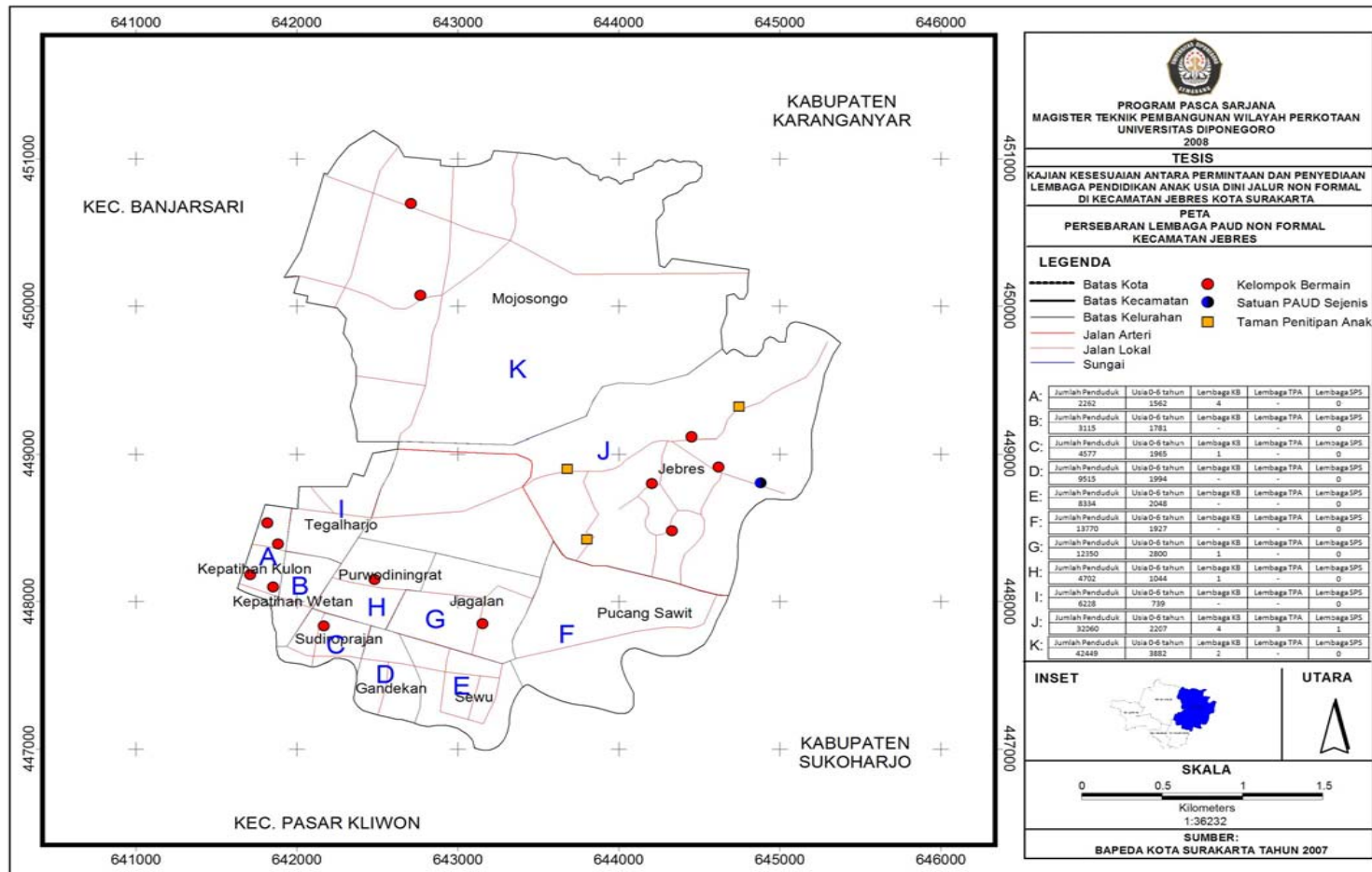
TABEL IV.1
DISTRIBUSI FREKUENSI ANAK USIA DINI (0-6 TAHUN)
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

NO.	KATEGORI	JUMLAH ANAK	%	% TIAP KATEGORI
1.	Anak Usia 0-5 tahun (Terlayani PAUD Non Formal): a. Kelompok Bermain b. Taman Penitipan Anak c. Satuan PAUD Sejenis (POSPAUD)	190 33 32	0,87 0,15 0,15	1.17
2.	Anak Usia 5-6 tahun (Terlayani PAUD Formal) : - Taman Kanak-Kanak	920	4,19	4.19
3.	Anak Usia Dini yang Belum terlayani PAUD - Usia 0-5 tahun - Usia 5-6 tahun	10.107 10.667	46,05 48,60	94.65
	JUMLAH	21.949	100	

Sumber : Penelitian, 2008

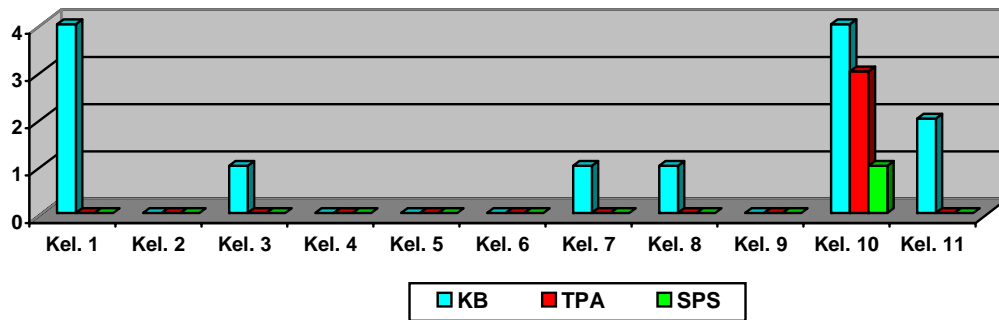
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sesungguhnya masih banyak jumlah anak usia di (0-6 tahun) di Kecamatan Jebres yang belum terlayani oleh program PAUD baik jalur Formal maupun Non Formal. Khususnya untuk jalur Non Formal, masih terdapat 46,05 % anak yang belum terlayani PAUD, sedangkan yang sudah terlayani dalam 3 bentuk layanan PAUD Non Formal hanya sebesar 1,17 % saja. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi kalangan pendidik, masyarakat maupun pemerintah setempat.

Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam mengenai penyebab rendahnya partisipasi anak usia dini dalam keikutsertaannya dalam program PAUD Non Formal. Sedangkan untuk mengetahui dimana saja letak lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres agar mengetahui pola sebarannya, di bawah ini adalah peta Kecamatan Jebres dengan titik-titik letak lembaga PAUD Non Formal yang berada di beberapa wilayah Kelurahan :



GAMBAR 4.2
PETA PERSEBARAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

Dari Peta di atas dapat diketahui bahwa letak lokasi lembaga PAUD Non Formal memang belum merata di tiap-tiap kelurahan. Satu-satunya Kelurahan yang mempunyai lembaga PAUD Non Formal dalam 3 bentuk layanan adalah wilayah Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres yaitu 4 lembaga Kelompok Bermain, 3 lembaga Taman Penitipan Anak dan 1 lembaga POSPAUD (data tahun 2006). Ketidakmerataan persebaran lembaga PAUD Non Formal di tiap-tiap Kelurahan juga dapat dilihat dalam diagram berikut ini :



Sumber : Penelitian, 2008

Keterangan : Kel. 1 = Kel. Kepatihan Kulon
 Kel. 2 = Kel. Kepatihan Wetan
 Kel. 3 = Kel. Sudiroprajan
 Kel. 4 = Kel. Gandekan
 Kel. 5 = Kel. Sewu
 Kel. 6 = Kel. Pucangsawit
 Kel. 7 = Kel. Jagalan
 Kel. 8 = Kel. Purwodiningratan
 Kel. 9 = Kel. Tegalharjo
 Kel. 10 = Kel. Jebres
 Kel. 11 = Kel. Mojosongo

GAMBAR 4.3
DIAGRAM BALOK KETERSEDIAAN LEMBAGA
PAUD JALUR NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

Dalam diagram di atas lebih jelas terlihat ketimpangan jumlah lembaga PAUD Non Formal antar Kelurahan yang menunjukkan bahwa program PAUD Non Formal ini belum merata dalam wilayah Kecamatan Jebres.

Terdapat 1 Kelurahan yaitu Kelurahan Jebres terlihat bahwa layanan PAUD Non Formal dalam 3 bentuk layanan yaitu Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan POSPAUD semuanya tersedia di wilayah ini. Hal ini menjadi perhatian khusus bahwa memang di wilayah Kelurahan Jebres selain sebagai pintu gerbang Kota Surakarta sebelah Timur, juga menjadi pusat pendidikan dengan dibangunnya “SOLO TECNO PARK” sebagai wujud Solo Kota Vokasi. Kekhususan ini menjadi nilai lebih dari wilayah Kelurahan ini.

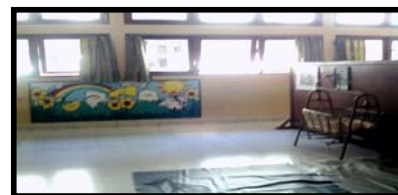
Seperti halnya lembaga PAUD Non Formal yang berbentuk Taman Penitipan Anak (TPA) yang berjumlah 3 lembaga yaitu : TPA “PERMATA HATI”, TPA “YPAB” dan TPA “PONDOK ASI”, kesemuanya berada di wilayah Kelurahan Jebres. TPA “PERMATA HATI” adalah milik RSUD Dr. Muwardi dengan pengelola Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Namun peruntukkan anggota TPA adalah untuk umum. TPA “YPAB” adalah milik Yayasan YPAB (Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi terlantar) dimana sistem penitipan di dalam TPA ini seperti panti asuhan. TPA YPAB ini berdiri di bawah naungan Depsos, karena aktifitas dari TPA ini adalah hanya tempat penitipan bagi anak-anak terlantar yang tidak diketahui orang tuanya atau berasal dari orang tua yang tidak mampu memelihara anaknya. Namun di sana juga terdapat sarana dan prasarana bermain yang sama dengan standar minimal sebuah TPA. Sedangkan TPA “PONDOK ASI” yang berlokasi di dalam lingkup kampus UNS (Universitas Sebelas Maret Surakarta) merupakan fasilitas penitipan anak bagi Dosen , Karyawan dan Mahasiswa UNS yang masih mempunyai Balita. Gambaran mengenai ketiga TPA di atas dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Lokasi TPA "YPAB", anak-anak anggota TPA dan APE outdoor



Lokasi TPA "PERMATA HATI" dan fasilitasnya



Kegiatan di TPA "PONDOK ASI" dan fasilitasnya

Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2008

GAMBAR 4.4
LOKASI TPA DAN KEGIATANNYA

Selain bentuk Kelompok Bermain dan TPA, bentuk layanan PAUD Non Formal yang juga berlokasi di wilayah Kelurahan Jebres adalah POSPAUD, dimana lembaga ini merupakan produk percontohan. Karena konsep POSPAUD baru dalam taraf sosialisasi dan program POSPAUD ini adalah mengintegrasikan antara kegiatan Posyandu dengan kegiatan PAUD Non Formal pada umumnya, sehingga disamping mendapatkan layanan kesehatan juga mendapatkan pelajaran untuk anak sesuai usianya dengan dibawah pengawasan pendidik ataupun pengasuh yang biasanya diambil dari kader-kader PKK setempat.

Ketimpangan antara wilayah Kelurahan satu dengan yang lain di wilayah Kecamatan Jebres dalam hal ketersediaan lembaga PAUD Non Formal sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Daya dukung masyarakat setempat, masyarakat pengguna jasa PAUD Non Formal, Pengelola PAUD Non Formal maupun daya dukung dari Pemerintah Kota setempat adalah yang paling utama dalam mempengaruhi pola sebaran lembaga PAUD Non Formal yang tidak merata di Kecamatan Jebres. Kondisi tersebut diperparah dengan kenyataan dari hasil observasi lapangan, didapat data bahwa anak-anak didik dari berbagai lembaga PAUD Non Formal tersebut ternyata mayoritas berdomisili jauh dari lokasi lembaga PAUD Non Formal yang mereka ikuti, yaitu rata-rata berjarak antara 1 – 3 Km dari lokasi tempat tinggal mereka, bahkan ada beberapa anak didik yang bertempat tinggal lebih dari 3 Km dari lokasi PAUD Non Formal. Hal ini bisa dilihat dari rekap data pada tabel IV.2 yang di dapat dari hasil survey untuk mengetahui jangkauan pelayanan dari lembaga-lembaga PAUD Non Formal tersebut.

TABEL IV.2
DATA JARAK RUMAH DENGAN LOKASI
LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

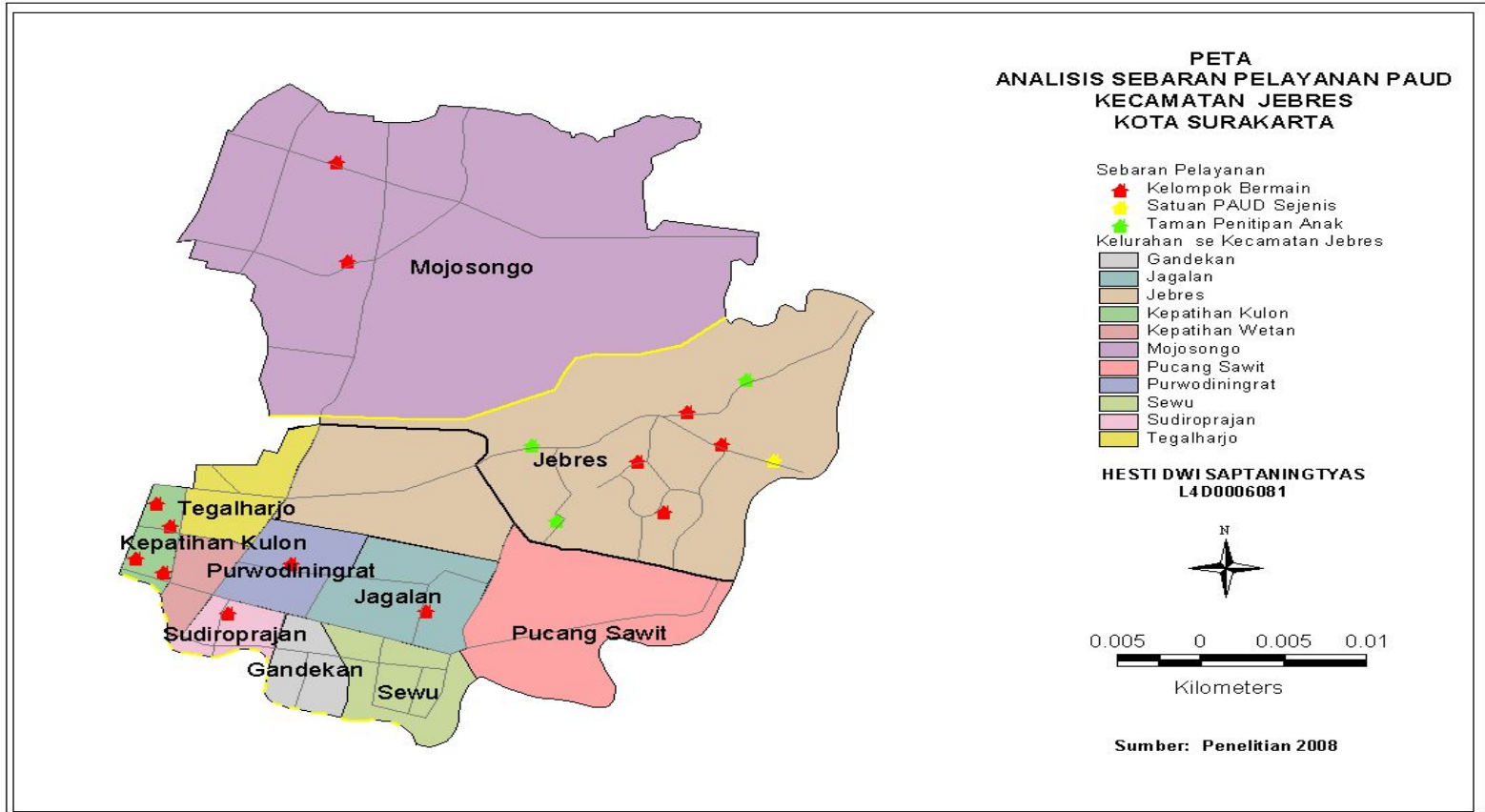
NO.	NAMA PAUD	ALAMAT	JML ANAK DIDIK	JARAK RUMAH DENGAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL			
				< 500 m	500 m s/d 1 Km	1 s/d 3 Km	> 3 Km
1	KB "INDAH"	Kepatihan Kulon Rt 7/1 Kel. Kepatihan Kulon	12	2	2	7	1
2	KB "SMART PRESCHOOL"	Jl. AR Hakim 80 Kel. Kepatihan Kulon	19	0	1	10	8
3	KB "BETA"	Jl. Arifin 54 Kel. Kepatihan Kulon	10	0	1	6	3
4	KB "PUTRA BANGSA"	Kepatihan Kulon 02/VI Kel. Kepatihan Kulon	11	0	2	9	0
5	KB "WARGA"	Jl. Ir. Juanda 72 Kel. Sudiroprajan	12	0	3	9	0
6	KB "HARAPAN BANGSA"	Sorogenen Rt 05/V Kel. Jagalan	12	0	0	12	0
7	KB "MESEN"	Jl. Surya No 67 Kel. Purwodiningratan	10	0	0	4	6
8	KB "PELANGI CERIA"	Jl. Guruh 26 Ngasinan Kel. Jebres	13	1	1	9	2
9	KB "PERMATA HATI"	Jl. Petoran Rt 03/ IX Kel. Jebres	16	0	1	12	3
10	KB "LAILY"	Guwosari 22 RW 30 Kel. Jebres	20	0	3	16	1
11	KB "BINA WIDYA"	Jl. Cokroaminoto 18 Kel. Jebres	17	0	1	13	3
12	KB "BUDI KARYA"	Jl. Malabar Raya 8 Kel. Mojosongo	16	0	0	16	0
13	KB "SRI JUWITA HANUM"	Jl. Let Jend Sutoyo 133 Kel. Mojosongo	22	0	1	19	3
14	TPA "Y P A B"	Jl. Purwoprajan 20 Kel. Jebres	12	0	0	0	12
15	TPA "PERMATA HATI"	Jl. Kol. Sutarto 50 Kel. Jebres	10	0	0	7	3
16	TPA "PONDOK ASI"	Kompleks Kampus UNS Kel. Jebres	11	0	0	0	11
17	POSPAUD "PUSPARINI"	Gulon Rt 05/ 20 Kel. Jebres	32	18	14	0	0
JUMLAH			255	20	30	149	56

Sumber : Penelitian, 2008

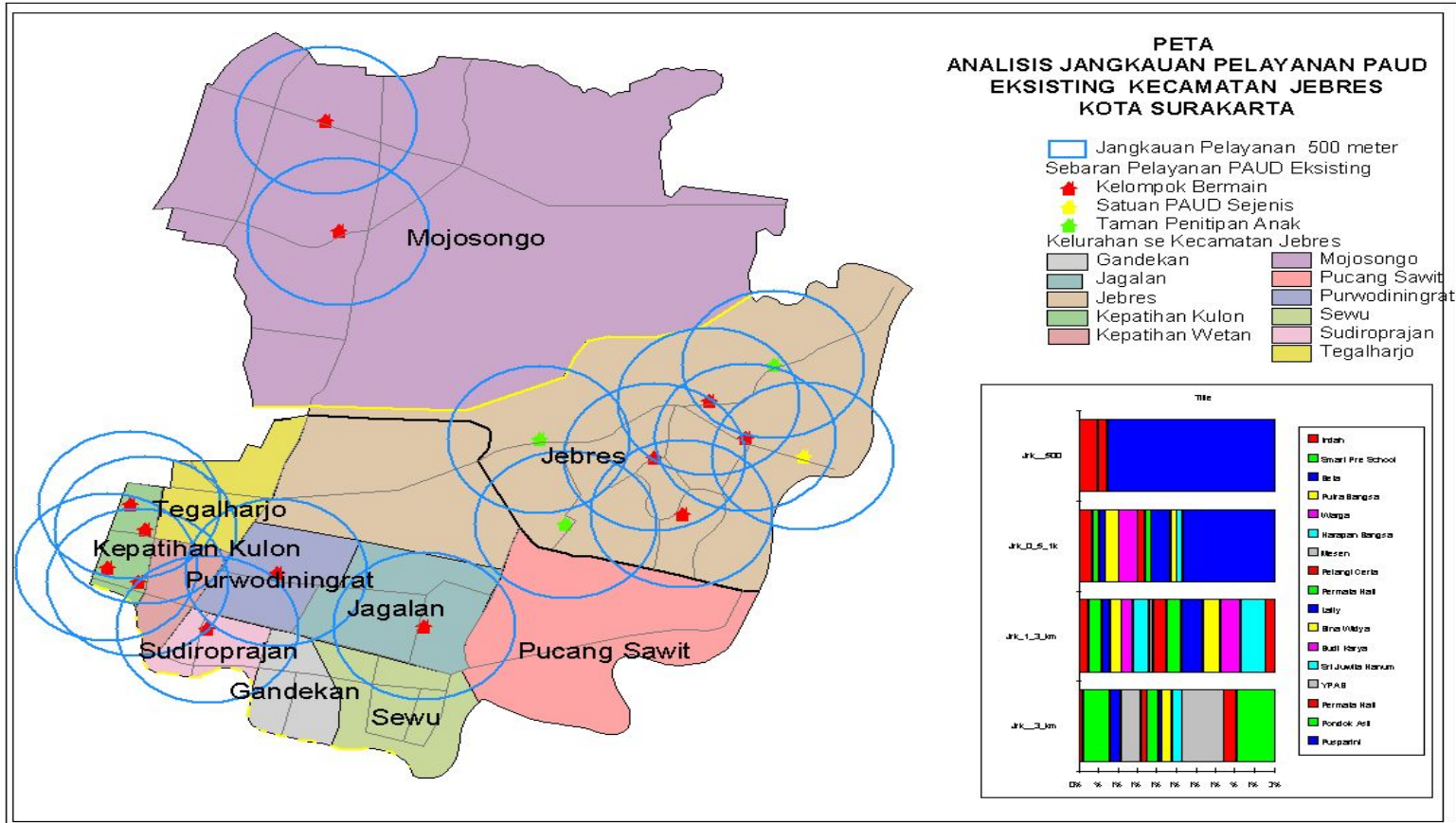
Dari tabel di atas diketahui bahwa anak didik yang rumahnya berjarak antara 1 – 3 Km dari lokasi PAUD Non Formal adalah yang paling banyak jumlahnya (58,43 %), jumlah terbanyak kedua yaitu yang berjarak lebih dari 3 Km (21,57 %), kemudian yang berjarak antara 500 m s/d 3 Km sebanyak (11,76 %) dan yang terkecil jumlahnya yaitu yang berjarak paling dekat dengan lokasi PAUD Non Formal (7,84 %). Untuk golongan terakhir ini sebenarnya golongan yang paling ideal untuk ukuran jarak jangkau atau jangkauan pelayanan lembaga PAUD Non Formal terhadap sasaran didik sesuai pada Standar Nasional Indonesia yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya.

Dari jumlah 7,84 % jarak ideal tersebut, 90 % nya adalah anak didik dari lembaga POSPAUD. Hal ini sangat dimaklumi karena program POSPAUD memang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan peserta Posyandu, sehingga semua anggota POSPAUD adalah masyarakat dalam lingkup satu wilayah RW setempat.

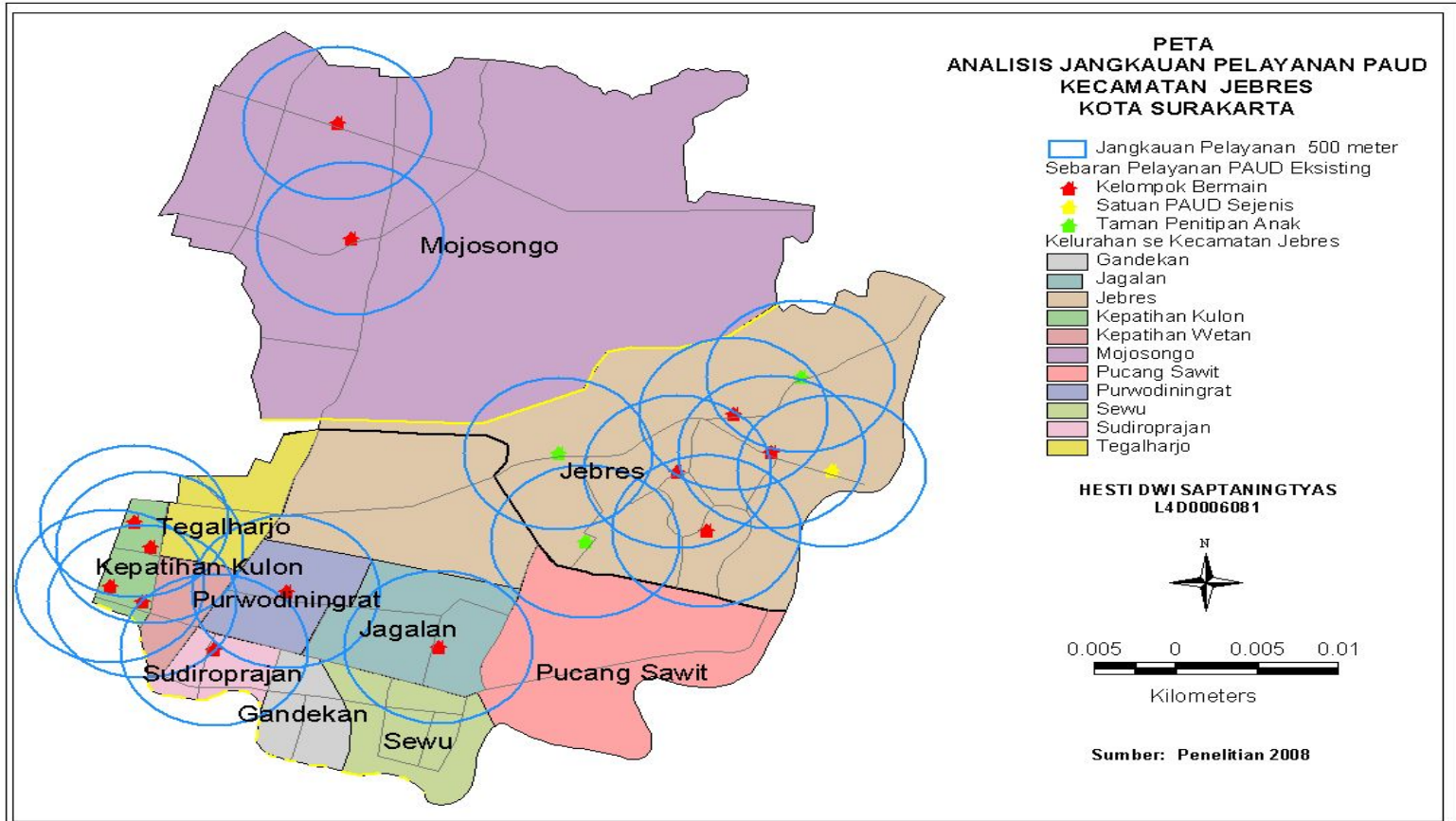
Jangkauan pelayanan Lembaga PAUD Non Formal tersebut dapat digambarkan lebih jelas lagi dalam Peta Jangkauan Pelayanan yang merupakan hasil overlay dari sebaran lokasi lembaga PAUD Non Formal yang ada dengan kondisi eksisting domisili rumah anak didik yang menjadi peserta didik dalam lembaga tersebut. Adapun Petanya adalah sebagai berikut :



**GAMBAR 4.5
PETA ANALISIS SEBARAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA**



**GAMBAR 4.6
PETA ANALISIS JANGKAUAN PELAYANAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL EKSISTING
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA**



**GAMBAR 4.7
PETA ANALISIS JANGKAUAN PELAYANAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA**

Ketidakmerataan sebaran lembaga PAUD Non Formal juga dipengaruhi oleh bagaimana daya dukung masyarakat, pengelola PAUD Non Formal serta Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaraan program PAUD Non Formal di Kota Surakarta. Untuk itu perlu dikaji mengenai hal tersebut agar diketahui kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal.

4.2.1 Daya Dukung Masyarakat di bidang PAUD Non Formal

Masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu kategori masyarakat umum yang mempunyai anak usia dini dan masyarakat selaku orang tua murid. Hal ini dilakukan untuk lebih mengetahui bagaimana masyarakat tersebut mempunyai akses dalam penyelenggaraan program PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres.

Orang tua selaku pemegang peran utama dan pertama dalam pendidikan anak-anaknya menempati posisi paling kuat dalam menentukan keberhasilan pendidikan anak terutama pendidikan bagi anak usia dini. Karena dari orang tualah seorang anak pertama kali mengenal dunia. Melalui merekalah anak dapat mengembangkan seluruh aspek pribadinya.

Menurut Rahman (2002: 96-99) peran penting orang tua adalah sebagai : guru pertama dan utama bagi anaknya, pelindung utama bagi anak, sumber kehidupan bagi anak, tempat bergantung bagi anak dan sumber kebahagiaan bagi anak.

Meninjau peran orang tua tersebut, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daya dukung orang tua murid terhadap pengembangan

pendidikan anak usia dini sangatlah besar. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sebagian besar orang tua murid sangat mendukung program PAUD Non Formal. Dukungan ini dapat berwujud antara lain motivasi yang besar untuk mengikutsertakan anaknya dalam program PAUD Non Formal, kesediaan menanggung sebagian dana pendidikan dengan penuh kesadaran dan keterlibatan orang tua murid dalam setiap rapat rutin dengan pengelola dan pendidikan PAUD Non Formal.

Sedangkan masyarakat umum yang menjadi responden adalah masyarakat yang mewakili tiap-tiap Kelurahan yang kesemuanya berjumlah 66 orang. Kesimpulan dari hasil survei dan wawancara dengan responden menyebutkan bahwa dukungan masyarakat kelompok ini terhadap keberadaan lembaga PAUD Non Formal sangat rendah, terbukti dengan kekurangpahaman mereka akan program PAUD itu sendiri, terutama program PAUD Non Formal, karena yang mereka ketahui adalah pendidikan pra sekolah adalah pendidikan Taman Kanak-Kanak dan menganggap bahwa PAUD Non Formal terutama Kelompok Bermain hanyalah pengisi waktu luang mengajak anak-anak bermain dalam satu kelompok. Selain itu anggapan bahwa PAUD Non Formal hanyalah diperuntukkan bagi masyarakat yang mampu saja sangat mendominasi persepsi mereka. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat umum atau masyarakat awam di wilayah Kecamatan Jebres dapat dikatakan sangat rendah pemahaman mereka terhadap arti pentingnya pendidikan anak usia dini.

Untuk lebih mengetahui prosentase masing-masing indikator tersebut di atas akan lebih jelas apabila dituangkan dalam satu daftar distribusi frekuensi seperti pada tabel berikut ini :

TABEL IV.3
DISTRIBUSI FREKUENSI
DAYA DUKUNG MASYARAKAT (UMUM)

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
A.	DATA UMUM	66		
	1. Usia			
	- Umur 20-30 tahun		28	42,42
	- Umur 31-40 tahun		38	57,58
	- Umur 41-50 tahun		0	0
	- Umur > 50 tahun		0	0
	2. Pendidikan Akhir			
	- D3/ Perguruan Tinggi		16	24,24
	- SLTA		50	75,76
	- SLTP		0	0
	- SD		0	0
	3. Pekerjaan			
	- PNS/ ABRI		4	6,06
	- Pensiunan		0	0
	- Pegawai Swasta		11	16,67
	- Buruh pabrik/ bangunan		25	37,88
	- Pedagang		10	15,15
	- Wiraswasta		13	19,70
	- Lain-lain		3	4,55
	4. Pendapatan Rata-Rata			
	- < Rp. 500.000,-		36	54,56
	- Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-		24	36,36
	- Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-		6	9,09
	- > Rp. 1.500.000,-		0	0
B.	PEMAHAMAN PAUD	66		
	1. - PAUD Formal dan Non Formal sama-sama penting		0	0
	- Lebih penting PAUD Formal		55	83,33
	- Lebih penting PAUD Non Formal		0	0
	- Biasa-biasa saja		11	16,67

dilanjutkan ke halaman 111

Lanjutan

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
	2. – PAUD sangat bagus - PAUD cukup bagus - PAUD biasa-biasa saja - PAUD kurang bagus		55 0 11 0	83,33 0 16,67 0
C.	PENGETAHUAN TENTANG PAUD NON FORMAL	66		
	1. PAUD Non Formal untuk anak usia 0-6 perlu atau tidak : - sangat perlu - cukup perlu - tidak perlu - sangat tidak perlu		3 52 11 0	4,55 78,79 16,67 0
	2. Kondisi umum PAUD Non Formal : - sangat bagus - cukup bagus - kurang bagus - sangat tidak bagus		3 15 43 5	4,55 22,73 65,15 7,58
	3. Respon bila lembaga PAUD Non Formal didirikan dekat rumah : - sangat senang sekali - cukup senang - biasa-biasa saja - kurang senang		0 46 16 4	0 69,70 24,24 6,06
	4. Persepsi tentang peruntukkan lembaga PAUD Non Formal : - untuk masyarakat mampu saja - mayoritas untuk masyarakat mampu, sedikit untuk masyarakat tak mampu - mayoritas untuk masyarakat tak mampu, sedikit untuk masyarakat mampu - perbandingan keduanya sama		21 43 0 2	31,82 65,15 0 3,03
D.	DUKUNGAN TERHADAP KEBERADAAN PAUD NON FORMAL	66		
	1. Pendapat tentang penyelenggara lembaga PAUD Non Formal : - siapa saja boleh - murni Pemkot - murni swadaya masyarakat - pemerintah dan masyarakat		1 53 1 11	1,52 80,30 1,52 16,67

dilanjutkan ke halaman 112

Lanjutan

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
	2. Peran dan wujud dukungan terhadap keberadaan lembaga PAUD Non Formal:			
	- Dana		4	6,06
	- Usulan, kritik dan saran		17	25,76
	- Penyediaan sarana dan prasarana		14	21,21
	- Dukungan pengawasan		15	22,73
	- Semua wujud dukungan di atas		5	7,58
	- Acuh tak acuh dan tidak peduli		11	16,67

Sumber : Penelitian, 2008

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 55 orang responden dari unsur masyarakat umum mengaku paham akan arti pentingnya PAUD dan merasa bahwa program PAUD merupakan program yang sangat bagus (83,33%). Namun dalam kenyataannya program PAUD yang mereka pahami adalah PAUD yang berada di jalur Formal yaitu Taman Kanak-Kanak. Walaupun 52 orang menyadari bahwa PAUD Non Formal merupakan program pendidikan yang cukup diperlukan bagi anak-anak usia 0-6 tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa persepsi dasar dari mereka menganggap bahwa program PAUD Non Formal adalah diperuntukkan mayoritas bagi masyarakat yang mampu (65,15 %).

Sedangkan pendapat tentang kondisi umum sarana dan prasarana lembaga PAUD Non Formal menyebutkan bahwa sebanyak 65,15 % responden menilai bahwa kondisi yang ada masih kurang bagus. Menurut hasil wawancara dengan sebagian responden, dikatakan bahwa kondisi lembaga PAUD Non Formal yang menurut mereka dalam kategori bagus dan berkualitas yaitu lembaga yang mempunyai lahan luas, mempunyai alat permainan / APE luar yang lengkap dan tertata rapi dengan setting taman yang asri, sehingga membuat anak-anak

nyaman untuk belajar sambil bermain di sana. Sedangkan untuk penataan ruang kelas juga harus tertata rapi dengan permainan indoor yang lengkap pula, serta ruangan kelas harus cukup ventilasi sehingga ada sirkulasi udara yang sejuk. Adapun letak lembaga PAUD Non Formal, sebagian besar responden berpendapat bahwa sebaiknya letak lokasi lembaga jauh dari jalan raya dan lebih dengan dengan taman atau pepohonan yang rindang, agar anak-anak didik dapat mengikuti kegiatan dengan aman dan tenang. Beberapa pendapat tersebut merupakan tolokukur kualitas lembaga PAUD Non Formal menurut sudut pandang masyarakat umum. Tentunya hal tersebut sangat sulit untuk diwujudkan karena masing-masing orang mempunyai sudut pandang yang berbeda apabila berbicara mengenai ukuran kualitas suatu lembaga pendidikan. Untuk itu menjadi suatu hal yang penting apabila keanekaragaman pendapat tersebut diakomodir dalam sebuah bentuk standarisasi pelayanan minimal lembaga pendidikan, agar menjadi acuan baku untuk menetapkan ukuran standar bagi sebuah lembaga pendidikan anak usia dini.

Dalam hal dukungan berupa dana, pemikiran, sarana dan prasarana yang dapat melibatkan mereka sebagai masyarakat pemerhati pendidikan anak, masih banyak yang berpendapat bahwa penyelenggara program PAUD Non Formal adalah Pemerintah Kota, sehingga segala pendanaan ditanggung oleh Pemerintah secara murni (80,30 %). Persepsi ini mengakibatkan dukungan murni dari masyarakat awam akan keberadaan lembaga PAUD Non Formal menjadi beragam, yaitu sebanyak 6.06 % setuju memberi dukungan berupa dana, sebanyak 25,76% mendukung secara lisan yaitu berujud usulan, kritik dan saran. Dukungan

katagori ini menduduki prosentase terbanyak karena masyarakat cenderung memberi dukungan tetapi tidak banyak mengeluarkan uang. Dukungan berupa sarana dan prasarana, baik yang berujud penyediaan lahan atau tempat untuk kegiatan PAUD Non Formal baik secara sewa maupun beli mencapai 21,21 %. Selain itu, sebanyak 22,73 % responden memilih memberikan dukungan berupa pengawasan terhadap kegiatan pembelajaran dalam lembaga PAUD Non Formal yang berada di wilayahnya, dengan maksud agar terjaga ketertiban dan keamanannya. Dari semua wujud dukungan tersebut, hanya 5 orang (7,58 %) yang menyetujui memberikan dukungan dari semua jenis dukungan di atas.

Selain responden dari unsur masyarakat umum, responden dari unsur masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga PAUD Non Formal dalam hal ini adalah orang tua murid juga diperlukan untuk mengetahui seberapa tinggi pemahaman dan motivasi mereka dalam hal PAUD Non Formal. Adapun berbagai pendapat tersebut terangkum dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

TABEL IV.4
DISTRIBUSI FREKUENSI
DAYA DUKUNG MASYARAKAT (ORANG TUA MURID)

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
A.	DATA UMUM	34		
	1. Usia : - Umur 20-30 tahun		21	61,76
	- Umur 31-40 tahun		13	38,24
	- Umur 41-50 tahun		0	0
	- Umur > 50 tahun		0	0
	2. Pendidikan Akhir:- D3/ PT		14	41,18
	- SLTA		17	50,00
	- SLTP		2	5,88
	- SD		1	2,94
	3. Pekerjaan :- PNS/ ABRI		2	5,88
	- Pensiunan		0	0
	- Pegawai Swasta		7	20,59
	- Buruh pabrik/ bangunan		9	26,47
	- Pedagang		3	8,82
	- Wiraswasta		12	35,29
	- Lain-lain		0	0
	4. Pendapatan Rata-Rata			
	- < Rp. 500.000,-		9	26,47
	- Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,-		19	55,88
	- Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.500.000,-		3	8,82
	- > Rp. 1.500.000,-		3	8,82
B.	PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN TENANG PAUD NON FORMAL	34		
	1. Alasan pentingnya PAUD			
	- masa emas bagi perkembangan otak anak		0	0
	- sebagai persiapan memasuki pendidikan dasar		0	0
	- keduanya benar		34	100
	- tidak tahu menahu		0	0
	2. Jarak tempuh ideal antara lembaga PAUD Non Formal dengan rumah			
	- < 1 Km		7	20,59
	- 1 – 2 Km		19	55,88
	- 2 – 3 Km		8	23,53
	- 3 – 4 Km		0	0
	- > 4 Km		0	0

dilanjutkan ke halaman 116

Lanjutan

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
	3. Kondisi sarana dan prasarana di lembaga PAUD Non Formal yang diikuti :			
	- sangat memenuhi kebutuhan		3	8,82
	- cukup memenuhi kebutuhan		12	35,29
	- kurang memenuhi kebutuhan		15	44,12
	- sangat memenuhi kebutuhan		4	11,76
	4. APE dalam lembaga PAUD Non Formal yang diikuti :			
	- sudah lengkap		2	5,88
	- belum lengkap		16	47,06
	- kurang lengkap		16	47,06
	- sangat kurang lengkap		0	0
	5. Sebaiknya kegiatan PAUD Non Formal dilaksanakan dalam seminggu :			
	- setiap hari		2	5,88
	- seminggu 4 kali		0	0
	- seminggu 3 kali		32	94,12
	- seminggu 1 kali		0	0
C.	MOTIVASI MENGIKUTI KEGIATAN PAUD NON FORMAL	34		
	1. Motivasi mengikuti kegiatan PAUD Non Formal :			
	- kemauan sendiri		22	64,71
	- anjuran Pemerintah		2	5,88
	- ikut-ikutan teman		3	8,82
	- dari pada anak main sendiri		7	20,59
	- alasan lain-lain		0	0
	2. Keuntungan setelah mengikuti kegiatan PAUD Non Formal :			
	- anak lebih pintar dan mandiri		0	0
	- permainan anak lebih terarah		0	0
	- anak lebih siap masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya		0	0
	- semuanya betul		34	100
	- alasan lain-lain		0	0

dilanjutkan ke halaman 117

Lanjutan

No.	Indikator	Jumlah (orang)	Frekuensi	%
	3. Pendapat tentang kewajiban mengikuti kegiatan PAUD sebelum masuk SD : - wajib - tidak wajib - tidak tahu menahu		24 4 6	70,59 11,76 17,65
D.	DUKUNGAN TERHADAP KEBERADAAN PAUD NON FORMAL	34		
	1. Pendapat tentang dukungan dana untuk kelangsungan belajar mengajar di lembaga PAUD Non Formal yang diikuti - memberi dana secara sukarela - mendukung dana karena kewajiban - tidak perlu mendukung dana - tidak mau mendukung dana karena tidak mampu		0 32 0 2	0 94,12 0 5,88
	2. Peran orang tua dalam setiap pertemuan rutin di lembaga PAUD Non Formal yang diikuti - selalu aktif memberi saran, kritik - mengikuti pertemuan tetapi pasif - tidak mengikuti pertemuan, keputusan terserah hasil rapat		32 0 2	94,12 0 5,88
	3. Wujud dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan PAUD Non Formal - bersedia menyediakan lahan untuk kegiatan belajar - bersedia menyediakan sendiri alat-alat tulis - tidak perlu menyediakan sarana / prasarana - ikut-ikutan yang lain		12 12 8 2	35,29 35,29 23,53 5,88
	4. Perlu tidaknya pengawasan terhadap kegiatan belajar mengajar dalam PAUD Non Formal yang diikuti - sangat perlu atas kesadaran sendiri - perlu apabila diminta - tidak perlu karena sudah menjadi tugas Pemerintah mengikuti suara terbanyak		32 0 0 2	94,12 0 0 5,88

Sumber : Penelitian, 2008

Dari tabel diatas, diketahui bahwa Responden yang berasal dari unsur masyarakat pengguna jasa PAUD Non Formal (Orang Tua Murid) kesemuanya (100 %) merasa memahami arti pentingnya PAUD bagi anak-anak mereka dan semua menyadari bahwa mengikutsertakan anaknya dalam lembaga PAUD Non Formal baik yang berbentuk KB, TPA maupun POSPAUD merupakan tempat anak belajar bersosialisasi dan melatih kecerdasan anak untuk mempersiapkan masuk pada jenjang Sekolah Dasar.

Sedangkan untuk dukungan berupa dana, pemikiran, sarana dan prasarana, terdapat 32 orang responden yang mengaku ikut terlibat dalam pengelolaan pendidikan di lembaga PAUD Non Formal yang mereka ikuti. Dukungan dana berupa biaya pendidikan yang secara rutin disetorkan ke lembaga PAUD Non Formal untuk keperluan operasional kegiatan belajar mengajar. Hanya 2 orang yang merasa keberatan dengan hal tersebut dengan alasan karena ekonomi lemah. Demikian pula dengan dukungan berupa pemikiran. Pada waktu-waktu tertentu, lembaga PAUD Non Formal mengadakan pertemuan secara rutin antara pengelola, pendidik dengan para orang tua. Di sinilah segala usulan dan pemikiran para orang tua murid dapat menjadi masukan bagi para pengelola PAUD Non Formal. Sedangkan untuk dukungan berupa sarana prasarana, para orang tua murid (32 orang) mengaku bersedia menyediakan sendiri peralatan pendidikan seperti alat tulis dan peralatan lainnya termasuk alat permainan apabila dibutuhkan, walaupun mereka juga mengharapkan adanya bantuan dari Pemerintah Kota setempat dalam hal sarana dan prasarana belajar. Dalam hal pengawasan, secara otomatis orang tua murid melakukan pengawasan terhadap

proses belajar mengajar dalam penyelenggaraan PAUD Non Formal dengan tujuan anak mereka mendapatkan pelayanan pendidikan yang tepat di lembaga tersebut.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang tua murid, didapat suatu pendapat bahwa rata-rata dari mereka menginginkan sebuah lembaga PAUD Non Formal yang mempunyai APE yang lengkap, alat tulis yang lengkap dan sarana pendukung berupa kamar mandi, ruang kesehatan dan ruang bimbingan khusus untuk anak dan orang tua murid yang mempunyai masalah khusus. Para orang tua murid bersedia memberikan dukungan apapun bagi lembaga PAUD Non Formal selama segala dukungan tersebut berdampak positif bagi anak-anak mereka, yaitu berupa kenyamanan, keterampilan dan kecerdasan.

4.2.2 Daya Dukung Pengelola PAUD Non Formal

Pengelola PAUD Non Formal adalah mereka yang menyediakan dan menyelenggarakan program-program PAUD bagi masyarakat. Pengelola satuan PAUD adalah tenaga yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kelembagaan satuan pendidikan anak usia dini/ program PAUD dalam rangka menunjang proses pengasuhan dan pembelajaran anak usia dini yang menjadi tanggungjawabnya. (Dirjend PLSP Depdiknas, Semiloka PAUD tgl. 10-12 September 2003:21)

Lembaga PAUD Non Formal yang ada di Kecamatan Jebres mayoritas adalah milik sebuah Yayasan ataupun perorangan, yaitu dari 13 Kelompok Bermain sebanyak 8 lembaga adalah milik pribadi dan selebihnya adalah milik

yayasan/ lembaga sosial. Dan 3 buah Taman Penitipan Anak kesemuanya adalah milik lembaga / instansi/ organisasi. Sedangkan 1 buah Satuan PAUD Sejenis yang disebut POS PAUD dikelola oleh Kelompok PKK RW.

Kesemua lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres menggunakan biaya operasional untuk kegiatan pendidikan yang bersumber dari 3 unsur, yaitu Swadaya lembaga, Pemerintah dan Orang Tua murid, hanya POSPAUD saja yang tidak melibatkan orang tua murid yaitu hanya menggunakan dana dari swadaya dan pemerintah. Hal ini dikarenakan lembaga ini merupakan program terbaru yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, sehingga hanya mengandalkan dana dari organisasi dan pemerintah saja.

Secara lengkap dukungan oleh Pengelola PAUD Non Formal tersebut dapat dituangkan dalam tabel IV.5

TABEL IV.5
DISTRIBUSI FREKUENSI
DAYA DUKUNG PENGELOLA PAUD NON FORMAL

NO.	INDIKATOR	JUMLAH RESPONDEN (lembaga)	FREKUENSI (lembaga)	%
1.	PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN :	13		
	Data Umum :			
	1. Umur			
	- Umur 20-30 tahun		2	15,38
	- Umur 31-40 tahun		7	53,85
	- Umur 41-50 tahun		3	23,08
	- Umur > 50 tahun		1	7,69
	2. Pendidikan Akhir			
	- D3/ Perguruan Tinggi		1	7,69
	- SLTA		12	92,31
	- SLTP		0	0
	- SD		0	0
	Data Lembaga :			
	1. Status Kepemilikan Lembaga:			
	- milik Pribadi		8	61,54
	- milik Yayasan/ Swasta		5	38,46
	- milik Pemerintah		0	0
	- milik Pribadi/ Yayasan & Pemerintah		0	0
	2. Biaya operasional pendidikan :			
	- swadaya lembaga		0	0
	- swadaya dan Pemerintah		0	0
	- murni bantuan Pemerintah		0	0
	- swadaya lembaga, orang tua dan Pemerintah		13	100
	3. Pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga :			
	- sangat responsif		0	0
	- cukup responsif		8	51,54
	- kurang responsif		5	38,46
	- acuh tak acuh		0	0
	4. Tingkat kesulitan perekrutan anak didik :			
	- sangat sulit		0	0
	- cukup sulit		5	38,46
	- biasa-biasa saja		5	38,46
	- tidak menemui kesulitan		3	23,08
	5. Sosialisasi program pendidikan :			
	- aktif lewat pertemuan ormas		13	100
	- aktif lewat iklan dan brosur		10	79,92
	- pasif		0	0.

dilanjutkan ke halaman 122

lanjutan

NO.	INDIKATOR	JUMLAH RESPONDEN (lembaga)	FREKUENSI (lembaga)	%
	6. Fasilitas dan Pelayanan di Lembaga : - lengkap sesuai standar baku - standar minimal - apa adanya		0 12 1	0 92,30 7,69
	7. Keterlibatan Lembaga dalam kegiatan di lingkungannya : - aktif - pasif		8 5	61,54 38,46
2.	PENGELOLA TAMAN PENITIPAN ANAK Data Umum : 1. Umur : - Umur 20-30 tahun - Umur 31-40 tahun - Umur 41-50 tahun - Umur > 50 tahun 2. Pendidikan Akhir: - D3/ Perguruan Tinggi - SLTA - SLTP - SD Data Lembaga : 1. Status Kepemilikan Lembaga: - milik Pribadi - milik Yayasan/ Swasta/Organisasi - milik Pemerintah - milik Pribadi/ Yayasan & Pemerintah 2. Biaya operasional pendidikan : - swadaya lembaga - swadaya dan Pemerintah - murni bantuan Pemerintah - swadaya lembaga, orang tua dan Pemerintah 3. Pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga : - sangat responsif - cukup responsif - kurang responsif - acuh tak acuh 4. Tingkat kesulitan perekrutan anak didik : - sangat sulit - cukup sulit - biasa-biasa saja - tidak menemui kesulitan 5. Sosialisasi program pendidikan : - aktif lewat pertemuan ormas - aktif lewat iklan dan brosur - pasif	3	0 0 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0	0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 66,67 33,33 0 0 0 100 0 0 0

dilanjutkan ke halaman 123

Lanjutan

NO.	INDIKATOR	JUMLAH RESPONDEN (lembaga)	FREKUENSI (lembaga)	%
	6. Fasilitas dan Pelayanan di Lembaga : - lengkap sesuai standar baku - standar minimal - apa adanya		0 1 2	0 33,33 66,67
	7. Keterlibatan Lembaga dalam kegiatan di lingkungannya : - Aktif - Pasif		0 3	0 100
3.	PENGELOLA POSPAUD Data Umum : 1. Umur - Umur 20-30 tahun - Umur 31-40 tahun - Umur 41-50 tahun - Umur > 50 tahun 2. Pendidikan Akhir - D3/ Perguruan Tinggi - SLTA - SLTP - SD Data Lembaga : 1. Status Kepemilikan Lembaga: - milik Pribadi - milik Yayasan/ Swasta/ Organisasi - milik Pemerintah - milik Pribadi/ Yayasan & Pemerintah 2. Biaya operasional pendidikan : - swadaya lembaga - swadaya dan Pemerintah - murni bantuan Pemerintah - swadaya lembaga, orang tua dan Pemerintah 3. Pandangan masyarakat terhadap keberadaan lembaga : - sangat responsif - cukup responsif - kurang responsif - acuh tak acuh 4. Tingkat kesulitan perekrutan anak didik : - sangat sulit - cukup sulit - biasa-biasa saja - tidak menemui kesulitan	1		
			1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0	100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0

dilanjutkan ke halaman 124

lanjutan

NO.	INDIKATOR	JUMLAH RESPONDEN (lembaga)	FREKUENSI (lembaga)	%
5.	Sosialisasi program pendidikan :			
	- aktif lewat pertemuan ormas		1	100
	- aktif lewat iklan dan brosur		0	0
6.	Fasilitas dan Pelayanan di Lembaga :			
	- lengkap sesuai standar baku		0	0
	- standar minimal		1	100
7.	Keterlibatan Lembaga dalam kegiatan di lingkungannya :			
	- apa adanya		0	0
	- aktif		1	100
	- Pasif		0	0

Sumber : *Penelitian, 2008.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 8 lembaga Kelompok Bermain merupakan milik pribadi dan sebanyak 5 lembaga adalah milik Yayasan/ Swasta. Dan tidak ada satu lembaga pun yang murni milik Pemerintah Kota Surakarta. Hal ini mempengaruhi pula pada biaya operasional pendidikan yang ternyata 100 % lembaga yang ada di Kecamatan Jebres mengelola lembaganya dengan biaya dari lembaga, orang tua murid dan bantuan Pemerintah.

Semua lembaga Kelompok Bermain yang mensosialisasikan program pendidikannya melalui pertemuan organisasi masyarakat (pertemuan RT, RW dan PKK) karena dinilai cara yang paling efektif untuk memperkenalkan program-program dari masing-masing lembaga. Sebanyak 10 lembaga diantaranya juga mensosialisasikan melalui penyebaran brosur / pamflet serta iklan di media massa. Hal ini dilakukan oleh lembaga yang mempunyai dana besar untuk itu. Sedangkan untuk fasilitas lembaga PAUD berupa sarana dan prasarana, secara rata-rata telah

memenuhi standar minimal penyediaan sarana dan prasarana terutama untuk APE luar dan APE dalam, walaupun kondisinya tidak semuanya dalam kondisi bagus.

Keberadaan lembaga Kelompok Bermain di tengah-tengah perkampungan membawa konsekuensi tersendiri yaitu dengan keterlibatan lembaga dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan sekitar lembaga, misalnya hajatan, perayaan HUT RI, maupun berbagai lomba yang diselenggarakan wilayah setempat. Sebanyak 8 lembaga Kelompok Bermain mengaku aktif terlibat dalam kegiatan-kegiatan dimaksud, mulai dari memberikan sumbangan dana, meminjamkan tempat, melibatkan anak didik dan pendidik dalam berbagai lomba dan lain sebagainya. Sedangkan 5 lembaga yang lain merasa tidak perlu aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, yang penting apabila diminta sumbangan dana akan ikut memberikan sumbangan sesuai kemampuan lembaga.

Layanan PAUD Non Formal dalam bentuk TPA telah sedikit disinggung di muka, bahwa dari ketiga lembaga TPA yang ada di Kecamatan Jebres, kesemuanya (100%) merupakan milik Instansi atau Organisasi dan mendanai dengan biaya organisasi, orang tua murid dan sedikit dana bantuan dari Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Sosialisasi program, ketiganya hanya mengandalkan lewat pertemuan-pertemuan rutin dalam organisasinya, misalnya pertemuan Dharma Wanita dan pertemuan intern Yayasan. Walaupun pendanaan dipikul dari tiga unsur yaitu lembaga, orang tua dan pemerintah, ternyata sarana dan prasarana yang dimiliki oleh ketiga TPA tersebut boleh dikatakan sangat minim, yaitu yang terdapat di TPA Permata Hati dan TPA YPAB. Kedua TPA

tersebut mengandalkan sarana permainan yang apa adanya dan belum memenuhi standar minimal pelayanan APE untuk TPA. Sedangkan TPA Pondok ASI lebih kelihatan lengkap perabot dan peralatan serta APE nya dan sudah memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini dimungkinkan karena TPA ini adalah binaan dari Dharma Wanita Persatuan Unit UNS yang berarti gabungan istri-istri dosen dan pejabat di lingkungan UNS, sehingga donatur yang memberikan dana untuk operasional lembaga ini lebih banyak dari pada donatur yang berada di TPA Permata Hati dan TPA YPAB.

Sedangkan keterlibatan ketiga TPA tersebut dengan kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya memang hanyalah bersifat pasif, mengingat letak lokasinya yang tidak membaur di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada keterlibatan lembaga hanyalah sebagai penyumbang dana apabila di lingkungannya mengadakan kegiatan-kegiatan tertentu. Hanya TPA YPAB saja yang letaknya di tengah perkampungan, namun karena sifat TPA ini sangat spesifik yaitu hanya untuk anak-anak terlantar, sehingga terisolir dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Sedangkan TPA Pondok ASI karena letaknya di tengah-tengah kampus sehingga tidak tersentuh oleh masyarakat luar tembok kampus. Dan TPA Permata Hati yang letaknya di pinggir jalan raya tidak pernah melibatkan diri dengan kegiatan masyarakat lingkungannya.

Yang terakhir adalah bentuk layanan POSPAUD, dimana hanya satu-satunya lembaga yang ada di Kecamatan Jebres. Lembaga POSPAUD ini menjadi pilihan yang tepat untuk layanan PAUD bagi keluarga yang kurang mampu untuk

membiyai anaknya mengikuti program PAUD Non Formal. Karena selain keberadaan lembaga ini berawal dari kegiatan Posyandu yang telah sangat dikenal di masyarakat Surakarta, juga sangat efektif apabila diintegrasikan dengan program PAUD agar anak-anak usia dini dari kalangan tidak mampu juga mendapatkan hak yang sama di bidang pendidikan selain juga mendapatkan layanan kesehatan. Khusus di wilayah Kecamatan Jebres, POSPAUD “PUSPARINI” dimotori oleh kader-kader Kelompok PKK setempat, sehingga menjadi hal yang mudah dalam mensosialisasikan program-program pendidikannya. Keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan juga tidak diragukan lagi, karena seolah tidak ada batas antara masyarakat dengan lembaga ini. Pendanaan berasal dari swadaya lembaga dan bantuan Pemerintah, namun porsi bantuan Pemerintah lebih besar dengan diwujudkan berupa uang ataupun APE, sehingga APE dalam POSPAUD ini telah sesuai dengan standar minimal

4.2.3 Daya Dukung Pemerintah Kota Surakarta dibidang PAUD Non Formal

Pada dasarnya masyarakat Kota Surakarta pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Jebres pada khususnya telah mempunyai minat di bidang PAUD Non Formal, namun karena terkendala masalah ekonomi seperti yang telah diuraikan sebelumnya serta melihat kenyataan bahwa lembaga PAUD Non Formal yang ada mayoritas adalah lembaga swasta yang berarti mengedepankan bisnis dari pada kepentingan sosial (*business oriented*), sehingga membuat masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah kurang tersentuh Program PAUD Non Formal ini.

Untuk mengantisipasi hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta menggalakkan program POSPAUD yaitu salah satu bentuk lembaga PAUD Non Formal yang diintegrasikan dengan POSYANDU Balita. Program ini dimotori oleh Tim Penggerak PKK dari tingkat Kota sampai ke Kelompok PKK tingkat RT dan RW dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok Posyandu Balita yang telah tersebar di tiap-tiap RW.

Maksud dari digalakkannya POS PAUD ini adalah agar anak-anak Balita yang juga merupakan anak usia dini yang secara rutin mengunjungi Posyandu lebih dikenalkan dengan program kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan konsep belajar sambil bermain dan pemeriksaan kesehatan. Terbukti hal ini lebih efektif mengena pada sasaran karena orang tua anak usia dini lebih mendapatkan keuntungan beragam. Namun program ini baru dalam tahap sosialisasi di 5 wilayah Kecamatan di Kota Surakarta. Untuk Wilayah Kecamatan Jebres baru dalam program rintisan dan uji coba, yaitu yang berlokasi di POSPAUD “PUSPARINI” Kelurahan Jebres. Walaupun fasilitas yang ada yaitu berupa APE (Alat Permainan Edukatif) masih dikatagorikan sederhana, namun semangat para orang tua dan masyarakat terutama para pengurus dan pengelolanya menunjukkan bahwa program POSPAUD ini akan menjadi program andalan yang akan terus digalakkan di Kota Surakarta.



Lokasi POS PAUD "PUSPA RINI"



APE indoor dan outdoor di POS PAUD "PUSPARINI"

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2008

GAMBAR 4.8
LOKASI POS PAUD "PUSPARINI"
KELURAHAN JEBRES SURAKARTA

Pemerintah Kota Surakarta juga sudah memberikan dukungan di bidang PAUD Non Formal yaitu berupa block grant untuk Rintisan Program yaitu untuk calon pendiri lembaga PAUD Non Formal dan Dana Pengembangan

Kelembagaan yang diperuntukkan bagi lembaga PAUD Non Formal yang telah berdiri dan ingin lebih mengembangkan lagi lembaganya baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu juga terdapat bantuan dana untuk APE (Alat Permainan Edukatif). Dukungan berupa dana tersebut tentunya melalui suatu prosedur yang ketat dan melalui penilaian kelayakan yang ditentukan oleh tim penilai khusus.

Demi mendukung berjalannya kegiatan program PAUD Non Formal, Pemerintah Kota Surakarta juga sudah membentuk sebuah FORUM PAUD yaitu suatu lembaga yang menjadi wadah untuk menyatukan visi, misi, langkah dan peran masing-masing anggota dalam rangka pengembangan anak usia dini seutuhnya. Forum ini berupaya memprakarsai, menjembatani dan mendorong terwujudnya layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara utuh. Adapun anggota Forum PAUD ini terdiri dari unsur pakar, tokoh masyarakat, peneliti, akademisi, birokrat, LSM di bidang anak, medis dan lain-lain.

Berbagai dukungan Pemerintah Kota Surakarta dalam mengembangkan program PAUD Non Formal di Kota Surakarta, dapat dirinci dalam beberapa indikator sebagai berikut :

TABEL IV.6
DAYA DUKUNG PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DI BIDANG PAUD NON FORMAL
TAHUN 2006

NO.	INDIKATOR	BENTUK DUKUNGAN	IMPLEMENTASI
A.	ALOKASI DANA UNTUK PAUD : - APBD 2 : 1. Perintisan lembaga PAUD 2. Pengembangan Kelembagaan 3. Bantuan APE	Rp.10.000.000,-/ Lbg Rp. 1.500.000,-/Lbg 1 Set / Lbg	Dirintis 5 lbg KB Terbantu 10 lbg Dialokasikan 5 lbg
B.	KETENAGAAN - Peningkatan kualitas Pendidik dan tenaga Kependidikan : - Mengadakan Pelatihan Bagi Tenaga Pendidik dan Pengelola PAUD - Memfasilitasi organisasi HIMPAUDI (Himpunan Pengelola dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini Indonesia) - Memberdayakan Penilik PAUD di tiap-tiap Kecamatan	Mengadakan Pelatihan dalam 1 tahun = 2 angkatan Beranggotakan Tenaga Pendidik dan Pengelola PAUD se Kota Surakarta Terdapat 5 orang Penilik PAUD untuk 5 wilayah Kecamatan	Terlatih 30 orang / angkatan dengan materi BCCT (Beyond Centre and Circle Time) Aktif mengadakan kegiatan-kegiatan tingkat Kota Sebagai pembina teknis di tingkat Kecamatan
C.	SOSIALISASI PAUD : - Media Cetak - Media Elektronik - Menyelenggarakan peringatan Hari Anak Indonesia	1 th sekali	Menyelenggarakan berbagai jenis lomba
D.	SARANA / PRASARANA : - Penyediaan Lahan - Bantuan Buku Materi	Menyediakan lahan untuk PUSAT PAUD Materi Pelatihan	Bersifat wacana
E.	PEMBERDAYAAN LSM/ ORGANISASI SOSIAL : - Memberdayakan FORUM PAUD - Peningkatan kerjasama dengan lembaga-lembaga layanan anak usia dini (dengan Perguruan Tinggi)	Terbentuk FORUM PAUD	Kegiatannya masih pasif Belum terealisasi
E.	OPTIMALISASI PERAN DINAS / INSTANSI PENENTU KEBIJAKAN DI BIDANG PAUD : - BAPEDA - DINAS DIKPORA	Perencana bidang Pendidikan Pembina Teknis bidang Pendidikan	Belum bekerja secara optimal dalam hal PAUD Non Formal

Sumber : Hasil Interpretasi data, 2008

4.3 Analisis Kebijakan Pemerintah di Bidang PAUD Non Formal

Dalam melakukan analisis kebijakan Pemerintah Kota Surakarta di bidang Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal dilakukan dengan teknik *Analisis Deskriptif Normatif*. Teknik analisis ini digunakan untuk mengkaji kebutuhan dan permintaan lembaga PAUD Non Formal antara kondisi eksisting PAUD Non Formal dengan Standar Pendidikan yang telah baku diberlakukan dalam dunia pendidikan, baik perbandingan secara kualitatif maupun kuantitasnya. Standar yang menjadi pembanding yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Disamping itu juga membandingkan dengan Kebijakan yang diberlakukan Pemerintah Kota Surakarta di bidang PAUD Non Formal.

Dalam menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Surakarta, yang pertama dilakukan adalah dengan mengadakan penelaahan dokumen-dokumen yang ada di Dinas/ Instansi terkait yang menangani PAUD, kemudian melakukan wawancara langsung dengan para pejabat yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan pemerintah di bidang PAUD Non Formal, yaitu Badan Perencanaan Daerah/ BAPEDA (Kepala BAPEDA dan Kasi Sosial Budaya) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Kasubdin Pendidikan Masyarakat Pemuda dan Olahraga /Ka Subdin PMPO, Kasi Pendidikan dan Pengetahuan Dasar Subdin PMPO serta Kasi Perencanaan Subdin Bina Program).

4.3.1 Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Bentuk Dokumen

Satu-satunya dokumen yang merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini adalah dokumen perencanaan yang didapat dari Dinas Tata Kota dimana menurut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 8 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1993 – 2013 disebutkan bahwa Kota Surakarta memiliki 4 Wilayah Pembangunan (WP) yang terbagi dalam 10 Sub Wilayah Pembangunan (SWP) dengan masing-masing WP mempunyai prioritas pembangunan tersendiri, seperti halnya dalam wilayah Kecamatan Jebres yang termasuk dalam Wilayah Pembangunan Surakarta Bagian Timur dengan prioritas pembangunan di bidang Pendidikan.

Pembangunan suatu daerah yang terpadu menuntut adanya sistem perencanaan daerah yang mantap dan terarah, untuk itu diperlukan panduan/acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berupa perencanaan 5 (lima) tahunan dalam bentuk dokumen Renstra (Rencana Strategis Daerah). Renstra tersebut disusun berdasarkan serangkaian isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap perumusan suatu kebijakan pemerintahan suatu wilayah, seperti halnya Pemerintah Kota Surakarta. Dalam hubungannya dengan kebijakan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini tetap mengacu pada dokumen Propeda (Program Pembangunan Daerah) Kota Surakarta Tahun 2002-2004, bahwa prioritas suatu kegiatan yang telah direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta harus mengacu pada “Membangun Ketahanan Budaya” sebagai unsur perekat kehidupan masyarakat.

Terdapat 4 (empat) prioritas pembangunan Daerah di Kota Surakarta, yang meliputi :

1. Membangun Ketahanan Budaya sebagai unsur tempat perekat kehidupan masyarakat dengan komitmen Cinta Kota dan Mengembangkan Pariwisata Daerah.
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
 3. Mengembangkan dengan usaha sebagai ujung tombak untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan
 4. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
- (Dinas Dikpora, 2002:14)

Dari keempat prioritas pembangunan tersebut, yang menjadi acuan pengembangan program PAUD Non Formal di Kota Surakarta adalah pada prioritas urutan ke 2 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan penjabaran melalui sektor Pendidikan Luar Sekolah yaitu pada sub sektor Peningkatan usaha pendidikan anak usia dini. Sedangkan faktor penentu keberhasilan pada sektor tersebut yaitu melalui bidang Pendidikan Luar Sekolah dengan kegiatan perintisan dan pengembangan pendidikan anak usia dini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.7 :

TABEL IV. 7
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

No.	Tahapan Prioritas	Sektor	Sub Sektor	Faktor Penentu Keberhasilan
1.	Membangun Ketahanan Budaya sebagai unsur tempat perekat kehidupan masyarakat dengan komitmen Cinta Kota dan Mengembangkan Pariwisata Daerah.			
2.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Pendidikan Luar Sekolah	Peningkatan Usaha Pendidikan Anak Usia Dini	Merintis dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3.	Mengembangkan dengan usaha sebagai ujung tombak untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan.			
4.	Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.			

Sumber : Renstra Dinas Dikpora, 2002

Dalam tabel di atas memang sengaja hanya dipaparkan yang berhubungan dengan Pendidikan Anak Usia Dini saja, sehingga untuk data yang lain tidak ditampilkan agar lebih memudahkan untuk memahami data.

Selain itu perlu juga diketahui mengenai Program dan Prioritas Lima Tahunan Daerah khusus bidang pendidikan yang ditangani langsung oleh Dinas Dikpora Kota Surakarta yang tertuang dalam tabel di bawah ini :

Jebres, karena belum sepenuhnya program pembangunan pendidikan menyentuh pembangunan di bidang pendidikan Pra Sekolah terutama bidang Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal

4.3.2 Analisis Peran Penentu Kebijakan dibidang PAUD Non Formal

Untuk memperkuat analisis sebelumnya, akan lebih lengkap apabila mengetahui peran para penentu kebijakan khususnya yang menangani bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Sehubungan dengan hal itu perlu kiranya mengetahui pendapat dari para penentu kebijakan tersebut yaitu para pejabat Pemerintah Kota Surakarta yang menangani langsung maupun tidak langsung mengenai program PAUD jalur Non Formal di Kota Surakarta.

Hal ini juga didukung dari kesimpulan hasil questioner dan wawancara langsung dengan pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta (BAPEDA dan DINAS DIKPORA). Adapun hasilnya secara ringkas adalah sebagai berikut :

1. Perhatian Pemerintah Kota Surakarta di bidang Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal sudah menunjukkan suatu hal yang positif. Hal ini terbukti bahwa program-program PAUD jalur Non Formal sudah masuk dalam Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (DINAS DIKPORA) Kota Surakarta Tahun 2002 – 2008.
2. Bentuk dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Dikpora Kota Surakarta adalah dengan dikucurkannya dana bantuan berupa block grant bagi Perintisan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak, dana

pengembangan kelembagaan serta stimulan dana untuk kegiatan Hari Anak Nasional yang selalu diperingati di Kota Surakarta di setiap tahunnya. Namun sangat dipahami bahwa bantuan tersebut belum bisa merata menyentuh ke seluruh wilayah kelurahan se Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan keterbatasan dana APBD, sehingga harus melalui pentahapan dalam setiap tahunnya sampai kepada tujuan akhir yaitu program PAUD Non Formal bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat segala lapisan di seluruh pelosok wilayah Kelurahan se Kota Surakarta

3. Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk sebuah organisasi sebagai mitra dalam Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini. Organisasi tersebut adalah FORUM PAUD dan HIMPAUDI.

FORUM PAUD telah terbentuk pada tahun 2004 yang terdiri dari kalangan Dinas / Instansi terkait, Pemerhati Anak, LSM bidang Anak, Ikatan Dokter Anak Indonesia dan kaum Akademisi. Hanya sangat disayangkan, kiprah nyata dari organisasi ini belum begitu jelas terlihat. Belum terdapat kegiatan-kegiatan yang dimotori Forum ini untuk menggalakkan program PAUD di Kota Surakarta. Forum ini hanya terlibat pada kegiatan-kegiatan besar tingkat Kota Surakarta, misalnya sebagai Juri pada peringatan Hari Anak Nasional dan sebagai Tim Penilai untuk Proses Perintisan Lembaga PAUD Non Formal. Sedangkan HIMPAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia) lebih kelihatan aktivitasnya, terbukti HIMPAUDI telah terbentuk sampai ke tingkat Kecamatan di bawah binaan Cabang Dinas Dikpora Kecamatan. Sedangkan masing-masing Kecamatan mempunyai

seorang Penilik PAUD sebagai pembina teknis yang langsung terjun memantau keberlangsungan organisasi ini.

Keberadaan HIMPAUDI sangat dibutuhkan oleh para pengelola lembaga PAUD Non Formal karena dari hasil pertemuan rutin HIMPAUDI baik tingkat Kota maupun tingkat Kecamatan selalu mendapatkan informasi dan pengetahuan tambahan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dalam lembaga masing-masing.

4. Model pelayanan PAUD Non Formal yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah POS PAUD yang mana Tim Penggerak PKK (TP PKK) Kota Surakarta sebagai motor penggeraknya. Model ini memanfaatkan keberadaan Posyandu Balita yang sudah terbentuk hampir di seluruh wilayah RW (Rukun Warga) di Kota Surakarta. Program ini lebih mengedepankan pelayanan pendidikan terhadap anak sejak usia dini agar dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Di Wilayah Kecamatan Jebres baru terdapat 1 (satu) lembaga POS PAUD, yaitu POS PAUD “PUSPARINI” yang berada di wilayah RW 20 Kelurahan Jebres Surakarta yang mempunyai anak didik sebanyak 32 anak.

Apabila dilihat bahwa di wilayah Kecamatan Jebres terdapat 145 RW yang tersebar di 11 Kelurahan, maka kebutuhan lembaga POS PAUD semacam ini mencapai 99 %

5. Kondisi sarana dan prasarana dalam PAUD Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres masih dapat digolongkan minim dan kurang lengkap sehingga kurang memenuhi kebutuhan para anak didik.

Dari hasil survei didapat data bahwa sarana yang berupa barang habis pakai (Alat Permainan Edukatif, buku-buku bacaan dll) yang ada di semua lembaga PAUD Non Formal hampir semuanya menyatakan kurang memenuhi syarat sebagai sarana PAUD yang sesuai standart baku. Demikian pula prasarananya yang berupa barang tidak bergerak (ruang kelas, ruang guru, lokasi keseluruhan dll) masih banyak yang menggunakan lokasi dari sebagian rumah pribadi para pengelolanya. Hanya beberapa saja (3 lembaga Kelompok Bermain dan 1 lembaga TPA) yang memang mendirikan gedung khusus untuk kegiatan PAUD Non Formal. Pada intinya hal ini tidak menjadi kendala asalkan prinsip memberikan bekal kepada anak untuk belajar sambil bermain tercapai. Namun semenjak terbit Peraturan Gubernur Jateng No. 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Badan Standardisasi Nasional yang mengeluarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2004 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan , dirasa masih perlu menyesuaikan diri untuk memenuhi standar dimaksud agar tercapai maksud dan tujuan dari program Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Jebres Surakarta.

Agar lebih mendapatkan perbandingan yang jelas antara standar baku dengan kondisi sarana dan prasarana PAUD Non Formal secara nyata di wilayah penelitian, maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

TABEL IV.9
ANALISIS DESKRIPTIF NORMATIF KEBIJAKAN PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSISTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
1	STANDAR ISI (STANDAR KOMPETENSI)				
	Usaha mewujudkan berbagai potensi yang dimiliki anak menjadi kompetensi atau kemampuan aktual yang berguna untuk pengembangan anak usia dini selanjutnya		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkembangan moral dan agama ➤ Perkembangan kemampuan dasar (kemampuan fisik, bahasa, kognitif dan kecerdasan jamak) 	Kompetensi lulusan peserta didik : * berkomunikasi secara Lisan * memiliki daya cipta dan daya piker * mengungkapkan perasaan & emosinya secara wajar * meningkatkan keterampilan motorik halus dan kemampuan motorik kasar	82,35 % lembaga PAUD Non Formal telah memenuhi 10 indikator standar kompetensi namun belum semuanya memenuhi secara detil masing-masing sub indikatornya

dilanjutkan ke halaman 143

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
2	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN				
	Persyaratan minimal tentang proses inter aksi peserta didik dengan pendidik		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Persiapan ➤ Pelaksanaan (strategi dan bentuk) ➤ Asesment dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran 	Peserta didik wajib : <ul style="list-style-type: none"> * mengikuti kegiatan minimal 75% dari jumlah peserta * menyelesaikan tugas-tugas secara individu / kelompok * mengikuti evaluasi hasil belajar 	90 % peserta didik mengikuti pembelajaran 3 x dalam seminggu
3	STANDAR PESERTA DIDIK				
	Ruang lingkup pendidikan anak usia dini di jalur Non Formal adalah 0-6 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Usia Posyandu = 0-5 tahun ➤ Usia Pra Sekolah = 5-6 tahun ➤ Daya tampung siswa 30-40 anak 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kelompok TPA (0-6 tahun) ➤ Kelompok Bermain (2-6 th) ➤ Kelompok SPS (0-6 th) 	<ul style="list-style-type: none"> * usia 0-3 tahun dilayani melalui TPA * usia 4-6 tahun dilayani melalui PAUD Non Formal * setiap anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD Formal dapat menjadi peserta didik pada program PAUD Non Formal 	<ul style="list-style-type: none"> * 95 % TPA melayani anak usia 2-5 tahun * 100 % Kelompok Bermain melayani anak usia 2 - 5 tahun * satu-satunya POS PAUD yang ada melayani anak usia 2 - 5 tahun

dilanjutkan ke halaman 144

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
4	STANDAR KETENAGAAN				
	Persyaratan minimal Pendidik (Pamong/ Konselor) dan tenaga kependidikan (tenaga administrasi, pustakawan, teknisi)		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualifikasi tenaga pendidik minimal DII PGTK/PAUD ➤ Kualifikasi tenaga kependidikan minimal lulusan SMA/ sederajat ➤ Rasio pendidik dengan anak diatur menurut kelompok usia : (1) 1:3 untuk usia 0-1 th ; (2) 1:7 untuk usia 1-3 th ; (3) 1:12 untuk usia 3-5 th dan (4) 1:20 untuk usia 5-6 th 	TUTOR * berijazah minimal SMA dan telah mengikuti pelatihan PAUD PENYELENGGARA PROGRAM * mempunyai kemampuan di bidang pendidikan pra sekolah * memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan pra sekolah	95 % tutor dan penyelenggara berijazah SLTA dan S1 (perbandingan 50 : 50)
5	STANDAR SARANA DAN PRASARANA				
	Fasilitas fisik yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan	POSYANDU : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas lantai per anak 30 cm ➤ Luas lahan per lembaga 60 m² PRA SEKOLAH : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Luas lantai per siswa = 1,5 m² ➤ Luas lahan per lembaga=250 m² ➤ Jarak dari rumah penduduk terjauh maksimum 500 m² 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tempat bermain dalam ruangan (indoor) : <ul style="list-style-type: none"> • Alat Permainan Edukatif (APE), Tempat penyimpanan barang (loker), Tape + Kaset + Mikropon, Alas duduk, Meja dan kursi anak, Lemari, Papan Tempel Hasil Karya Anak, Papan tulis, Media presensi anak ➤ Tempat bermain luar ruangan (outdoor) : <ul style="list-style-type: none"> • Jungkitan, Perosotan, Titian, Ayunan, Panjatan. Bak pasir, Bak air 	* disediakan oleh penyelenggara PAUD * mengusulkan melalui pemerintah daerah	* pengadaan prasarana PAUD bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat (swadaya) * kelengkapan jenis prasarana : 75 %

dijanjutkan ke halaman 145

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSISTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kamar mandi / WC : <ul style="list-style-type: none"> • Bak air / ember, Gayung, Kloset, Sabun dan tempatnya, Handuk untuk lap tangan, Keset ➤ Tempat Cuci Tangan ; <ul style="list-style-type: none"> • Ember/ baskom, Lap tangan ➤ Dapur : <ul style="list-style-type: none"> • Kompor, Tempat masak air, Rak piring, Gelas, piring, sendok untuk anak, Tempat cuci piring, Lemari ➤ Ruang Tidur : <ul style="list-style-type: none"> • Ventilasi cukup, Tempat tidur sesuai usia anak, Kursi pengasuh, Selimut, Meja tempat minuman, Lemari pakaian, Radio Tape + kaset ➤ Ruang Kesehatan : <ul style="list-style-type: none"> • Tempat tidur dan perlengkapannya, Timbangan badan, Pengukur tinggi badan, Model/ poster makanan sehat, Kotak P3K ➤ Ruang Administrasi : <ul style="list-style-type: none"> • Meja dan kursi kantor, Meja dan kursi pamong, Alat tulis kantor, Lemari arsip, Buku administrasi ➤ Ruang Perpustakaan : <ul style="list-style-type: none"> • Rak buku, Buku-buku bacaan anak, Buku pengetahuan tentang anak, Tempat duduk untuk baca 		<ul style="list-style-type: none"> * jarak tempuh lembaga PAUD dengan rumah penduduk 1- 3 Km * Luas lahan : <ul style="list-style-type: none"> - 75 % : < 200 m² - 25 % : > 200 m²

dilanjutkan ke halaman 145

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
			➤ Ruang Tunggu : Tempat duduk dan bak sampah		
6	STANDAR PEMBIAYAAN				
	Kriteria minimal tentang satuan biaya pendidikan yang mencakup berbagai aspek		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Biaya satuan pendidikan ➤ Sumber pembiayaan ➤ Komponen pembiayaan ➤ Pengelolaan anggaran ➤ Pelaporan dan akuntabilitas penggunaan biaya 	BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD * survai data dasar * pendistribusian bahan belajar * penyusunan kurikulum * penyelenggaraan pelatihan * proses belajar mengajar * honor tutor dll. SUMBER BIAYA * APBD, LSM, Organisasi Sosial, Swadaya	* Biaya operasional lembaga diatur sendiri oleh penyelenggara * honor tutor/ tenaga lainnya menyesuaikan dengan kemampuan * 50 % lembaga PAUD didanai oleh Pemerintah dan masyarakat. 50 % lainnya merupakan dana swadaya (orang tua murid)
7	STANDAR PERAN SERTA MASYARAKAT				
	Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan keluarga ➤ Dukungan masyarakat ➤ Dukungan pemerintah 	Diwujudkan sebagai : * Nara sumber teknis (tutor) * penyelenggara program	* Dukungan masyarakat (orang tua murid) :

dilanjutkan ke halaman 147

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSISTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
	pengembangan sumber daya manusia secara optimal dan berkualitas			penyanggah dana (sumber dana)	<ul style="list-style-type: none"> - dana (iuran rutin) - tenaga (kerja bakti) - pikiran / pendapat (rapat pertemuan orang tua murid) * Dukungan masyarakat umum: <ul style="list-style-type: none"> - penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar lembaga PAUD (out bond, lomba-lomba dll.)
8	STANDAR ORGANISASI KELEMBAGAAN				
	Persyaratan minimal berkenaan dengan aspek legalitas dan struktur organisasi dengan mekanisme kerjanya		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek legalitas ➤ Aspek struktur organisasi 		* 85 % lembaga PAUD Non Formal sudah berijin, sisanya masih dalam proses.

dilanjutkan ke halaman 148

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSISTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
9	STANDAR PENILAIAN (ASESMENT DAN EVALUASI PENDIDIKAN)				
	Untuk mengevaluasi profil perkembangan anak sehingga dapat diketahui karakteristik perkembangan anak		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Standar perkembangan yang jelas ➤ Tugas-tugas bermakna bagi perkembangan anak ➤ Refleksi diri ➤ Asesmen berbagai diri anak bidang perkembangan ➤ Hasil asesmen berinteraksi secara integratif ➤ Kualitas kerja ➤ Dapat digunakan untuk pengembangan anak selanjutnya ➤ Berkesinambungan 	Indikator keberhasilan : * 65 % anak usia 0-4 tahun mengikuti kegiatan Kelompok Bermain dan TPA * 50 % anak usia 4-6 tahun yang belum terlayani pada program PAUD Formal mengikuti PAUD Non Formal * 50 % tutor dan penyelenggara PAUD Non Formal telah mengikuti pelatihan bidang PAUD	
10	STANDAR MANAJEMEN DAN LINGKUNGAN				
	Meliputi hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengelolaan organisasi dan penyelenggaraan program/ kegiatan		Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengetahui latar belakang anak ➤ Menetapkan tahap perkembangan anak ➤ Menetapkan tujuan pembelajaran ➤ Menyusun materi Mengyusun lesson plan (rencana pelaksanaan)	Minimal memiliki seorang ketua kelompok atau penyelenggara program dan para tutor	95 % lembaga PAUD Non Formal mempunyai : * struktur organisasi yang jelas * mengikuti tahap-tahap perencanaan

dijalankan ke halaman 149

lanjutan

NO.	KOMPONEN / INDIKATOR	STANDARDISASI			KONDISI EKSISTING
		STANDAR NASIONAL INDONESIA (TAHUN 2004)	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (TAHUN 2005)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (TH. 2005)	
1	2	3	4	5	6
			Pelaksanaan Program ➤ Menyusun materi pembelajaran 1 tahun ➤ Menyusun rencana pelaksanaan (lesson plan) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program ➤ Mengevaluasi program secara periodik Lingkungan ➤ Lingkungan dalam kelas (indoor) ➤ Lingkungan luar kelas (outdoor) Lingkungan yang berkaitan dengan teknologi informas	Minimal memiliki seorang ketua kelompok atau penyelenggara program dan para tutor	* mengevaluasi kegiatan secara periodik oleh Pemerintah Kota (Dinas Dikpora), Pemerintah Kecamatan (Penilik PAUD)

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dari tabel di atas dapat ditarik suatu garis besar analisis bahwa antara item-item dari masing-masing acuan standarisasi adalah saling melengkapi satu sama lain, sedangkan kondisi eksisting yang ada di wilayah Kecamatan Jebres merupakan pengambilan intisari dari ketiga acuan tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya lembaga PAUD Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres telah memenuhi semua indikator kompetensi dari Standarisasi di atas, hanya saja pada setiap item atau sub indikatornya belum semua terpenuhi. Namun disinilah letak peran Kebijakan Pemerintah setempat bahwa beberapa item indikator yang belum dijalankan merupakan pekerjaan rumah bagi para penentu kebijakan di bidang PAUD Non Formal, terutama terhadap kenyataan bahwa program PAUD Non Formal masih belum merata dirasakan oleh segala lapisan masyarakat terutama golongan masyarakat kurang mampu.

4.4 Analisis Permintaan dan Ketersediaan Lembaga PAUD Non Formal

Dalam menganalisis permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta dibutuhkan *teknik analisis Optimasi Fasilitas* yang gunanya untuk mengkaji suatu aspek lokasi agar dicapai suatu kondisi yang paling sesuai dengan ketentuan atau prasyarat yang diharuskan seoptimal mungkin, selain itu juga untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan lembaga PAUD Non Formal bagi pengguna lembaga PAUD Non Formal.

Untuk menganalisis kebutuhan lembaga PAUD Non Formal yang sebenarnya, terlebih dahulu harus melihat berapa jumlah anak usia dini (0-6 tahun) di wilayah Kecamatan Jebres, kemudian dicari berapa jumlah anak yang

sudah terlayani PAUD baik melalui jalur Formal maupun Non Formal. Hal ini dilakukan karena tidak bisa terpisahkan begitu saja antara PAUD Formal dan Non Formal mengingat sasaran usia anak sama-sama usia pra sekolah dasar (0-6 tahun). Namun pemisahan usia dalam penelitian ini harus terlihat jelas agar dapat menganalisis secara cermat dan tepat sasaran.

Dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah terukur jelas bahwa anak usia 4-5 tahun adalah syarat minimal usia anak masuk pada jenjang TK/RA kelompok A dan anak usia 5-6 tahun masuk pada jenjang TK/RA kelompok B. Sedangkan pada PAUD Non Formal telah diatur bahwa anak usia 0-3 tahun dilayani melalui TPA dan usia 4-6 tahun terlayani melalui Kelompok Bermain terutama bagi anak yang belum terlayani melalui PAUD Formal (TK/RA). (Standar Pelayanan Minimal, 2005:3).

Adapun dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan responden, didapat suatu kenyataan bahwa anak-anak yang terlayani di lembaga PAUD Non Formal hampir keseluruhan berusia di bawah 5 tahun. Hal ini sesuai dengan persepsi masyarakat bahwa setelah mengikuti program PAUD Non Formal terutama dalam Kelompok Bermain, anak-anak mereka mempunyai kewajiban untuk meneruskan pendidikan di jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Apalagi Kelompok Bermain yang melayani anak usia 5-6 tahun (Kelompok C) belum dipahami oleh masyarakat Kota Surakarta. Baru terdapat 1 lembaga PAUD Non Formal untuk Kelompok C yaitu yang dikelola oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasarkliwon. Sehingga sangat wajar apabila masyarakat wilayah Kecamatan Jebres mempunyai kecenderungan

untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya ke jenjang TK setelah menempuh pendidikan di Kelompok Bermain. Bagi mereka mempercayakan anak-anak dalam program Kelompok Bermain adalah melatih anak-anak untuk mandiri dan menambah keterampilan sehingga diharapkan anak dapat mempunyai kesiapan baik mental maupun spiritual untuk memasuki pendidikan pada jenjang di atasnya.

Dengan melihat potensi anak usia 0-6 tahun di Kecamatan Jebres dan beberapa hasil temuan di atas, maka untuk menganalisis kebutuhan lembaga PAUD Non Formal dan mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta serta dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia khususnya dalam menentukan jumlah minimum penghuni yang dilayani lembaga PAUD per 1000 anak adalah 8 %, maka apabila diterapkan dengan jumlah penduduk dan jumlah anak usia dini (0-6 tahun) tersebut, maka dapat dilihat analisis kebutuhan lembaga PAUD Non Formal seperti yang tertera pada tabel berikut :

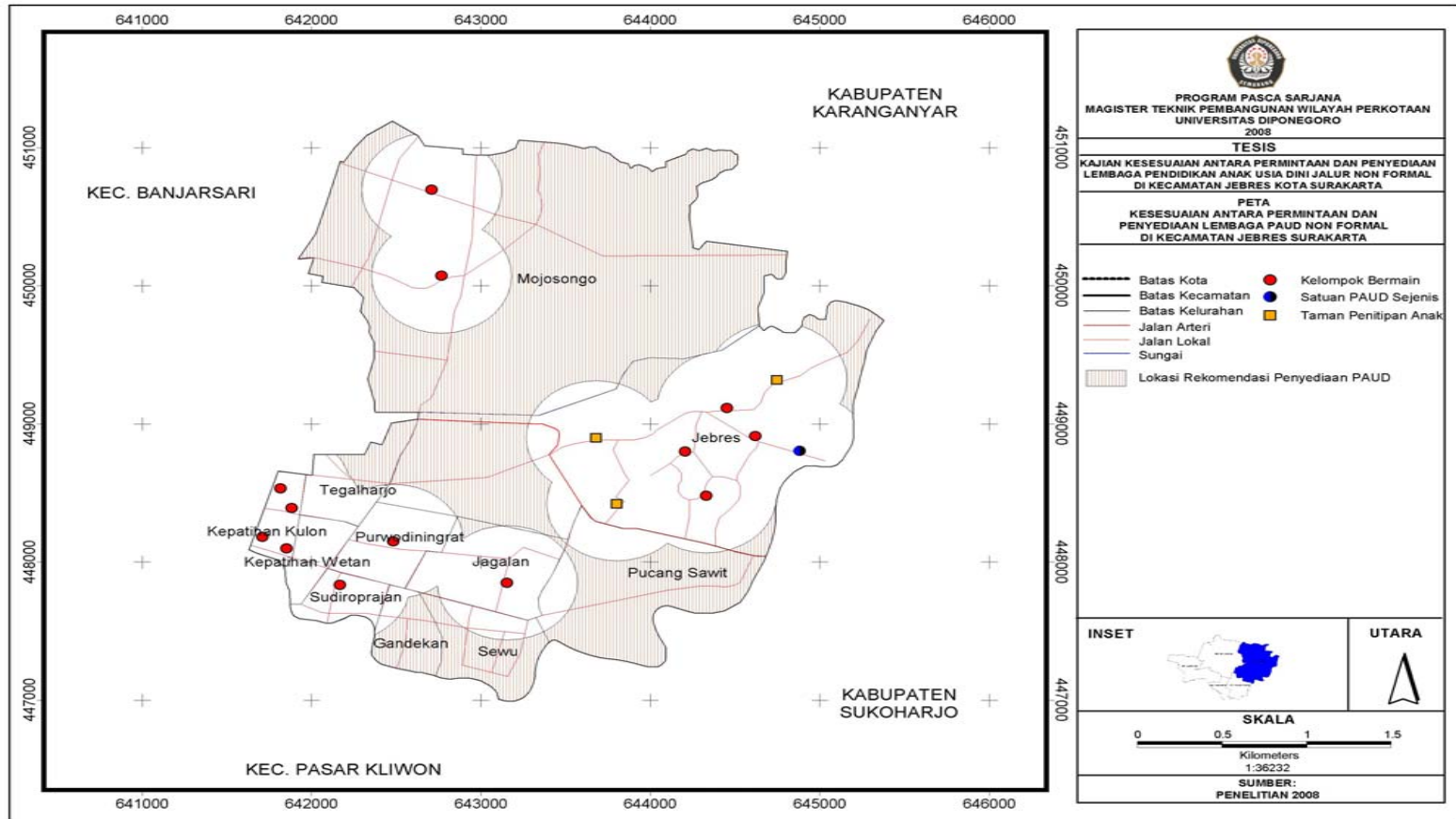
TABEL IV. 10
ANALISIS KEBUTUHAN LEMBAGA PAUD NON FORMAL
DI KECAMATAN JEBRES KOTA SURAKARTA

No.	Kelurahan	Jml Penduduk	Jumlah Anak Usia Dini			Jml minimal Anak Usia Dini yang seharusnya terlayani (berdasarkan SNI) = 8% x (6)	Jumlah anak usia dini yang terlayani PAUD (Kondisi Nyata Tahun 2005)												Jumlah anak usia dini yang belum terlayani PAUD		Analisis Kebutuhan Lbg PAUD Non Formal (asumsi 1 lbg = 10-20 anak) 19/10
			Usia 0-5 th	Usia 5-6 th	Jml		Jml Lbg & Anak PAUD Jalur Non Formal (0-5 th)						Jml Lbg & Anak PAUD Jalur Formal (5-6 th)		Jml.PAUD Formal & Non Formal		Usia 0-5 th (4-15)	Usia 5-6 th (5-17)			
							KB		TPA		SPS		Jml Lbg & Anak PAUD Jalur Non Formal		Jml Lbg	Jml Anak			Jml Lbg (14 + 16)	Jml Anak (15+ 17)	
			Jm. Lbg	Jml Anak	Jml. Lbg		Jml Anak	Jml lbg	Jml Anak	Jml Lbg (8+ 10+ 12)	Jml Anak (9+ 11+ 13)	Jml. Lbg	Jml Anak								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Kepatihan Kulon	2262	462	1100	1562	125	4	52		0		0	4	52	5	65	9	117	410	1035	41
2	Kepatihan Wetan	3115	384	1397	1781	142		0		0		0	0	0	6	74	6	74	384	1323	38
3	Sudiroprajan	4577	765	1200	1965	157	1	12		0		0	1	12	6	82	7	94	753	1118	75
4	Gandekan	9515	1053	941	1994	160		0		0		0	0	0	7	84	7	84	1053	857	105
5	Sewu	8334	1265	783	2048	164		0		0		0	0	0	7	86	7	86	1265	697	126
6	Pucangsawit	13770	812	1115	1927	154		0		0		0	0	0	6	81	6	81	812	1034	81
7	Jagalan	12350	1398	1402	2800	224	1	12		0		0	1	12	10	118	11	130	1386	1284	138
8	Purwodiningratan	4702	805	239	1044	84	1	10		0		0	1	10	3	44	4	54	795	195	79
9	Tegalharjo	6228	459	280	739	59		0		0		0	0	0	2	31	2	31	459	249	45
10	Jebres	32060	1453	754	2207	177	4	66	3	33	1	32	8	131	7	93	15	224	1322	661	132
11	Mojosongo	42449	1506	2376	3882	311	2	38		0		0	2	38	10	162	12	200	1468	2214	146
	JUMLAH	139606	10362	9211	21949	1757	13	190	3	33	1	32	17	255	69	920	86	1175	10107	10667	1006

Sumber : Hasil Analisis 2008

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari jumlah 21.949 Anak Usia Dini yang ada di Kecamatan Jebres baru sebanyak 1.175 anak yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui jalur Formal maupun Non Formal. Ini berarti baru 5,35 % saja yang terlayani, sedangkan 94,65 % sisanya belum tersentuh pelayanan PAUD sama sekali. Suatu prosentase yang sangat tinggi dan sangat disayangkan apabila mengingat betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Namun apabila dianalisis dengan menggunakan dasar Standar Nasional Indonesia bahwa dalam setiap 1000 anak minimal terlayani PAUD sebesar 8 % (SNI. 2004), sehingga apabila diterapkan dalam tabel di atas, Anak Usia Dini yang seharusnya dilayani minimal sejumlah 1.757 anak atau kalau diprosentasekan baru terlayani sebesar 66,88 %, belum memenuhi batas minimal pelayanan.

Ketersediaan Lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres menurut tabel di atas masih belum memenuhi batas minimal. Dari hasil analisis kebutuhan lembaga PAUD Non Formal seharusnya jumlah lembaga yang harus tersedia untuk melayani 10107 anak yang merupakan jumlah anak usia dini (0-5 tahun) yang belum terlayani dengan asumsi setiap 1 lembaga berjumlah 10-20 anak, sehingga didapat jumlah lembaga yang harus tersedia adalah 1006 lembaga untuk se Kecamatan Jebres. Sedangkan lembaga yang tersedia baru 17 lembaga, sehingga baru 1,69 % jumlah lembaga yang melayani anak usia dini pada jalur non formal. Untuk mengetahui Kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal tersebut akan lebih jelas apabila dilihat pada Peta Kesesuaian seperti pada gambar berikut ini :



GAMBAR 4.9
PETA KESESUAIAN ANTARA PERMINTAAN DAN PENYEDIAAN
LEMBAGA PAUD NON FORMAL DI KECAMATAN JEBRES SURAKARTA

4. 5 Hasil Temuan Studi

Dari langkah-langkah penelitian yang telah dilakukan guna mengkaji kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta, diperoleh beberapa temuan studi berikut ini :

1. Berdasarkan pembagian Wilayah Pembangunan, Kecamatan Jebres merupakan prioritas pembangunan di bidang Pendidikan, oleh karena itu sangat wajar apabila lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai ke tingkat Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta, lembaga-lembaga kursus banyak didirikan di wilayah ini, termasuk lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dari jalur Formal maupun Non Formal.

Namun jumlah lembaga PAUD khususnya PAUD Non Formal bila dibandingkan jumlah anak usia dini (0-6 tahun) yang ada di Kecamatan Jebres dirasa belum sebanding, karena baru terdapat 17 lembaga PAUD Non Formal yaitu 13 Kelompok Bermain (KB), 3 Taman Penitipan Anak (TPA) dan 1 POSPAUD yang rata-rata hanya menampung 10 – 20 anak setiap lembaga. Sehingga dengan kondisi tersebut sangat dibutuhkan lebih banyak lagi lembaga PAUD Non Formal

2. Letak lokasi lembaga PAUD Non Formal di setiap Kelurahan juga dirasa sangat timpang dan menjadikan persebaran yang tidak merata. Di satu sisi, terdapat Kelurahan dengan lembaga PAUD Non Formal lebih dari 1, sedangkan di sisi lain terdapat pula Kelurahan yang sama sekali belum mempunyai lembaga PAUD Non Formal . Hal ini sangat disayangkan karena dengan potensi anak usia dini yang ada tetapi belum tersentuh PAUD sama

sekali maka akan kehilangan masa-masa emas bagi anak dalam pengembangan dan optimalisasi fungsi otak anak .

3. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Jebres dalam hal PAUD Non Formal masih sangat minim, sehingga kesadaran untuk mengikutsertakan dalam PAUD Non Formal juga sangat rendah. Lembaga PAUD yang mereka kenal adalah Taman Kanak-Kanak (TK). Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi program PAUD Non Formal yang dirasa belum merata sampai kepada masyarakat lapisan bawah. Disamping itu juga dikarenakan adanya anggapan bahwa PAUD Non Formal hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang kaya saja.

4. Layanan PAUD Non Formal bentuk TPA ternyata hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu saja, yaitu untuk karyawan dimana TPA itu bernaung. Seperti halnya dengan TPA Permata Hati, anak-anak yang dititipkan mayoritas dari anak-anak Dokter atau Perawat karena TPA ini dibawah pengelolaan Dharma Wanita Persatuan Unit RSUD Dr. Muwardi Surakarta dan lokasinya berdekatan dengan lokasi Rumah Sakit tersebut.

Demikian pula TPA YPAB, ternyata merupakan tempat penitipan khusus untuk anak-anak terlantar yang ditinggal orang tuanya atau dibuang, sehingga sifatnya seperti layaknya sebuah Panti Asuhan yang sewaktu-waktu ada orang yang mengadopsi anak-anak tersebut.

Sedangkan TPA Pondok ASI, karena dibawah pengelolaan Dharma Wanita Persatuan Unit UNS dan lokasinya berada di tengah-tengah lokasi kampus

UNS, maka anak-anak yang dititipkan semuanya adalah anak-anak dari Dosen, Karyawan dan Mahasiswa UNS itu sendiri.

5. Bentuk layanan PAUD Non Formal selain KB dan TPA adalah POSPAUD, yaitu PAUD yang terintegrasikan dengan Posyandu. Program POSPAUD “Pusparini” merupakan program percontohan sebagai usaha agar program PAUD Non Formal lebih merata dirasakan sampai kepada masyarakat ekonomi lemah. POSPAUD merupakan perpaduan antara program Kelompok Bermain dan Posyandu dimana program Posyandu lebih dahulu dikenal masyarakat dan berada di setiap wilayah RW. Program ini diharapkan akan lebih digalakkan dengan pertimbangan bahwa biasanya di dalam Kegiatan Posyandu bisa melayani lebih dari 30 anak, sehingga apabila diintegrasikan dengan program PAUD khususnya Kelompok Bermain, anak akan mendapatkan keuntungan ganda yaitu selain mendapatkan layanan kesehatan juga layanan pendidikan sambil bermain. Disamping itu dengan program POSPAUD ini maka akan lebih banyak lagi anak-anak dari golongan ekonomi lemah yang tertangani dan merasakan arti pentingnya PAUD karena biayanya yang murah dan terjangkau oleh masyarakat golongan tersebut.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang PAUD Non Formal tidak bisa disalahkan begitu saja. Minimnya informasi yang mereka terima terkait dengan hal itu sangat dipengaruhi oleh kurang gencarnya Pemerintah Kota Surakarta dalam mensosialisasikan program-program PAUD Non Formal, kurang optimalnya petugas teknis yaitu Penilik PAUD di setiap Kecamatan sebagai tangan panjang Pemerintah Kota dalam pembinaan dan sosialisasi ke

masyarakat serta terbatasnya dana APBD 2 yang dialokasikan untuk program PAUD Non Formal semakin menjadikan ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kota Surakarta.

7. Sarana dan Prasarana lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres dirasa masih banyak yang belum memenuhi Standar secara maksimal baik jumlah maupun kondisinya, terutama APE
8. Peran Dinas/ Instansi/ Lembaga/ Organisasi terkait dengan PAUD Non Formal dirasa masih kurang terlihat secara nyata. Hal ini dibuktikan dengan adanya Kebijakan tentang PAUD Non Formal yang dalam implementasinya sebagian besar belum terlihat nyata.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melalui beberapa analisis dan beberapa temuan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan penelitian bahwa terjadi *ketidaksesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta*. Hal ini terbukti setelah melalui beberapa kajian yang mengacu pada sasaran penelitian dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya jumlah anak usia 0-6 tahun di Kecamatan Jebres merupakan potensi yang perlu digarap dengan program Pendidikan Anak Usia Dini baik melalui jalur Formal (TK/RA) atau jalur Non Formal (Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis atau POS PAUD). Namun berdasarkan hasil analisis, ternyata baru sebanyak 5,4 % saja yang terlayani program PAUD. Kenyataan bahwa banyak masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke lembaga PAUD jalur Formal dikarenakan persepsi salah dari masyarakat yang masih menganggap bahwa lembaga PAUD Non Formal adalah untuk masyarakat yang mampu saja.
2. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini jalur Non Formal di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta belum tersebar merata di tiap Kelurahan. Hal ini terbukti bahwa dari 11 wilayah Kelurahan di

Kecamatan Jebres, hanya 6 Kelurahan saja yang telah memiliki lembaga PAUD Non Formal, yaitu 13 lembaga dalam bentuk Kelompok Bermain, 3 lembaga Taman Penitipan Anak (TPA) dan 1 lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) yang berbentuk POS PAUD.

3. Ketidakmerataan sebaran lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Kota Surakarta disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang paling dominan adalah faktor kekurangpahaman masyarakat tentang program PAUD Non Formal. Hal ini disimpulkan dari hasil angket responden dari unsur masyarakat umum yang menyebutkan bahwa masyarakat umum pada dasarnya paham betul akan arti pentingnya PAUD (83,33 %) namun mayoritas pemahaman PAUD bagi mereka adalah PAUD dari jalur Formal (TK/RA). Kondisi ini disebabkan karena begitu minimnya informasi yang mereka terima tentang PAUD Non Formal.
4. Jarak Jangkau antara letak lembaga PAUD Non Formal dengan lokasi perumahan penduduk sekitarnya ternyata bukan menjadi motivasi para orang tua yang mempunyai anak usia dini untuk menyekolahkan atau mengikutsertakan anaknya dalam program pendidikan anak usia dini jalur Non Formal. Hal ini terbukti bahwa peserta PAUD Non Formal lebih banyak dari masyarakat di luar lembaga tersebut. Jangkauan pelayanan lembaga PAUD Non Formal didominasi dari anak didik dengan domisili rumah yang berjarak 1 – 3 Km² dari lokasi PAUD Non Formal yang mereka ikuti. Hal ini merupakan kondisi yang jauh dari standar baku yang mematok jarak pelayanan maksimum 500 m². Hanya lembaga POSPAUD

yang memenuhi persyaratan tersebut karena POSPAUD melayani anak-anak usia dini dari satu wilayah RW.

5. Potensi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayah Kecamatan Jebres Kota Surakarta belum sesuai dengan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal yang ada. Masih terdapat 97 % anak usia dini yang belum terlayani dalam lembaga dimaksud. Hal ini berarti masih dibutuhkan banyak rintisan lembaga PAUD Non Formal guna menampung dan melayani anak-anak usia 0-6 tahun yang belum tertampung dalam PAUD Formal.
6. Bukti bahwa adanya ketidaksesuaian antara permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta memberikan catatan penting bagi pihak Pemerintah Kota Surakarta bahwa sangat diperlukan campur tangan antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam menyusun dan merencanakan program PAUD Non Formal agar lebih menarik sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat dari berbagai lapisan
7. Organisasi yang menangani bidang PAUD Non Formal yaitu FORUM PAUD dan HIMPAUDI dirasa belum sepenuhnya membuahkan hasil karya yang dapat menangani ketimpangan antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal. Bahkan keberadaan organisasi inipun tidak banyak masyarakat yang mengetahui.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan serta berbagai masukan yang didapat dari pihak-pihak terkait selama mengadakan survey dan observasi di

wilayah penelitian, maka dapat penulis sampaikan beberapa rekomendasi dalam rangka ikut memberikan beberapa masukan terkait dengan kajian kesesuaian antara permintaan dan penyediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan Jebres Surakarta, sebagai berikut :

1. Guna memenuhi kesesuaian antara permintaan dan ketersediaan lembaga PAUD Non Formal di Kecamatan memang tidak mudah. Sangat diperlukan kesadaran yang tinggi dari Pemerintah, Masyarakat dan pihak swasta untuk memahami arti pentingnya pendidikan bagi anak dalam usia sedini mungkin. Hal ini dapat diwujudkan minimal dalam gerakan nyata yaitu mengadakan koordinasi antar ketiganya, saling membuka wawasan dan merencanakan program sejak awal agar dapat tercapai tujuan bersama. Perencanaan program PAUD Non Formal diharapkan dapat dilaksanakan secara terpadu dari ketiga unsur di atas. Penyusunan rencana dapat diawali dengan membentuk satu tim khusus yang mewakili dari ketiga unsur tersebut untuk melakukan review dari semua kegiatan program PAUD Non Formal yang telah berjalan, mencari adanya kendala untuk segera dicari solusi pemecahannya. Review paling tidak dilaksanakan setiap akhir tahun sekali dengan sumber dana dari APBD Kota Surakarta.
2. Sebaiknya organisasi yang telah terbentuk yaitu FORUM PAUD dan HIMPAUDI lebih dioptimalkan lagi peran sertanya di bidang pengembangan PAUD Non Formal, sehingga wadah ini menjadi ujung tombak keberhasilan program pengembangan PAUD Non Formal. Menyusun Program Kerja tahunan yang nantinya menjadi agenda rutin

Kegiatan nyata yang paling sederhana yaitu dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali untuk membahas segala sesuatu tentang PAUD Non Formal, misalnya membahas rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan pada jangka pendek dan jangka panjang. HIMPAUDI yang merupakan wadah dari para Pengelola dan Pendidik PAUD Non Formal diharapkan dapat menjadi penampung segala permasalahan yang dialami para Pengelola dan Pendidik dan menjadi penghubung dengan Pemerintah Kota untuk mencari solusi pemecahan masalah. FORUM PAUD yang beranggotakan para ahli di bidang PAUD diharapkan dapat melakukan kegiatan nyata misalnya :mengadakan kampanye program PAUD secara rutin minimal 1 bulan sekali melalui media masa elektronik (TV dan Radio) dan media Cetak (Surat Kabar dan Majalah), mengadakan anjingsana rutin dalam rangka pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga PAUD Non Formal se Kota Surakarta minimal 1 bulan sekali

3. Memberikan tugas pokok dan fungsi secara jelas terhadap kepanjangan tangan Dinas Dikpora Kota Surakarta yaitu Penilik PAUD yang bernaung di setiap Cabang Dinas Dikpora Kecamatan se Kota Surakarta agar mempunyai tanggungjawab terhadap perkembangan program PAUD di wilayah binaannya. Penilik PAUD diharapkan selalu mengadakan monitoring dan evaluasi kepada lembaga PAUD Non Formal minimal 1 bulan sekali dan menertibkan administrasi dan laporan bulan dari setiap lembaga tersebut.

4. Pemerintah Kota diharapkan dapat mengedepankan pemerataan program PAUD Non Formal dengan cara mengoptimalkan peran Kelompok PKK Kelurahan dan lembaga Posyandu yang ada agar program POS PAUD dapat berjalan sesuai yang diinginkan, karena program ini sangat tepat bagi masyarakat kurang mampu agar dapat ikut mengenyam pendidikan bagi anak-anaknya sejak usia dini. POSPAUD diharapkan dapat dikembangkan minimal 1 lembaga di tiap-tiap Kelurahan.
5. Sosialisasi Program PAUD Non Formal yang gencar dan terus menerus dalam bentuk Seminar, Pelatihan dan kegiatan-kegiatan lomba yang melibatkan berbagai pihak dari tingkat Kota sampai ke tingkat RW dan RT adalah suatu langkah yang tepat untuk lebih mempercepat penyadaran kepada masyarakat awam akan arti pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini. Tim sosialisasi diharapkan dari unsur eksekutif, legeslatif, dan tokoh masyarakat serta LSM pemerhati anak. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan minimal 1 bulan sekali dan mengadakan lomba minimal 1 kali dalam setahun yaitu pada saat Hari Anak Nasional.
6. Secara yuridis formal, pelaksanaan PAUD telah memiliki pijakan yang kuat yaitu UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tetapi secara lebih spesifik, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan PAUD belum ada, oleh karena itu untuk mendukung dan memberikan pijakan yang lebih jelas bagi arah penyelenggaraan PAUD, sudah saatnya berbagai Peraturan dan Keputusan tersebut perlu segera diterbitkan agar memudahkan dalam

penentuan kebijakan dalam berbagai hal termasuk pendanaan program pengembangan PAUD.

7. Demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, alangkah lebih baiknya hasil penelitian ini dapat ditindaklanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya agar program-program mengenai penanganan anak usia dini lebih tersosialisasikan lagi dan mengena pada sasaran yang tepat dan bagi pemerhati pendidikan anak usia dini agar selalu berusaha memasukkan program-program pembelajaran anak usia dini ke dalam materi pelajaran atau kurikulum melalui lembaga-lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan tinggi, agar tertanam sejak awal bahwa penanganan anak sejak usia dini merupakan sebuah aset dan investasi berharga bagi masa depan sebuah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- BAPEDA Kota Surakarta. 2005. *Kota Surakarta dalam Angka 2005* Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta
- _____. 2005. *Profil Kota Surakarta*. Badan Perencanaan Daerah Kota Surakarta
- Budi DS. 2005. *Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, Edisi Perdana*. 2002. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta.
- Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, Edisi 03 Desember 2002*. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta.
- Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, Edisi 02 April 2003*. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta.
- Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, Edisi 02 Agustus 2003*. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta.
- Buletin PADU Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, Edisi Khusus 2004*. Direktur Pendidikan Anak Dini Usia, Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta
- Bureau of Transport Economics, 1998, *Urban Transport Models*, Department Of Transport and Regional Services.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Depdiknas. 2006. *Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

- Dinas Dikpora Kota Surakarta. 2002. *Renstra Dinas Dikpora Kota Surakarta tahun 2002-2008*. Surakarta.
- Direktorat PADU. 2003. *Pedoman Pengajuan Rintisan Program Pendidikan Anak Dini Usia*. Jakarta.
- _____. 2003. *Pedoman Rintisan Program Taman Penitipan Anak*. Jakarta.
- _____. 2004. *Lebih Jauh tentang Sentra dan Saat Lingkaran, Pijakan dan Penilaian Main Anak Usia Dini*. Sekolah Al Fatah. Jakarta.
- Dirjen PLSP Depdiknas. 2003. *Hasil Perumusan Semiloka Nasional Pendidikan Anak Usia Dini "Konseptualisasi dan Pemetaan Tatanan Kebijakan serta Sistem dan Program PAUD di Indonesia". 10-12 September 2003*. Bandung.
- _____. 2004. *Laporan Eksekutif Semiloka Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta.
- _____. 2005. *Laporan Review Kebijakan : Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini di Indonesia*. Jakarta.
- _____. 2005. *Mewujudkan PAUD yang Holistik*. Makalah Semiloka PAUD tingkat Nasional, 13 Nop 2005.
- Djojodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Penerbit Fak. Ekonomi UI. Jakarta.
- Hadi Sutrisno. 2001. *Metodologi Research Jilid 3*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Hidayat, Syarif. 1999. *Pengembangan Anak Dini Usia untuk menyiapkan Sumberdaya Manusia Berkualitas*. Jakarta: Ditjen Diklusepora.
- Jusuf Enoch. 1992. *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*. Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.
- Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2005. *Peraturan Gubernur Jateng No. 3 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan*. Semarang.
- Rahardjo, Nuch. 2006. "Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini". Makalah disampaikan pada Sosialisasi dan Semarak HIMPAUDI Kota Surakarta, Surakarta, 6 Mei 2006.
- Rahman, Hibana. 2002. *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Penerbit PGTKI Press. Yogyakarta.

- Rapoport, Amos. 1977. *Human Aspects of Urban Form*. Penerbit Pergamon Press. Jakarta
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Yogyakarta : PBF
- Singgih Santoso. 2003. *Statistik Deskriptif*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Soemiarti P. 2000. *Pendidikan Anak Prasekolah*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Sudjana. 2004. *Pendidikan Non Formal*. Penerbit Falah Production. Bandung.
- Sugiyono. 2002. *Statistika untuk Penelitian*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sujarto, Djoko. 1998. *Penataan Ruang Dalam Pengembangan Kota Baru*. Penerbit BPPT. Jakarta.
- _____. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Suryadi, Ace. 1993. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Suryanto, Slamet. 2005. *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Hikayat Publishing. Yogyakarta.
- Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini, Apa, Mengapa dan Siapa Yang Bertanggungjawab terhadap Program Pendidikan Anak Usia Dini ?*, 2004. Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia, Dirjen PLSP, Depdiknas, Jakarta.
- Tilaar, HAR. 2004. *Manajemen Pendidikan Nasional, kajian Pendidikan Masa Depan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, Depdiknas, Jakarta.
- _____. 2002. *Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Penerbit Avyrouz. Yogyakarta.

